

Komitmen dan Perubahan

SUATU PERSEPSI DAN PERSPEKTIF

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Komitmen dan Perubahan

— SUATU PERSEPSI DAN PERSPEKTIF —

Oleh: **Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin**

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Editor: **Supama P. Dikrama**

Layout & Design: **Yusdian Rudenko**

Foto sampul: **Yusdian Rudenko**

Foto-foto: **Puskom Publik Kemhan, Dok. Puspen TNI, dan Dok. Keluarga**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Reformasi sesungguhnya merupakan semangat perubahan dan kesinambungan. Dari perspektif TNI, semangat itu dimaknai sebagai mempertahankan apa yang sudah tepat, sekaligus memperbaiki apa yang dinilai tidak tepat. Inilah garis awal TNI dalam mengubah komitmen, baik struktural, kultural maupun doktrin.

Sepanjang perjalanan pengabdianya, TNI mengalami pasang surut seiring dinamika pertumbuhan bangsa dan negara. Para pendahulu TNI telah bekerja keras meletakkan nilai-nilai militansi serta profesi bagi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga dan mengawal kedaulatan negara. Dalam perjalanan pengabdianya itu pula, kepemimpinan dan manajemen TNI tak luput dari "pujian dan celaan". Namun demikian, eksistensi TNI tetap utuh, bahkan mampu memperkokoh integritas nasional.

Bila pada saat mengawali reformasi TNI dituntut melakukan perubahan komitmen, maka kini TNI sungguh telah melakukan perubahan itu. TNI tidak lagi menjalankan peran sosial politik, kini statusnya murni sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Masyarakat bisa melihat betapa TNI tidak lagi bertindak seperti masa Orde Baru. TNI saat ini sepenuhnya tunduk pada undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Operasi militer perang dan operasi militer

selain perang menjadi koridor TNI dalam mendarmabaktikan profesi dan idealismenya kepada bangsa dan negara.

Memang dalam melaksanakan reformasi, TNI tidak terhindarkan melakukan *trial and error* hingga menemukan perannya yang tepat. Dengan kematangan kepemimpinan dan intelektualitas, TNI telah berubah menjadi *fit and proper* di semua lini pembinaan dan pembangunan kekuatan. Eksistensi dan konsistensinya telah memberi bukti bahwa jati diri TNI secara prinsip maupun filosofis tidak pernah berubah sejak awal kelahirannya. Dengan landasan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, TNI selalu menunjukkan jati dirinya untuk selalu komit dan setia kepada NKRI, selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Di tengah era global sekarang ini, tuntutan yang kita hadapi membangun Indonesia yang kuat. Sebab tantangan dan ancaman pasti semakin tidak ringan. Saat ini kita berada pada era daya saing yang melibatkan semua kemampuan dan kesanggupan bangsa, mulai dari cara berpikir, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan lainnya. Menghadapi era ini, satu kata kunci yang harus kita lakukan, yakni kita harus berani dan mau membangun Indonesia yang kuat. Dalam konteks pertahanan, maka pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter harus saling menopang, dalam suatu sistem.

Keamanan nasional diperlukan oleh negara untuk menopang kepentingan nasional, khusus pada sektor pertahanan negara akan lebih kokoh, jika sistem pertahanan negara ditopang oleh kemandirian industri pertahanan dengan peralatan militer yang modern disertai transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan peran media sebagai instrumen kontrol sosial.

Semoga buku "*Komitmen dan Perubahan, Suatu Persepsi dan Perspektif*" dapat bermanfaat bagi generasi bangsa kita.

Jakarta, Oktober 2016

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkenaan dengan terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Supama P. Dikrama, atas kesediaan mengolah pilihan tulisan dan catatan profesional saya yang berkorelasi dengan TNI dan sistem pertahanan negara. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim SS yang diawaki oleh Sdr. DJ. Nachrowi dan Sdr. S. Kriswasana atas sumbangan pikiran dan tenaga dalam merampungkan buku "*Komitmen dan Perubahan, Suatu Persepsi dan Perspektif*".

Tidak kalah penting pula saya mengucapkan terima kasih kepada Brigjen TNI (Purn) Mazni Harun dan Sdr. Chrisna Deva atas suksesnya buku ini. Terakhir, saya memberikan apresiasi atas dukungan semangat yang besar dari keluarga kepada istri saya Etty Sudiyati, kedua anak dan menantu Benrie-Meli dan Benita-Adjie serta cucu tercinta Alfalik-Altimo-Alanah-Azzam-Azraf.



DAFTAR ISI

Militansi & Intelektualisasi TNI

Urgensi Pertahanan & Bela Negara

-
- | | | | |
|--|------|--|-------|
| 1. Membangun TNI AD yang Kuat dan Modern Guna Menjamin Kedaulatan NKRI | > 3 | 12. Berani Membangun Indonesia Kuat | > 89 |
| 2. Militansi & Intelektualisasi TNI | > 17 | 13. Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan, Keamanan Nasional dan Bela Negara | > 97 |
| 3. Eksistensi dan Konsistensi TNI dalam Politik Pertahanan | > 25 | 14. Menentukan Instrumen Penangkalan | > 103 |
| 4. Penghormatan & Kehormatan TNI | > 31 | 15. Globalisasi dan Perang Asimetris: Dampaknya Terhadap Pembinaan Infanteri | > 109 |
| 5. Kerja Sama Sipil dan Militer | > 37 | 16. Pertahanan Merespons Perang Asimetris | > 123 |
| 6. TNI Memahami Kepentingan Politik Negara | > 43 | 17. Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura | > 135 |
| 7. Membangun Kebanggaan kepada TNI | > 49 | 18. Dekade Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Tiongkok | > 141 |
| 8. Menatap Tantangan 70 Tahun TNI | > 57 | 19. Perlunya Sistem Pertahanan Negara | > 149 |
| 9. TNI Mawas Diri & Waspada | > 65 | 20. <i>Sun Tzu's War Strategy: Perspektif Indonesia</i> | > 161 |
| 10. TNI BIRAWA | > 72 | 21. <i>Defence Intellectual Management</i> | > 175 |
| 11. Fungsi Teritorial TNI: Mendampingi Satu Dekade Reformasi | > 79 | | |

Alutsista, Industri Pertahanan & Keamanan Nasional

22. Industri Pertahanan
Penopang Sistem
Pertahanan Negara > 185
23. Era Kebangkitan
Industri Pertahanan > 197
24. Modernisasi Alutsista:
Sekarang atau Tidak Akan
Pernah > 205
25. Media dan Anti Korupsi
> 211
26. *Reinforcement*
Crisis Management > 215
27. Keamanan Nasional:
Landasan dan
Operasionalisasi > 223
28. Menyeimbangkan
Keamanan dan
Kesejahteraan, Mengatasi
Krisis Ekonomi > 244

1

**MILITANSI
&
INTELEKTUALISASI TNI**



“TNI AD dengan jiwa korsa yang dimiliki sebagai bagian dari prajurit TNI yang berjiwa patriotik, pantang menyerah dan berjuang tanpa pamrih, saya yakini dapat melaksanakan penataan konsolidasi untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Revitalisasi perlu dilakukan untuk pengelolaan organisasi TNI AD agar memiliki kemampuan yang kuat, menjadi organisasi modern, diawaki personel profesional yang memiliki otak cemerlang dan militansi tinggi.”



01.

MEMBANGUN TNI AD YANG KUAT DAN MODERN GUNA MENJAMIN KEDAULATAN NKRI

3

Ensensi *Minimum Essential Force* (MEF) diformulasikan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2009 di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Bandung sebagai suatu kekuatan TNI yang kita kenal di era 70-an dan 80-an sebagai kekuatan yang Kecil Efektif Efisien (KEE). Spesifikasi kekuatan pokok minimal (MEF) ini adalah kekuatan yang ramping tetapi dalam keadaan darurat bisa dibesarkan dan punya kemampuan penangkalan. Siap digelar (diproeksikan) kemana saja di seluruh wilayah NKRI dalam menjalankan tugas-tugas operasional.

Dalam sistem manajemen pertahanan, dalam mewujudkan MEF sangat terkait dengan unsur-unsur yaitu sumber daya manusia (SDM), alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana, Industri Pertahanan, sumber daya alam dan sumber daya buatan (SDA/SDB), wilayah pertahanan negara dan anggaran. Unsur-unsur inilah yang menjadi faktor dalam merumuskan formula anatomi MEF.

Pertimbangan utama merumuskan MEF adalah: pertama, aspek legal yang dilandasi oleh amanat konstitusi UUD 1945 dan

berbagai UU dan regulasi serta kebijakan yang terkait dengan pertahanan negara. Kedua adalah kepentingan strategis yang korelasinya kepada kemungkinan ancaman aktual yang beresiko terhadap kelangsungan hidup negara dan perlunya strategi penangkalan yang bersifat trimatra terpadu sebagai wujud TNI yang solid dan profesional dengan alutsista yang memadai. Ketiga, pertimbangan aspek diplomasi pertahanan. Setiap negara selalu memperhatikan kebijakan pembangunan pertahanan negara lain sebagai kelengkapan instrumen diplomasi pertahanan, oleh karena itu pembangunan kekuatan pokok minimal TNI menjadi penting. Keempat, pertimbangan aspek manajemen pertahanan yang menjadi navigasi dari basis perumusan renstra dan keperluan pembinaan TNI.

Perumusan MEF menjadi domain bagi TNI yang menjadi acuan bagi penyusunan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstrabang Hanneg). Secara periodik fungsi pemerintahan di bidang pertahanan melakukan kaji ulang strategis pertahanan (*Strategic Defence Review/SDR*) untuk mengulas ulang aspek-aspek strategis dari pertahanan negara baik aspek regulasi, struktur organisasi, sumber daya, postur, strategi, doktrin dan anggaran. Pada SDR tahun 2009 fokus kesiapan adalah perwujudan MEF.

Semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI sudah menjadi landasan historis bangsa dan sebagai sasaran dari strategi pertahanan negara. Permasalahan yang mengancam kedaulatan NKRI baik pada skala wilayah perbatasan maupun pelanggaran wilayah NKRI oleh pihak asing dengan berbagai kegiatan ilegal menjadi salah satu tantangan bagi kepentingan kita untuk segera mewujudkan MEF trimatra terpadu TNI.

Dalam menghadapi tantangan tugas yang demikian, khususnya di bidang pertahanan negara, maka kita harus memiliki kemampuan pertahanan negara yang andal yakni kemampuan yang dapat menjamin terlaksananya tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara harus memiliki *contingency plan* dan kesiapan militer yang baik untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik untuk kepentingan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

TNI AD sebagai salah satu pilar kekuatan TNI yang bertanggungjawab pada pertahanan darat dan sangat banyak bersinggungan dengan keselamatan penduduk, maka harus memiliki organisasi yang kuat, modern dan efektif agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjamin kedaulatan negara dan menjaga kelangsungan hidup bernegara yang semakin beradab, guna mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu TNI AD harus dapat mempersiapkan dengan perencanaan yang matang dan berlapis untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang akan terjadi.

5

REFLEKSI TNI AD SAAT INI

Kondisi umum kemampuan komponen utama TNI dan TNI AD khususnya, saat ini disadari masih jauh dari ideal sebagai kekuatan pertahanan yang bertugas untuk menjamin kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan tanah air. Secara umum, organisasi TNI diperlukan penataan menyeluruh dihadapkan pada kondisi geografis yang juga menyulitkan penyebaran dan mobilitas satuan yang kurang didukung oleh sarana angkutan yang memadai. Kelengkapan alutsista TNI AD, bagi prajurit yang dipersenjatai,

kini sebagian besar selain banyak yang sudah tertinggal oleh teknologi persenjataan modern, juga jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan satuan jajaran TNI AD untuk hampir seluruh kecabangan dan kesatuan. Semuanya pada umumnya mengalami kekurangan dan ketertinggalan persenjataan modern beserta kelengkapannya.

6 Dari sisi pembinaan personel, idealisme untuk setiap anggota memiliki tingkat kompetensi individual sebagai prajurit profesional, masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat pendidikan dan pelatihan, masih perlu mendapat perhatian yang besar. Kompetensi profesional prajurit tidak hanya cukup dengan dibekali semangat dan memiliki jiwa militan, melainkan harus disertai dengan tingkat intelektualitas dan keterampilan profesional memadai. Pendidikan dimaksudkan untuk membekali dan pengembangan wawasan agar setiap prajurit memiliki kecakapan berpikir yang cukup agar dapat mengimbangi perkembangan lingkungan, sedang pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis sebagai prajurit profesional. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang mutlak untuk terus ditingkatkan dewasa ini, baik untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di dalam negeri maupun dalam rangka tugas misi perdamaian dunia, sebagai bagian dari implementasi diplomasi pertahanan. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah sarana kehidupan prajurit, seperti kondisi asrama, fasilitas perawatan kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan, sarana angkutan mobilitas prajurit serta tingkat kesejahteraan prajurit dan persoalan lainnya.

Semua permasalahan tersebut pada ujungnya akan berakhir tidak hanya pada persoalan ketersediaan anggaran dari negara, melainkan juga dipengaruhi oleh keterampilan kita di dalam

mengelola suatu organisasi ketentaraan yang modern. Hal itu berarti diperlukan adanya suatu tekad dari kita semua untuk membangun kekuatan TNI AD yang memiliki kemampuan yang kuat dengan organisasi yang modern sehingga efisien dan efektif di dalam pengelolaannya. Pembangunan kekuatan TNI AD yang kuat, modern, efisien dan efektif, hendaknya dapat dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun kemampuan pertahanan negara atau *defence capability building* dengan prioritas membangun kekuatan yang minimal atau *Minimum Essential Force (MEF)*.

7

Kebijakan membangun kemampuan pertahanan dengan MEF, didasarkan pada pertimbangan filosofis dan taktis ekonomis. Pertimbangan filosofis, bahwa pembangunan kekuatan pertahanan yang dilakukan Indonesia adalah bertujuan untuk menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta untuk menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan alam. Artinya kemampuan pertahanan yang dibangun adalah untuk kepentingan menjaga dan melindungi ke dalam dan bukan untuk yang lain. Kemampuan minimal yang dibangun adalah kemampuan yang memiliki daya getar atau *deterrence* dan mampu menghalau kekuatan asing yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa dan kekayaan alam serta kepentingan nasional. Sedang pertimbangan taktis ekonomis adalah karena kita masih mengalami keterbatasan kemampuan anggaran, keterbatasan penguasaan teknologi pertahanan, dan sumber daya manusia yang belum dapat mendukung kemajuan teknologi pertahanan atau industri strategis.

Prioritas pembangunan nasional yang kita laksanakan dewasa ini, adalah masih fokus pada pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni bidang kesehatan dan pendidikan,

penciptaan lapangan kerja, menjaga keamanan dalam negeri agar tercipta ketenteraman warga serta kemapanan politik yang semakin matang dalam berdemokrasi dan penegakan hukum. Bidang pertahanan negara dan pembangunan bidang lainnya mengiringi. Oleh sebab itu, pembangunan kemampuan pertahanan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan minimal prajurit baik kesejahteraan maupun kelengkapan alutsistanya.

8 Sementara itu di dalam melaksanakan tugasnya di dalam menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan warga dan seluruh kekayaan alam, dapat ditempuh dengan kombinasi antara penataan kekuatan TNI dan melakukan diplomasi pertahanan, yakni bersahabat baik dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama dengan negara-negara kunci tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional kita. Keterlibatan Indonesia di dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, harus diupayakan dapat selalu hadir, baik untuk ikut menyelesaikan konflik bersenjata maupun untuk misi-kemampuan.

PERSPEKTIF KEKUATAN TNI AD

Pembangunan kemampuan pertahanan, khususnya TNI AD agar menjadi kekuatan militer yang kuat, maka penataan organisasinya perlu dikelola secara modern sehingga efisien dan efektif di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Salah satu ciri organisasi modern, antara lain adalah ramping strukturnya tetapi kaya fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan cepat di dalam merespons tugas-tugas yang sifatnya penuh dinamika, yang ditunjang dengan tersedianya alutsista, sarana dan kesejahteraan personel yang memadai. Organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, harus diawaki

oleh personel yang memiliki kompetensi memadai sesuai tuntutan tugasnya. Hal itu berarti TNI AD harus memberikan perhatian yang besar pada masalah kualitas manajerial dan peningkatan profesionalitas prajuritnya.

Untuk menciptakan sosok TNI AD di masa mendatang menuju profesionalisme di bidangnya harus didukung, faktor yang mendasar adalah pembinaan sumber daya manusia melalui pembenahan dan perbaikan sistem pendidikan yang berkaitan dengan seleksi pendidikan, proses belajar mengajar (kurikulum) dan alat evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada kompetensi serta kemajuan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman dan perlu dipersiapkan juga kemajuan untuk beberapa kurun waktu ke depan serta harus memiliki jiwa disiplin, semangat juang yang tinggi, berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dicintai rakyat dan bangsanya.

9

Pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting, dan kurikulum serta tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, menjadi hal yang mutlak perlu dibenahi. Perkembangan lingkungan yang semakin dinamis dan permasalahan yang semakin kompleks menuntut agar kualitas intelektual setiap prajurit TNI AD terutama para tingkat perwiranya harus dipersiapkan dengan baik. Penguasaan bekal ilmu yang diperlukan tidak cukup hanya mahir di bidang keterampilan teknis profesi militer, melainkan perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan sosial dan teknologi. Membahas urgensi pendidikan dan pelatihan serta ilmu pengetahuan dan teknologi secara klasik, tapi perlu disadari sepenuhnya ini adalah prasyarat mutlak untuk dipenuhi.

Ke depan, kita ingin para perwira TNI AD, tidak hanya mahir

bidang teknis kemiliteran, melainkan juga memiliki pengetahuan umum yang memadai, termasuk kemutlakan untuk menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita mengharapkan para perwira pada strata perwira pertama punya kualitas teknis-taktis dan administrasi, dan pada strata perwira menengah mulai menggeluti masalah strategi baik militer maupun pertahanan, dan pada saatnya sebagai perwira tinggi ia menjadi “*developer*” dari “*military and defence policy*”. Adalah tuntutan bagi prajurit TNI untuk senantiasa mengembangkan diri dari aspek intelektualisasi di samping kualitas militansi pengabdian.

10 Mengapa? Karena, setiap prajurit TNI AD di dalam melaksanakan tugasnya, sangat bersinggungan dengan masyarakat yang kini sudah mengalami kemajuan yang bisa jadi tingkat kemajuannya lebih jauh dari tingkat kemajuan yang dialami para prajurit TNI AD khususnya, para perwira pada umumnya, sebaliknya prajurit harus mampu menangkal distorsi terhadap jati dirinya sebagai prajurit.

Tugas-tugas di masa damai di dalam negeri, para prajurit TNI AD akan banyak terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Maka pengetahuan para perwira tentang bencana alam dan penanganannya, seperti cara-cara penyelamatan warga terutama pada masa tanggap darurat atau *emergency respond*, mutlak harus dikuasai dengan baik. Untuk tugas-tugas misi perdamaian ke luar, maka para prajurit TNI AD akan banyak terlibat di dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu berarti, bahwa para perwira TNI AD akan memiliki banyak kesempatan untuk bertugas dalam misi-misi internasional dan pergaulan antar personel militer dari berbagai negara.

Oleh sebab itu, para prajurit TNI dan utamanya para perwira harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan

tugas-tugas misi perdamaian internasionala personel I, baik untuk penanganan konflik, menjaga perdamaian, maupun kemungkinan tugas-tugas misi kemanusiaan. Citra profesionalitas personel TNI AD yang baik di mata internasional, akan membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Maka hal ini secara langsung ataupun tidak langsung, akan memberi pengaruh terhadap rasa segan bangsa lain terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian akan mengurangi adanya ancaman dan gangguan dari bangsa lain terhadap kepentingan nasional kita.

Untuk mewujudkan keinginan seperti itu, maka TNI AD perlu menyusun perencanaan penataan menjadi TNI AD yang kuat, modern dan efektif dalam kerangka MEF, dengan menyusun peta jalan atau *road map* yang mengesampingkan dilaksanakan secara bertahap dan konsisten tanpa mengesampingkan kemungkinan ada penyempurnaan karena adanya perubahan dinamika perkembangan situasi.

TNI AD yang kuat, modern dan efektif di dalam melaksanakan tugas, akan memudahkan bagi TNI AD untuk melaksanakan tugas pokok, sebagai bagian dari tugas sebagai garda nasional atau *national guardian* di dalam menjaga dan mengawal bangsa Indonesia, yang kini dalam proses pembangunan bangsa yang demokratis, beradab dan berupaya mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan wilayah. Dengan dapat menjalankan tugasnya, baik tugas OMP maupun tugas OMSP dengan baik, maka keberadaan TNI AD akan selalu dicintai rakyat, keberadaannya sangat dinantikan dan menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa. Maka ke depan, TNI AD akan memiliki wibawa dan disegani rakyat karena keberadaannya dapat betul-betul memberikan perlindungan dan pengayoman untuk menjaga bangsa ini berkembang dan maju

sesuai kehendak bersama menuju cita-cita bangsa.

YANG PERLU DILAKUKAN TNI AD

Untuk mewujudkan hal-hal ideal tersebut, maka dalam rangka membangun TNI-AD yang kuat, organisasinya modern, efisien dan efektif dalam kerangka pembangunan kekuatan pertahanan negara yang minimal atau *minimum essential force*, dapat dilakukan antara lain:

12

- Perlunya pemantapan konsolidasi menuju revitalisasi kekuatan TNI AD yang kuat dan modern.
- Perlunya memberikan perhatian kepada kompetensi personel, melalui pendidikan dan pelatihan profesi, sehingga memiliki personel yang cerdas, menguasai iptek secara lebih memadai, terbangunnya sikap militan dan disiplin yang tinggi.
- Pemenuhan kebutuhan persenjataan, prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk peningkatan profesionalisme prajurit.
- Perlunya memberikan perhatian kepada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya agar memiliki tingkat kelayakan hidup lebih baik.
- Perlu adanya perubahan cara berpikir yang lebih rasional di dalam mengelola organisasi TNI AD sehingga menjadi organisasi modern.

- Perlu adanya perubahan pola rekrutmen calon personel TNI AD antara lain mencari sumber yang punya potensi kecerdasan tinggi dan dibentuk melalui pembinaan yang berkesinambungan dan konsisten agar memiliki militansi yang tinggi, sehingga di masa depan, TNI AD memiliki personel yang unggul di bidang militer dan memiliki daya saing.
- Prajurit TNI AD harus paham politik pertahanan negara dan punya kemampuan berpikir dan bertindak atas nama misi negara dengan landasan jati diri yang peduli kepada kehidupan tata negara.
- Prajurit TNI AD harus memiliki kualitas integritas dan komitmen kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kapabilitas yang bertumpu kepada empat pilar: Pancasila – UUD 1945 – Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Jangan pernah mengalami distorsi integritas dan kapabilitas dari berbagai arah dan jurusan.
- Doktrin TNI harus dinamis sejalan dengan *Revolution in Military Affairs* tetapi tetap berlandaskan kepada Tentara Rakyat - Tentara Pejuang - Tentara Nasional dan Tentara Profesional.
- *Minimum Essential Force* bagi TNI AD merupakan sarana menyelesaikan tugas perlu sinkron dengan kualitas dan integritas prajurit sebagai penentu penyelesaian tugas.

TNI AD dengan jiwa korsa yang dimiliki sebagai bagian dari prajurit TNI yang berjiwa patriotik, pantang menyerah dan berjuang tanpa pamrih, saya yakini dapat melaksanakan penataan konsolidasi untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan.

Revitalisasi perlu dilakukan untuk pengelolaan organisasi TNI AD agar memiliki kemampuan yang kuat, menjadi organisasi modern, diawaki personel profesional yang memiliki otak cemerlang dan militansi tinggi. Dengan demikian, maka TNI AD dapat mencetak perwira-perwira unggul dan menjadi salah satu sumber pimpinan bangsa yang diharapkan dapat memimpin bangsa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Saya yakini hal itu bisa dilakukan dan berhasil.





“Prasyarat militansi prajurit TNI adalah adanya sikap percaya diri dan yakin atas identitas nasionalisme yang tidak kenal kata surut. Prajurit TNI tidak boleh menyerah dalam menjalankan tugas dan untuk mencapai tujuan harus konsisten dan berani menghadapi perubahan. Secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI, intelektualisasi harus diwujudkan dalam cerdas merebut peluang. Tidak kalah pentingnya, prajurit TNI harus bersikap inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.”

02.

MILITANSI & INTELEKTUALISASI TNI

17

Perjalanan reformasi yang dijalani oleh bangsa kita bermakna perubahan sistem dari semula otoritarian menjadi demokrasi. Semua komponen bangsa tidak terkecuali TNI harus mengikuti perubahan tersebut, dengan tetap merujuk kepada amanat konstitusi dan aturan perundangan, serta nilai-nilai kehidupan nasional yang berdasarkan Pancasila.

Seperti umumnya organisasi militer di dunia ketika menghadapi perubahan sistem politik nasional besar, Tentara Nasional Indonesia juga melakukan penyesuaian. Sepanjang sejarahnya, TNI secara internal sebenarnya telah melakukan berbagai penataan untuk merespons tantangan dan tuntutan misi. Namun perubahan sistem politik menuntut TNI untuk melakukan penyesuaian yang mendasar.

Dalam satu dekade reformasi yang sudah berjalan sekarang ini, TNI merespons reformasi dengan memosisikan diri sebagaimana alat negara di bidang pertahanan negara yang tunduk kepada otoritas sipil yang berdaulat. Paradigma baru yang dipergunakan TNI dalam melakukan reformasi adalah dengan melakukan

perubahan yang rasional dan sistematis. TNI juga melakukan koreksi perbaikan, menghilangkan hal-hal buruk yang merusak citra, dan melakukan terobosan terukur yang produktif.

Reformasi TNI menuntut konsistensi dari seluruh prajurit untuk mau melakukan introspeksi dan antisipasi terhadap tantangan yang harus dihadapi di depan. Untuk membuat para prajurit siap melakukan tugas tersebut, maka tidak ada pilihan lain institusi TNI harus lebih banyak memberikan perhatian bagi pembentukan prajurit yang “berintegritas dan berkualitas” di semua lini dan tingkat manajemen satuan TNI.

18

TIGA PENDEKATAN

Ada tiga pendekatan yang harus dilakukan untuk memantapkan kualitas prajurit TNI. Pertama, adalah meraih peluang pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan oleh institusi. Dengan mengikuti berbagai jenis pendidikan dan pelatihan serta harus menyerap esensi ilmu dari program yang diikuti.

Kedua, menjalani berbagai ragam tugas jabatan dengan kesiapan mental menghadapi dinamika pasang surut penugasan. Prajurit TNI jangan membiasakan untuk “memilih” tugas jabatan, karena setiap pekerjaan mempunyai nilai tersendiri yang satu saat pengalaman yang diperoleh bisa bermanfaat untuk menjalani tugas berikutnya.

Ketiga, prajurit TNI harus terus mengembangkan diri dengan menambah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Tambahan ilmu itu dibutuhkan untuk menopang keunggulan yang sudah dimiliki prajurit TNI.

Jika ketiga pendekatan itu terserap dalam suatu sikap pendekatan *learning by doing and looking*, maka saatnya diperlukan akumulasi ilmu dan pengalaman itu akan mengalir sebagai alat untuk memecahkan setiap masalah. Syaratnya, setiap prajurit TNI jangan mudah untuk terlena dan lengah menjalani setiap momen karier yang diembannya.

LEGALITAS DAN LEGITIMASI

Reformasi membuat institusi TNI terikat pada aturan. Dalam pelaksanaan tugas, TNI tidak bisa bergerak secara otomatis merespons keadaan, tetapi harus berjalan dalam parameter legalitas dan legitimasi yang diberikan.

19

Ada banyak tantangan dan tuntutan reformasi TNI yang kita kenal dalam paradigma baru yaitu aspek doktrin, organisasi, dan kultur. Itulah yang diolahkembangkan oleh TNI dari masa ke masa, dengan tetap mengacu kepada arah reformasi besar yang dilakukan bangsa ini.

Reformasi TNI mengarahkan juga TNI untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia dan melakukan berbagai perubahan terukur yang produktif. *Revolution in Military Affairs* menjadi tantangan bagi TNI untuk tampil prima baik pada skala pemikiran maupun sikap dan tindakan.

Di era masyarakat sipil yang begitu transparan, kelemahan dan kekurangan kualitas prajurit, terutama perwiranya, sangat mudah tampak. Ketika itu terjadi akan langsung memperoleh vonis dari publik. Jika prajurit TNI tidak memiliki keunggulan daya saing dan malas mengembangkan diri, konsekuensinya mereka akan ketinggalan bahkan menjadi tertawaan.

Masa kini dan masa mendatang tidak lagi laku gaya simbolik dan jago kandang yang menghindari tantangan yang heterogen dan kompleks. Itu berlaku baik pada lingkup mikro yang membutuhkan kualitas teknis dan taktis maupun lingkup makro yang memerlukan penguasaan masalah strategis.

20 Mengapa hal ini sampai terjadi? Karena era sebelum reformasi, di masa otoritarian, perundangan memosisikan TNI pada status identik dengan pemerintah. TNI terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional. Ketika itu jika ada kelemahan, maka itu tidak akan tampak, karena terselubung dalam sistem yang otoriter dan homogen. Namun di era keterbukaan seperti sekarang, TNI tidak mungkin lagi ikut terlibat dalam perpolitikan praktis seperti di masa lalu.

Meski demikian era reformasi sesungguhnya tetap memberikan ruang gerak yang cukup kepada TNI untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat madani. Hanya saja sumbangan tenaga dan pikiran tetap diletakkan dalam kerangka TNI sebagai alat pertahanan negara di bawah otoritas sipil yang berdaulat.

Era reformasi tidak boleh juga membuat TNI mengabaikan fungsi teritorial. Sebab fungsi teritorial bukan hanya porsi TNI, melainkan juga bagian dari fungsi pemerintahan sipil. Kalau Kementerian Pekerjaan Umum membangun dan memelihara infrastruktur pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan negara, maka Kementerian PU pun sedang menjalankan fungsi teritorial.

Pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI tidak ada bedanya dengan pembinaan teritorial yang diselenggarakan aparat

pemerintah dalam menjaga kelangsungan pembangunan. Yang paling penting dalam era reformasi, fungsi teritorial TNI harus memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat sipil dan demokratisasi, tanpa harus mengubah jati diri TNI.

MILITANSI DAN INTELEKTUALISASI

Adalah keliru ketika TNI tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip jati dirinya ditafsirkan sebagai status quo. Prajurit TNI tidak boleh mengubah sikap militansi kepada republik. Mereka harus melengkapi sikap militansi itu dengan intelektualisasi diri.

21

Prasyarat militansi prajurit TNI adalah adanya sikap percaya diri dan yakin atas identitas nasionalisme yang tidak kenal kata surut. Prajurit TNI tidak boleh menyerah dalam menjalankan tugas dan untuk mencapai tujuan harus konsisten dan berani menghadapi perubahan.

Secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI, intelektualisasi harus diwujudkan dalam cerdas merebut peluang. Tidak kalah pentingnya, prajurit TNI harus bersikap inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Mari kita tumbuhkan militansi dan intelektualisasi sebagai suatu keniscayaan yang berakar dari jati diri TNI. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit harus mampu menambah bobot reformasi TNI. Bersiaplah seluruh prajurit TNI untuk menghadapi tugas, sebelum tugas bersiap menghadapi kita.







“Politik pertahanan sebagai bagian dari politik negara bertujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa diselenggarakan oleh pemerintah dengan suatu sistem pertahanan negara yang memosisikan TNI sebagai alat negara, berperan sebagai alat pertahanan negara. TNI dibangun dan berkembang profesional dituntut terus eksis dan konsisten mengawal kepentingan politik negara dengan tetap mengacu kepada nilai dan prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta menghormati dan mematuhi hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.”



03.

EKSISTENSI DAN KONSISTENSI TNI DALAM POLITIK PERTAHANAN

Pada HUT ke-53 ABRI, Kassospol ABRI Letjen TNI SB Yudhoyono dalam wawancara Republika 5 Oktober 1998 menarik garis tebal bahwa semangat reformasi adalah *continuities and change* yang maknanya mempertahankan apa yang baik dan tepat, sebaliknya memperbaharui apa yang ternyata tidak tepat. Saat itu adalah garis awal ABRI yang selanjutnya menjadi TNI yang terdiri dari matra Darat, Laut dan Udara melakukan perubahan komitmen baik kultural, struktural dan doktrin.

25

Perjalanan pengabdian TNI dijalani pasang surut seiring dengan pertumbuhan bangsa dan negara yang tidak lepas dari dinamika iklim politik membayangi perjalanan panjang bangsa kita. Para sesepuh dan pendahulu TNI telah bekerja keras dan tidak mengenal menyerah meletakkan nilai-nilai militansi dan profesi sebagai Tentara Nasional Indonesia yang berjuang sebagai alat pertahanan negara yang mampu dan terpercaya menjaga dan mengawal kedaulatan negara dalam arti yang luas.

Saat itu Republik Indonesia sebagai negara yang lahir dari pengorbanan tetesan darah dan keringat tanpa suatu kemampuan dan kekuatan bersenjata yang terorganisasi secara profesional. Selain niat dan semangat merdeka atau mati, yang

menjadi kekuatan dasar para pemuda pejuang sebagai cikal bakal pembentukan kekuatan bersenjata yang sederhana menjadi suatu kekuatan bersenjata nasional yang saat ini memiliki *leadership* dan *management* yang kuat dan kokoh serta teruji oleh sejarah panjang “dipuji dan dicela” tapi tetap utuh bahkan mampu memperkokoh integritas nasional. Itulah Tentara Nasional Indonesia.

26 Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 yang tidak akan berubah dan tidak terjamah oleh amandemen yang memberi tugas bagi pemerintah negara Indonesia untuk melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia serta berperan dalam ketertiban dunia. Inilah yang menjadi *resection* dan *intersection* bagi TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjalankan tugasnya selama ini bahkan ke depan.

Politik pertahanan sebagai bagian dari politik negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa diselenggarakan oleh pemerintah dengan suatu sistem pertahanan negara yang memosisikan TNI sebagai alat negara, berperan sebagai alat pertahanan negara.

TNI dibangun dan berkembang profesional dituntut terus eksis dan konsisten mengawal kepentingan politik negara dengan tetap mengacu kepada nilai dan prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta menghormati dan mematuhi hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.

Bila pada saat mengawali reformasi TNI dituntut melakukan “perubahan komitmen” sepanjang perjalanan menuju posisi, kini TNI “membuktikan perubahan komitmen” dengan berbagai fenomena dan indikasi yang terjadi antara lain tidak tampak lagi

pada peran sospol yang diperankan TNI baik di pemerintahan dan legislatif yang dikenal istilah “kekaryaan”. Kini status TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya tidak lagi secara otomatis melainkan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kalangan masyarakat telah menjustifikasi bahwa TNI tidak lagi bertindak seperti masa orde baru pada era demokrasi ini. TNI pasti tunduk kepada undang-undang dan ketentuan, kecuali “anak nakal” saja yang ceroboh melanggar dan pasti menerima sanksi. Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan koridor bagi TNI untuk mendarmabaktikan profesionalismenya kepada bangsa dan negara. Ketentuan perundangan telah melarang institusi dan individu TNI untuk berbisnis dengan konsekuensi pemerintah membiayai TNI dan kesejahteraan prajuritnya.

27

Walaupun bukti perubahan komitmen itu telah terjadi, tetapi tuduhan dan tudingan atas fenomena masih terjadi, hendaknya TNI lebih menilai sebagai cambuk masih perlunya meningkatkan kemampuan dengan kesabaran terus melakukan koreksi dan waspada bagi segenap anggota TNI untuk “berperilaku matang”. TNI memang dalam mengawali reformasi tidak terhindarkan melakukan “*trial and error*”, untuk menemukan bentuk yang pas, akan tetapi tentunya dengan kematangan *leadership* dan intelektualisasi manajemen *trial and error* harus berubah menjadi “*fit and proper*” di semua lini pembinaan dan pembangunan kekuatan TNI.

Di sisi yang lain eksistensi dan konsistensi juga harus memberikan bukti bahwa jati diri TNI secara prinsip dan filosofi tidak berubah sejak awal kelahirannya. Dengan landasan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, TNI harus yakin dan pasti bahwa jati diri TNI dimana kepentingan bangsa dan negara di atas semuanya.

TNI sebagai alat negara harus mampu dan sanggup memenuhi kepentingan negara dalam hal menyelesaikan tantangan tugas dan ancaman bagi negara, sedangkan pemerintah punya kewajiban untuk mempersiapkan TNI untuk siap melakukan operasi militer terbatas. Ini tugas negara untuk memiliki angkatan perang yang mobil dan andal.





“Prajurit TNI bukanlah prajurit yang mudah dibelokkan haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan, tetapi karena keinsyafan jiwanya atas panggilan Ibu Pertiwi dengan sedia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara”.

{ Perintah Harian **Panglima Besar**, 5 Oktober 1949 }

04.

PENGHORMATAN & KEHORMATAN TNI

Sebagai prajurit dan pejuang, Perintah Harian 5 Oktober 1949 itu sangat bermakna bagi TNI sebagai rambu dan navigasi dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Sejak seorang prajurit mengawali kehidupan keprajuritan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, di situ ia berada dalam suatu ikatan moral dan kewajiban profesional yang terus mengalir dalam kualitas kepemimpinan yang ditempa oleh berbagai ujian dan cobaan. Prajurit TNI dituntut untuk membuktikan apakah ia adalah seorang prajurit yang mampu dan sanggup memikul beban atas derajat dan martabat yang diletakkan ke pundaknya sebagai suatu tanggung jawab pengabdian yang sarat bobot kualitas dan integritas.

Seorang prajurit pasti ingat jelas saat memulai basis militer sebagai seorang calon prajurit di mana ia tidak punya hak menerima penghormatan, karena ia belum memiliki kepangkatan apa pun. Sebaliknya ia wajib memberikan penghormatan kepada atasan yang memiliki kepangkatan. Proses ini dijalani oleh prajurit sejalan dengan masa pengabdian, yang ibarat naik tangga saatnya penghormatan pun diterima ketika ia sampai pada puncak kariernya sebagai prajurit. Itulah “penghormatan” yang

diawali saat mulai karier dan tamat saat purna tugas.

Tantangan, tuntutan, dan godaan justru hadir pada saat seorang prajurit sedang menerima penghormatan. Pada masa itu bisa terjadi seorang prajurit “lupa” dan “celaka” atas sikap dan perilaku dirinya sendiri, seperti yang diingatkan oleh Pak Dirman.

32 Pengalaman memberikan pelajaran bahwa “lupa” dan “celaka” dapat terjadi pada siapa saja yang diberi atribut kewenangan oleh negara. Hal itu terutama terjadi ketika tidak dilakukan *check and balance* atas setiap langkah yang diambil, apakah sudah berada pada jalan, rambu, dan navigasi yang tepat secara aturan dan peraturan serta moral.

Di sinilah suatu pertempuran yang harus dimenangkan oleh prajurit agar terhindar dari “kerusakan moral” yang berakibat kepada hilangnya rasa hormat dari bawahan, kolega, atasan, dan bahkan masyarakat atas diri prajurit yang terjebak dalam posisi nadir moral. Di sini pula ukuran “kehormatan” menjadi taruhan yang tidak terhapus sampai menjadi jasad.

ZAMAN YANG SULIT

Harus diakui kita hidup di zaman yang sulit, di mana godaan begitu tinggi. Konsumerisme dan konsumtivisme menjadi gaya hidup yang tidak bisa dihindarkan di zaman modern seperti sekarang. Semua orang seakan berlomba ke arah sana, karena menganggap hal itu sarat dengan kenikmatan.

Sebagai bagian dari masyarakat, prajurit TNI tentunya tidak bisa

lepas dari godaan itu. Sedikit banyak kehidupan masyarakat luas ikut memengaruhi juga kehidupan prajurit dan juga keluarganya.

Pengalaman bangsa-bangsa lain, konsumerisme dan konsumtivisme itu diraih melalui proses yang panjang. Mereka telah melewati proses yang menghasilkan sikap disiplin, etos kerja, dan menghormati waktu. Dari sanalah bangsa-bangsa itu kemudian menghasilkan produk dan bahkan produk itu dikembangkan lagi menjadi produk-produk turunan yang semakin beragam.

Hasil dari kerja keras yang dilakukan itulah yang membawa bangsa-bangsa itu ingin menikmatinya. Konsumerisme dan konsumtivisme merupakan ekspresi dari keinginan untuk menikmati hasil kerja keras yang panjang.

33

Kita pun harus melewati proses yang panjang dan melelahkan itu, agar kemudian bisa menghargai kerja keras yang dilakukan. Konsumerisme dan konsumtivisme jangan hanya sekadar dijadikan gaya hidup, agar tidak menjadi berlebihan dan bahkan melewati batas-batas kepantasan.

Bagaimanapun gaya hidup modern harus bertumpu kepada jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Kita tidak ingin menjadi bagian masyarakat global, tanpa pernah tahu akar budaya dari bangsa ini.

Perintah Harian Panglima Besar Sudirman pada tahun 1949 sudah menangkap pertanda zaman itu. Prajurit TNI diingatkan untuk tidak mudah dibelokkan oleh tipu dan nafsu kebendaan. Dengan berpegang kepada panggilan untuk menjaga keluhuran bangsa dan negara, maka kehormatan prajurit TNI akan bisa dijaga.

GODAAN KEKUASAAN

Satu hal lagi yang senantiasa harus dijaga prajurit TNI adalah godaan kekuasaan. Setiap kali tanggung jawab jabatan datang haruslah diingat bahwa itu bukanlah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi justru kesempatan untuk memberi kepada negeri.

34 Godaan kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Semua orang pada suatu masa pasti dihadapkan kepada godaan itu. Pada abad ke-19, Lord Acton bahkan sudah mengingatkan kita semua bahwa: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*.

Kesadaran diri pribadi menjadi kunci bagi setiap prajurit TNI untuk tidak “lupa” dan “celaka”. Pendidikan prajurit TNI sudah mengingatkan seluruh anggota TNI untuk tidak goyah dalam menjalankan prinsip kehormatan.

Oleh karena itu marilah para prajurit dan pejuang TNI senantiasa menabung kehormatan saat terima penghormatan dengan mawas diri dan waspada dengan harapan kehormatan menjadi bonus abadi di saat penghormatan berakhir pada masanya.





*“Dalam era masyarakat madani masa kini dan mendatang,
kerjasama sipil dan militer menempati ruang yang luas.
Indonesia sudah membangun peta jalan kerjasama mutualistis
dan merevitalisasi peran militer. Kita tak boleh terkendala faktor
psikologis dan traumatis, tetapi lebih bijak memandang perlunya
integrasi nasional menghadapi tantangan masa depan.”*



05.

KERJA SAMA SIPIL DAN MILITER

Kini dan mendatang mengindikasikan dunia tidak lepas dari ketidakpastian politik dan ekonomi. Ada kepentingan politik global dan pergeseran kekuatan ekonomi yang dipastikan besar efek negatifnya bagi negara lain. Pada sisi strategis lain, terjadi pergeseran kekuatan militer dari persenjataan pemusnah massal beralih ke intensitas diseminasi teknologi canggih, baik yang berawak (*manned*) maupun tidak (*unmanned*), yang dioperasikan dalam perang asimetris secara inkonvensional. Juga hadir mandala perang baru dalam teknologi informasi, yaitu *cyber war*. Fenomena strategis lainnya, korupsi dan *disloyal people* terhadap integrasi nasional terutama yang berciri plural.

37

Jika mendalami observasi global, ada faktor yang dominan berpengaruh, yaitu geopolitik, *power*, kepentingan ditambah kebudayaan yang memengaruhi terjadinya krisis suatu negara. Bagi Indonesia, yang dibutuhkan adalah respons bersama: kerjasama bahu-membahu sipil dan militer melindungi negara.

Saat ini interaksi sipil dan militer sudah mendunia menyelesaikan semua permasalahan kelangsungan hidup kemanusiaan dan kenegaraan. Bahkan, itu menjadi strategi solusi di era demokrasi. Lihat saja bagaimana Perancis menangani serangan teror saat

1.500 anggota pasukan militer langsung diterjunkan untuk ikut menangani persoalan.

Hal yang sama dilakukan AS saat menghadapi serangan teror 11 September 2001 dan badai Katrina di New Orleans tahun 2005. Krisis yang terjadi tak hanya ditangani kekuatan sipil, tetapi juga melibatkan militer. Federal Emergency Management Agency yang dimiliki AS merupakan lembaga negara yang bekerja lintas sektoral dan bertugas menangani semua situasi krisis yang terjadi di negeri itu.

38

Pendekatan mutualistis, interdependensi, serta konsultasi individu dan institusi telah menjadi suatu kekuatan preventif yang dibangun dalam kerangka kerjasama sipil dan militer. Interaksi sipil dan militer mengenal tiga elemen: pertama, bertukar informasi kapasitas. Kedua, membangun tim kerja dan pelatihan bersama lintas sektor sipil dan militer. Ketiga, menyusun program bersama.

Secara universal dikenal dua tipe misi militer dan sipil bekerjasama. Dalam misi kemanusiaan disebut *humanitarian action*, sedangkan misi politik negara disebut *military action*. Pengerahan kekuatan militer jadi kewenangan keputusan politik otoritas sipil yang berdaulat, yang lingkup penugasan militer pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis.

Kapabilitas sipil sangat dominan dalam interaksi sipil dan militer. Area profesi sipil berkembang pesat tampak dari berbagai aspek, seperti penguasaan teknologi *hardware* dan *software*, medis, legal, manajemen lingkungan, ekonomi bisnis, dan teknologi informasi. Peran militer bersifat *ultima ratio*, bukan penentu akhir, melainkan menjadi elemen utama negara untuk menyelamatkan

dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada kondisi krisis. Oleh karena itu, penugasan perlu kejelasan batas waktu dan skala penugasan. Militer profesional menjalankan misi berpegang pada prinsip netral dan imparial.

SPEKTRUM KERJASAMA

Perlu kemauan politik untuk merumuskan konsep strategi terintegrasi operasionalisasi kerjasama sipil dan militer dalam manajemen krisis. Para teknokrat profesional sipil bekerja sama dengan personel militer dalam suatu misi gabungan merespons krisis. Faktor dominan kontrol parlemen dan arahan strategis dalam regulasi diperlukan untuk melegitimasi kerjasama ini.

39

Dalam era masyarakat madani, masa kini dan mendatang, kerjasama sipil dan militer menempati ruang yang luas. Indonesia sudah membangun peta jalan kerjasama mutualistis dan merevitalisasi peran militer. Tentunya kita tak bisa berhenti, bahkan diharapkan terus dilakukan optimalisasi dan sistematika oleh negara. Kita tak boleh terkendala faktor psikologis dan traumatis, tetapi lebih bijak memandang perlunya integrasi nasional menghadapi tantangan masa depan.

Esensi manajemen krisis adalah kepemimpinan dan manajemen yang dikembangkan secara terintegrasi dan terkendali. Faktor penting dalam manajemen krisis adalah kemampuan mengambil keputusan cepat guna mengatasi krisis dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan seluruh kekuatan pertama yang ada. Semua unit pendukung kedaruratan harus cepat dimobilisasi ke daerah krisis. Informasi merupakan fakta yang dominan dalam manajemen krisis untuk mengantisipasi, merencanakan, dan mengendalikan krisis. Informasi mengenai

infrastruktur (*critical infrastructure*) yang mempunyai nilai vital dan strategis harus menjadi bagian penting dalam manajemen mengantisipasi serangan teroris. Beberapa serangan teror terjadi disebabkan kegagalan melakukan identifikasi dan pengamanan wilayah sebagai pencegahan.

40 Dalam bidang teknologi informasi, kita sudah memiliki berbagai teknologi canggih. Hanya saja untuk efektivitasnya, kita perlu dukungan *traditional resources* yang di Indonesia dikenal dengan pembinaan teritorial. Merekalah sumber informasi pertama yang diperlukan untuk melakukan respons cepat. Pengalaman menunjukkan manajemen krisis juga butuh dukungan manajemen operasi media. Media perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi tepat waktu. Fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit serta keperluan mendasar masyarakat akan jadi perhatian media. Untuk itu, penanganannya harus diutamakan.

Satu yang tak boleh dilupakan adalah ancaman siber. Ancaman siber tak mematikan, tetapi melumpuhkan sistem negara. Mengingat perang siber ini tak kenal batas dan waktu, organisasi internasional seperti NATO merasa perlu mengambil inisiatif untuk merancang pertahanan internasional siber. Di Indonesia dilakukan interaksi dengan para *hacker* untuk merespons suatu pusat pertahanan perang siber. Ada keperluan untuk merancang strategi pertahanan siber secara terintegrasi guna mengamankan kepentingan nasional.





“Memahami kepentingan politik negara sama sekali tidak berarti TNI menyentuh politik praktis, tetapi sebaliknya TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan mengerti dengan jelas makna tugas menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini hendaknya dipahami sebagai TNI mengemban amanat mengamankan kepentingan politik negara.”

06.

TNI MEMAHAMI KEPENTINGAN POLITIK NEGARA

43

Setiap menyebut TNI maka tersirat di benak kita suatu kekuatan tentara, warga negara Indonesia yang dipersiapkan untuk tugas pertahanan negara yang diatur oleh undang-undang, di sisi lain saat menyebut politik negara terkandung makna prinsip supremasi sipil dalam suatu tatanan negara demokrasi yang diatur oleh ketentuan hukum nasional berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Tentara Nasional Indonesia berbeda dengan seprofesinya dari negara lain merupakan tentara yang lahir dari rakyat Indonesia yang aktif angkat senjata dalam kancah perjuangan merebut dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI menjalani masa panjang menata jati dirinya untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia yang menjadi tentara kebangsaan dan memiliki tingkat profesional yang terampil dengan peralatan yang memadai untuk tugas menjaga kedaulatan negara – keutuhan teritorial dan mengamankan keselamatan bangsa.

Masih segar ingatan kita semua di masa lalu dikenal jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen-

jata RI dimana seorang perwira tinggi militer menjabat rangkap sebagai pejabat negara dan sebagai pejabat militer yaitu Menteri merangkap Panglima. Kondisi itu beralasan karena aturan dan perundangan serta iklim kebijakan politik negara yang berlaku saat itu dikenal di masa era otoritarian di mana determinasi pemerintah menjadi titik sentral.

44 Tetapi di masa kini yang dikenal dengan era demokrasi ditandai reformasi nasional pasca 1998 dengan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan sampai kepenataan kelembagaan sesuai tuntutan tugas yang pula berimplikasi kepada Tentara Nasional Indonesia yang membangun dan mengembangkan profesionalisme sesuai kepentingan politik negara yang taat kepada prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta ketentuan hukum nasional dan ketentuan internasional diratifikasi.

Supremasi sipil, suatu kekuasaan politik yang melekat pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat melalui pemilihan umum. Relevansinya dengan TNI dipahami sebagai TNI taat kepada kebijakan dan keputusan politik negara oleh presiden melalui mekanisme ketatanegaraan yaitu kebijakan politik pemerintah bersama DPR dalam suatu hubungan kerja yang sinergi antara pemerintah dan DPR.

Kita patut memberi apresiasi bahwasanya TNI telah memahami status dan kedudukannya berdasarkan undang-undang TNI berkedudukan di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer dan presiden menugaskan Menteri Pertahanan untuk mengelola kebutuhan TNI berkaitan aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional

serta pembinaan industri pertahanan. Sedangkan Panglima TNI dibantu kepala staf angkatan diberi tugas pembinaan kekuatan TNI berkaitan pendidikan, pelatihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer. Selain itu Panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden dalam hal penggunaan kekuatan dalam rangka tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Ada kewajiban moral para prajurit TNI yang bermilitansi tinggi untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pertahanan negara. Suatu keniscayaan bagi TNI untuk memahami nilai yang mendasar dalam Pancasila dan UUD 1945, pesan kejuangan dan profesi dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI maupun nilai bangsa pejuang yang berjiwa gotong royong. Penting bagi TNI, bahwa memahami kepentingan politik negara sama sekali tidak berarti TNI menyentuh politik praktis, tetapi sebaliknya TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan mengerti dengan jelas makna tugas menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan tumpah darah hendaknya dipahami sebagai TNI mengemban amanat mengamankan kepentingan politik negara.

45

Di sisi lain tuntutan sebagai prajurit profesional untuk mengembangkan intelektualisasi dengan menggali nilai-nilai baru bagi pengembangan kemampuan militer khususnya dan juga sesuai kebutuhan bangsa Indonesia terkini dan mendatang. Pada dimensi lain pemerintah diberi amanat oleh undang-undang untuk membangun kekuatan TNI dan membiayai TNI baik kebutuhan dasar dan rawatan prajurit serta penggunaan kekuatan TNI. Dengan demikian TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dapat fokus menjalankan tugas negara.

Bangsa dan negara tercinta ini akan terus berkembang dengan pesat sejalan dengan keluarga besarnya memiliki tekad bersama untuk membangun Indonesia kuat yang bermartabat, dan rasional berdemokrasi, tumbuh pesat ekonominya yang adil dengan punya *strong defence capability* dalam kerangka soliditas persatuan bangsa Indonesia.





“Sosok Indonesia yang kuat, suka tidak suka, dicerminkan dari alutsista yang dimiliki oleh TNI. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 buah, dibutuhkan postur TNI yang memang mampu menjaga segenap wilayah tumpah darah.”

07.

MEMBANGUN KEBANGGAAN KEPADA TNI

Ada yang istimewa pada peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia 2014 di Dermaga Ujung TNI Angkatan Laut, Surabaya. Pergelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada parade HUT TNI bukan hanya membangkitkan kebanggaan kepada sosok TNI, tetapi memberikan pesan terhadap kemandirian yang berhasil dibangun dalam 10 tahun terakhir ini.

49

Sepuluh tahun pembangunan alutsista TNI memang ditujukan untuk menutupi kekurangan dan sekaligus memodernisasi alutsista TNI. Hasil pengadaan yang dilakukan untuk matra darat yang antara lain kini diperkuat oleh *main battle tank Leopard*, panzer Anoa, sistem persenjataan rudal multilaras, dan helikopter serbu Apache. Matra laut kini diperkuat oleh kapal selam, kapal fregat, kapal patroli cepat, kapal rudal cepat, dan tank amfibi. Sementara matra udara kini memiliki hampir dua skuadron F-16, satu skuadron Sukhoi, helikopter angkut hingga pesawat angkut seperti CN-295 dan Hercules C-130.

Pembangunan kekuatan TNI bukanlah dimaksudkan sekadar untuk gagah-gagahan. Pembangunan jangka panjang Indonesia telah menetapkan sasaran untuk mencapai Indonesia yang mandiri, kuat, adil, dan makmur. Seluruh komponen bangsa

bersepakat untuk membangun Indonesia yang maju secara ekonomi, berkualitas manusianya, memiliki kepribadian yang kuat, sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Indonesia yang kuat harus ditopang oleh TNI yang disegani. Dengan itulah maka Indonesia akan bisa menjaga wilayah kedaulatannya dan kemudian melaksanakan program-program pembangunan yang sudah direncanakan.

50 Dalam bukunya yang berjudul *Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengingatkan perlunya kita menggunakan cara pandang yang holistik dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Menurut Daoed Joesoef, pembangunan nasional tidak bisa hanya sekadar bertumpu kepada kekuatan ekonomi semata, tetapi harus merupakan agregat dari optimalisasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, manusia Indonesia, sistem nasional, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer. Lima faktor itu bahkan harus dimultiplikasi dengan tiga faktor lainnya yaitu tekad, kecerdasan, dan strategi nasional agar pembangunan bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan itu jelaslah bahwa pembangunan kekuatan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dengan memiliki kekuatan militer yang disegani, maka stabilitas nasional bisa lebih terjamin dan dengan itulah peningkatan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan.

Sosok Indonesia yang kuat suka tidak suka dicerminkan dari alutsista yang dimiliki oleh TNI. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 buah, dibutuhkan postur TNI yang memang mampu menjaga segenap

wilayah tumpah darah.

Selama Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa ini selalu berupaya membangun TNI yang kokoh. Namun kita merasakan setelah krisis keuangan tahun 1998, kemampuan keuangan negara untuk membangun kekuatan TNI yang disegani menurun tajam.

Puncak dari ketidakberdayaan akibat minimnya alutsista yang kita miliki dirasakan ketika terjadi bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004. Kita terpaksa meminta bantuan negara-negara sahabat untuk menjalankan operasi kemanusiaan.

51

Pengalaman pahit itu membangkitkan kesadaran kita untuk merevitalisasi alutsista yang dimiliki. Dengan program pengadaan yang dilakukan secara bertahap dan konsisten, maka dalam 10 tahun kita mampu bangkit membangun kembali kekuatan TNI.

Kita harus mengakui bahwa kekuatan TNI yang dimiliki sekarang ini belumlah pada tingkatan yang ideal. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan pembangunan TNI pada tingkatan menuju posisi kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*).

Dengan kekuatan pokok minimum, postur kekuatan yang ingin dibangun memang kecil, namun memiliki mobilitas yang tinggi dan daya pukul yang dahsyat. Dalam rencana strategis yang disusun Kementerian Pertahanan, kekuatan pokok minimum itu ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024 dan dengan itulah kemudian kita akan membangun kekuatan TNI yang ideal dalam waktu sepuluh tahun ke depan.

Semua perjalanan untuk mencapai tujuan itu membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin nasional. Tidaklah mungkin kita akan mampu membangun TNI yang ideal apabila tidak ditopang oleh kemauan politik yang kuat. Lebih dari itu sangat perlu kehadiran sosok penerobos yang mampu melakukan akselerasi untuk mencapai target kemauan politik itu.

52 Keberhasilan pembangunan alutsista TNI dalam 10 tahun terakhir ini disandarkan kepada kemauan politik pemerintah yang kuat. Pemerintah mau menyediakan anggaran bagi pemenuhan alutsista yang masih kurang, sekaligus memodernisasi TNI agar bisa menjalankan tugas militer untuk perang maupun bukan perang.

Itu pun anggaran yang disediakan sangatlah minimum. Sekarang ini besar anggaran yang disediakan baru sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto, padahal idealnya kita membutuhkan anggaran antara 1 persen hingga 2 persen dari PDB.

Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, pengadaan alutsista yang dilakukan sekarang ini tidak sepenuhnya mengandalkan kepada produk asing. Untuk alutsista yang sudah mampu dibuat di dalam negeri, presiden mewajibkan pengadaannya dilakukan di dalam negeri.

Oleh karena itu terutama dalam lima tahun terakhir, industri pertahanan dalam negeri mulai bangkit lagi. Bukan hanya Badan Usaha Milik Negara yang kembali bergerak, tetapi juga badan usaha swasta.

Itu terjadi untuk industri bagi ketiga matra. PT Pindad semakin maju untuk menghasilkan pistol, senjata laras panjang, dan

kendaraan taktis seperti Panser. PT. PAL mampu menghasilkan LPD (*Landing Platform Dock*) dan kapal cepat rudal. Sementara PT. Dirgantara Indonesia kembali memproduksi helicopter angkut dan pesawat angkut. Bahkan PT. PAL sedang bersiap membangun PKR (Perusak Kawal Rudal) dan kapal selam, demikian halnya PT. Pindad yang sedang bersiap membangun tank sedang.

Badan usaha swasta pun telah mampu untuk memproduksi kapal bagi kebutuhan Angkatan Laut. *Landing ship tank* yang diperuntukkan mengangkut Tank Leopard diproduksi oleh galangan kapal di Lampung. Tidak hanya untuk peralatan berat, badan usaha swasta mampu memproduksi kebutuhan militer seperti pakaian, sepatu, helm, dan juga parasut terjun.

53

Dengan industri pertahanan yang semakin andal, kita kini berani untuk mengembangkan pasar ke luar negeri. Apalagi industri pertahanan dalam negeri mampu membangun kerjasama dengan industri-industri negara lain. PT. Pindad misalnya menjalani kerjasama dengan produsen Leopard dari Jerman, Rheinmettal Defence. PT Dahana mengikat kerjasama dengan industri propelan Perancis, Roxel. PT. DI menjadi kepanjangan produksi dari helikopter Bell dan *Airbus Military*.

Kementerian Pertahanan membantu penetrasi industri pertahanan dalam negeri untuk masuk ke pasar luar dengan melakukan promosi. Hasil dari promosi menghasilkan observasi dan negosiasi. Setelah tercapai kesepakatan, industri pertahanan dalam negeri bisa segera melakukan produksi.

Setidaknya enam negara ASEAN berminat terhadap produk industri pertahanan dalam negeri. Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste kini menjadi

pengguna produk-produk industri pertahanan Indonesia.

Ini tentunya merupakan modal untuk semakin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Kita tidak perlu ragu akan kemampuan putra-putra Indonesia. Sepanjang kita mau memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang, maka kita tidak akan kalah dari bangsa-bangsa lain di dunia.

54 Kita sudah melihat dari pergelaran kekuatan yang dilakukan pada peringatan HUT TNI 2014. Sebagian alutsista yang ditampilkan merupakan karya bangsa sendiri. Itulah yang pantas membuat kita semakin bangga kepada bangsa ini. Membangun kekuatan militer adalah bagian dari membangun negara yang kuat.





“Sebagai alat pertahanan negara, TNI perlu melakukan rekonstruksi pola lawan insurjensi, tidak hanya menerapkan taktik dan teknik militer murni, tetapi memerlukan revitalisasi yang terintegrasi antara kekuatan militer dan nonmiliter. Saatnya negara memiliki kontijensi nasional menghadapi insurjensi nonmiliter yang tidak dapat ditanggulangi dengan kekuatan militer murni. Kita harus mewaspadaai jebakan insurjensi yang menggunakan pancingan pada area taktis, tetapi berakibat negatif pada area politis.”

08.

MENATAP TANTANGAN 70 TAHUN TNI

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia membangun angkatan perang sambil bertempur dan berperang merebut kemerdekaan. Itulah yang menjadi ciri Tentara Nasional Indonesia.

57

Sejak Generasi 45, TNI menjalankan darma bakti dan pengabdian untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga negara kebangsaan yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Memang sejarah perjalanan TNI tidak sempurna. TNI pernah memiliki kekurangan dari sisi kepemimpinan dan manajemen akibat kepentingan pemerintah pada masa itu. Tetapi komitmen dan tanggung jawab TNI terhadap negara tidak pernah surut karena nilai dan semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjiwai dan terpatri dalam diri setiap prajurit TNI.

Fakta dan konsekuensi sejarah menempatkan TNI sebagai bagian kekuasaan yang nyaris paripurna di era pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Sebaliknya pasca-orde baru TNI mengalami degradasi legitimasi dan kepercayaan rakyat. Pada awal reformasi, TNI pernah berada pada posisi terendah akibat kekecewaan rakyat. Padahal rakyatlah yang sebenarnya menjadi pemilik TNI.

Menyadari kelengahan dan pengalaman pahit tersebut TNI bertekad bangkit dan mengubah sikap dengan menjalani reformasi internal. TNI berkomitmen untuk secara proporsional dan profesional memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.

Kini legalitas dan legitimasi TNI bertumpu kepada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur misi yang harus dilaksanakan TNI. Tugas yang harus dilaksanakan TNI ditetapkan berdasarkan proses politik antara pemerintah dan parlemen, tidak sekadar adanya perintah dari atasan.

58

Keberadaan TNI dalam perspektif sistem politik nasional merupakan bagian yang sejajar dengan komponen bangsa lainnya, di mana TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan dalam perspektif militer profesional melekat fungsi militer untuk membangun dan mengembangkan manajemen TNI yang kredibel dan kapabel

Filosofi dan prinsip Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang diemban oleh TNI hendaknya dipahami dinamis, tidak hanya pada negara dalam keadaan perang, tetapi juga efektif di masa damai. TNI memiliki juga kewajiban mendukung pembangunan dengan aplikasi manajemen pembinaan teritorial.

Tokoh militer Oerip Soemohardjo mengatakan, "Tentara Indonesia adalah Rakyat Indonesia." Artinya Indonesia memiliki 250 juta tentara dengan TNI sebagai kekuatan inti.

INSURJENSI DAN TERORISME

Tantangan yang dihadapi TNI ke depan adalah mengantisipasi pola rongrongan insurjensi terhadap negara. Tidak ada jaminan

bahwa negara kita bebas dari rongrongan insurjensi. Bahkan tidak ada jaminan negara mampu menghapuskan insurjensi sampai orang terakhir. Apalagi tipologi perang ke depan yang cenderung asimetris, di mana insurjensi sebagai fondasi dan teror sebagai modus operandi.

Kita perlu mencermati perubahan “strategi adaptasi” sebagai pola insurjensi baru yang memanfaatkan fenomena gesekan politik dan turbulensi ekonomi, sehingga bisa mengakibatkan efek negatif bagi stabilitas multidimensional. Apalagi bagi negara kita yang sedang bekerja keras membangun.

59

Sebagai alat pertahanan negara, TNI perlu melakukan rekonstruksi pola lawan insurjensi tidak hanya menerapkan taktik dan teknik militer murni, tetapi memerlukan revitalisasi yang terintegrasi antara kekuatan militer dan nonmiliter. Saatnya negara memiliki kontijensi nasional menghadapi insurjensi nonmiliter yang tidak dapat ditanggulangi dengan kekuatan militer murni. Kita harus mewaspadaikan jebakan insurjensi yang menggunakan pancingan pada area taktis, tetapi berakibat negatif pada area politis.

Pada sisi lain realita menunjukkan, di era demokrasi yang penuh keterbukaan ini ada modus operandi terorisme yang eksis dan eskalatif. Bukan tidak mungkin gerakan itu menyentuh sendi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kita akui bersama, terorisme sebagai modus tindakan kekerasan identik dengan kriminal yang wajib diperangi, tentunya dengan tatanan yang jelas dan tegas pada parameter eskalasi mana yang menjadi tugas TNI dan mana yang menjadi tugas Polri.

Para pendahulu kita sangat cermat dan piawai untuk tidak

menyebut asal usul suatu gerakan insurjensi karena sensitif terhadap isu komunal di negara kita yang plural ini. Tidak bisa disangkal wilayah nasional bergeser dari terminal transit menjadi basis wilayah terorisme internasional. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menaruh harapan agar TNI mampu merevitalisasi manajemen pembinaan teritorial TNI sebagai bagian dari manajemen pembinaan teritorial pemerintah. Tentunya kita memerlukan prajurit yang mau bekerja keras dan cerdas tanpa perhitungan untung rugi pengabdianya.

60

PEMBANGUNAN MILITER

Tantangan kedua yang harus dihadapi TNI adalah pembangunan kekuatan militer. Akibat embargo dan krisis ekonomi, TNI pernah berada pada posisi terendah dalam peralatan militer. Bahkan TNI nyaris tidak mampu melaksanakan operasi kemanusiaan di Aceh tahun 2004. Syukurlah rakyat dan pemerintah memberikan perhatian besar dengan secara bertahap memodernisasi peralatan militer selama 10 tahun terakhir.

Pada posisi sekarang, bangsa boleh bangga kepada TNI yang mampu dan kredibel untuk melaksanakan berbagai tugas termasuk pada taraf regional. Apalagi itu didukung oleh kebangkitan industri pertahanan sebagai penopang modernisasi dan kebutuhan peralatan militer.

Hanya saja kita perlu terus membangun kekuatan militer karena kedaulatan negara merupakan "*intangible value*". Kekuatan pokok minimal (MEF) yang dibutuhkan, capaiannya belum mencapai 50 persen dari target Renstra 2024. Keterbatasan kemampuan negara membuat pemerintah belum mampu memberikan

anggaran di atas 1 persen dari Produk Domestik Bruto. Dari anggaran pertahanan yang disediakan pun, 42 persen habis untuk belanja pegawai.

TNI memahami saat ini masalah kesejahteraan rakyat perlu lebih diutamakan. Namun kita perlu juga memikirkan nasib perwira menengah TNI yang jumlahnya ratusan, tetapi tidak bisa tertampung di dalam organisasi. Diperlukan ada penguatan interaksi antara teknokrat dan TNI untuk mengisi keterampilan dari mereka agar bisa dimanfaatkan di luar tugas kemiliteran.

61

Di sini diperlukan kerelaan dari prajurit untuk meningkatkan kemampuan vokasional agar mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang heterogen. Interaksi ini jangan dibaca sebagai agenda kepentingan prajurit, tetapi semata untuk mengembangkan nilai keterampilan *non-combat* tanpa harus didukung biaya negara. Dengan kedisiplinan yang tinggi, para prajurit ini tentunya akan bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional.

KEAMANAN NASIONAL

Tantangan ketiga yang harus bisa dijawab adalah bagaimana TNI menerjemahkan aspek keamanan nasional ke depan. Di era demokrasi, sistem keamanan nasional tidak boleh kendor bahkan perlu dikelola proaktif dan terukur agar stabilitas nasional bisa menopang derap langkah pembangunan.

Ironinya dewasa ini kita tidak memiliki sistem keamanan nasional yang efektif memberikan arahan strategis menghadapi dinamika permasalahan stabilitas nasional yang multidimensional.

Pegangan kita saat ini bila ada rongrongan stabilitas adalah UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, yang regulasi turunannya pernah menjadi rujukan Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban dan Badan Koordinasi Stabilitas Nasional. Kita perlu bijak menyikapi makna perlunya suatu sistem keamanan nasional di era demokrasi.

62 Kita selalu terjebak kecurigaan bahwa TNI ingin kembali ke panggung kekuasaan ketika berbicara tentang keamanan nasional. Padahal TNI sudah “taat, nyaman, dan aman” di bawah UU TNI yang berlaku sekarang. Marilah kita berpikir terintegrasi antarsesama warga bangsa untuk membangun *collective response to protect the country* baik pada masa damai dan keadaan darurat.

TNI dapat berdiri tegak sampai 70 tahun pengabdian karena TNI konsisten kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kepercayaan rakyat timbul manakala TNI mengabdikan kepada negara dan bangsa ini secara tepat dan benar tanpa agenda politik kepentingan individu. TNI sebagai Tentara Kebangsaan wajib melaksanakan kepercayaan yang diberikan rakyat untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta Pancasila dan UUD 1945.





“TNI dapat tegar dan tegak berkembang sampai 70 tahun pengabdian karena TNI konsisten kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Terus memastikan bahwa kepercayaan rakyat timbul manakala TNI mengabdikan kepada negara dan bangsa ini secara tepat dan benar tanpa agenda politik kepentingan individu.”

09.

TNI MAWAS DIRI & WASPADA

65

Sejak generasi 45 sampai generasi penerus di usia 70 tahun TNI terus menentukan darma dan pengabdian kepada bangsa dan negara seraya bekerja berbakti menjalani fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia terus mampu mengawal dan menjaga negara kebangsaan yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Hal langka dalam sejarah dunia suatu bangsa membentuk angkatan perang sambil bertempur dan berperang merebut kemerdekaan, itulah Indonesia membangun tentaranya.

Walau tidak disangkal arus sejarah TNI mengalami berbagai kekurangan dari sisi kepemimpinan dan manajemen yang mungkin saja disebabkan kepentingan pemerintah yang terjadi pada masa itu, tetapi komitmen dan tanggungjawab terhadap negara tidak pernah surut karena nilai dan semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjiwai dan terpatri dalam kewajiban mengabdikan diri dari masa ke masa.

Fakta dan konsekuensi sejarah di era masa lalu menempatkan TNI pada kekuasaan yang nyaris paripurna di era otoritarian

pemerintahan orde baru selama 32 tahun. Sebaliknya pasca orde baru TNI mengalami degradasi legitimasi dan kepercayaan rakyat, pada era demokrasi sebagai awal reformasi yang menempatkan TNI pada posisi terendah disertai kekecewaan rakyat yang sebenarnya pemilik TNI.

Menyadari kelengahan dan pengalaman pahit tersebut TNI bertekad bangkit mengubah sikap baru dengan menjalani reformasi internalnya, berkomitmen melangkah proporsional dan profesional memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.

66

Kini legalitas dan legitimasi TNI bertumpu kepada UU TNI tahun 2004 yang mengatur misi yang dilaksanakan TNI wajib memiliki cantolan hukum yang autentik melalui proses antara pemerintah dan parlemen, tidak sekadar adanya perintah atasan.

Keberadaan TNI dalam perspektif sistem nasional merupakan bagian yang sejajar dengan komponen bangsa lainnya yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan perspektif militer profesional melekat fungsi militer membangun dan mengembangkan manajemen TNI yang kredibel dan kapabel.

Filosofi dan prinsip sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang diaman oleh TNI hendaknya difahami dinamis tidak hanya pada negara dalam keadaan perang, tetapi juga efektif di masa damai mendukung pembangunan dengan aplikasi manajemen pembinaan teritorial yang sebenarnya menjadi fungsi pemerintah tidak hanya fungsi militer di dalam TNI. Tokoh militer Pak Oerip Sumohardjo mengatakan "Tentara Indonesia adalah Rakyat Indonesia", artinya Indonesia memiliki 250 juta tentara dengan TNI sebagai kekuatan inti.

CERMATI INSURJENSI DAN TERORISME TANPA BATAS

Pada kenyataan kelangsungan hidup suatu negara di dunia tidak lepas dari insurjensi, tidak ada jaminan bahwa negara kita bebas dari rongrongan insurjensi bahkan tidak ada garansi eliminasi insurjensi sampai orang terakhir apalagi tipologi perang yang asimetris yang tanpa batas terkandung di dalamnya insurjensi sebagai fondasi dan teror sebagai modus operandi.

Kita perlu mencermati perubahan “strategi adaptasi” sebagai pola insurjensi baru yang memanfaatkan fenomena turbulensi dan gesekan politik - ekonomi dan soliditas komunal melakukan aksi yang berdampak negatif bagi stabilitas multidimensional. Apalagi bagi negara kita yang sedang bekerja keras membangun.

67

TNI perlu melakukan rekonstruksi pola lawan insurjensi, tidak hanya menerapkan taktik dan teknik militer murni, tetapi memerlukan revitalisasi yang terintegrasi antara kekuatan militer dan nonmiliter. Saatnya negara memiliki kontijensi nasional menghadapi insurjensi nonmiliter yang tidak dapat ditanggulangi dengan kekuatan militer murni. Waspadailah jebakan insurjensi yang menggunakan pancingan pada area taktis tetapi berakibat negatif pada area politis.

Realita memastikan sejak tahun 2000 di era demokrasi yang penuh keterbukaan ini ada modus operandi terorisme yang eksis dan eskalatif sangat mungkin menyentuh sendi kedaulatan—keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kita akui bersama terorisme sebagai modus tindakan kekerasan identik dengan kriminal yang wajib diperangi tentunya dengan tatanan yang jelas dan tegas pada parameter eskalasi yang mana menjadi tugas TNI dan Polri.

Para pendahulu kita sangat cermat dan piawai untuk tidak menyebut asal usul suatu gerakan insurjensi yang sensitif terhadap komunitas di negara kita yang pluralis ini. Tidak disangkal wilayah nasional bergeser dari terminal transit menjadi basis wilayah terorisme internasional oleh tanpa sebutan asal usul *Terorist Group*.

68 Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi penuh harapan terhadap TNI merevitalisasi manajemen pembinaan teritorial TNI sebagai bagian dari manajemen pembinaan teritorial pemerintah. Tentunya kita perlu prajurit yang kerja keras dan cerdas tanpa perhitungan untung rugi.

Rakyat mengharapkan TNI merespons tantangan ini dengan manajemen TNI yang kapabel yang memerlukan tipikal prajurit yang kerja keras dan cerdas.

KETERBATASAN NEGARA DAN KEPEMIMPINAN TNI

Akibat embargo dan krisis ekonomi TNI pernah berada pada posisi terendah dalam peralatan militer bahkan nyaris tidak mampu melaksanakan operasi kemanusiaan di Aceh 2004. Syukurlah rakyat dan pemerintah memberikan perhatian besar dengan secara bertahap memodernisasi peralatan militer selama 10 tahun terakhir. Pada posisi sekarang, bangsa boleh bangga TNI mampu dan kredibel pada taraf regional dan ditambah era kebangkitan industri pertahanan sebagai penopang modernisasi dan kebutuhan peralatan militer.

Walaupun kedaulatan negara disebut "*intangible value*" tetapi keterbatasan negara perlu diperhatikan demi memberikan keutamaan memenuhi kebutuhan utama masyarakat. TNI tentu

pegawai memahami idealisme yang memerlukan biaya besar untuk menjadi profesional dan modern, tetapi ada hal mendasar atas nama kesejahteraan rakyat yang perlu diutamakan. Negara saat ini belum stabil memberikan anggaran di atas 1% PDB bahkan problema yang dihadapi 42% anggaran pertahanan untuk belanja pegawai.

Membangun profesionalitas perlu biaya negara yang besar apalagi membangun kekuatan pokok minimal (MEF) capaiannya belum mencapai 50% target Renstra 2024. Oleh karenanya di samping tanggung jawab negara perlu penguatan interaksi heterogen dengan para teknokrat untuk bersama TNI mengisi *gap* kebutuhan profesi *non combat*. Cara ini disebut “*vocational effort*” secara sukarela kedua pihak TNI- Teknokrat membangun keterampilan dan produktifitas. Hal ini tidak menyentuh rambu TNI berbisnis dan sebaliknya interaksi heterogen ini tidak dibaca ada agenda kepentingan prajurit tetapi semata untuk mengembangkan nilai keterampilan *non combat* tanpa didukung biaya negara.

69

MENKAJI UUD DAN KEAMANAN NASIONAL

Pembukaan UUD 1945 sangat mendasar dan prinsip sebagai fundamental negara RI, namun pasal di dalam batang tubuh UUD perlu dicermati apakah sudah menyatu dalam nilai kebangsaan seperti semangat awal pembentukan UUD. Adakah pasal sangat sensitif terhadap persatuan dan kesatuan yang perlu dikaji dengan kesepakatan bukan penggantian UUD melainkan mempertegas dan memperjelas hal yang perlu dan tidak perlu bagi persatuan dan kesatuan. Hendaknya menjadi pemahaman bersama bahwa mengkaji UUD bukan area politik praktis yang dilarang oleh TNI, tetapi bagian dari politik kenegaraan dimana TNI sebagai kom-

ponen bangsa berada di dalamnya. Presiden pertama Soekarno menggariskan bahwa UUD adalah asas dan politik tentara dan menjadi basis di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

70 Di era demokrasi, sistem keamanan nasional tidak boleh kendor bahkan perlu dikelola proaktif dan terukur agar stabilitas dimensional bisa menopang gerak laju pembangunan. Ironinya dewasa ini kita tidak memiliki sistem keamanan nasional yang efektif memberikan arahan strategis menghadapi dinamika permasalahan stabilitas nasional multidimensi. Pegangan kita saat ini bila ada rongrongan stabilitas adalah UU No 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya dengan berbagai turunan regulasinya bahkan pernah menjadi rujukan Kopkamtib dan Bakorstanas. Kita selalu terjebak kecurigaan adanya suasana otoritarian kembali apalagi kekhawatiran TNI ke panggung kekuasaan, padahal TNI sudah “nyaman dan aman” di bawah UU TNI di era demokrasi. Marilah kita berfikir terintegrasi sesama komunitas nasional untuk membangun *collective Response to protect the country* masa damai dan darurat.

TERUS MENGABDI

TNI dapat tegar dan tegak berkembang sampai 70 tahun pengabdian karena TNI konsisten kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Terus memastikan bahwa kepercayaan rakyat timbul manakala TNI mengabdikan kepada negara dan bangsa ini secara tepat dan benar tanpa agenda politik kepentingan individu. Harapan yang tinggi TNI sebagai Tentara Kebangsaan wajib memaknai deretan pandangan negara yang penuh yakin dan percaya kepada TNI menjamin keselamatan bangsa dan negara Pancasila dan UUD 1945.



10.

TNI BIRAWA

72

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mencatat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai organisasi pengabdian warga negara Republik Indonesia pada profesi militer yang oleh konstitusi UUD 1945 diamanatkan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

Di masa lalu, pemerintah sangat dominan dalam peran di hampir semua sektor penyelenggaraan negara yang lazim disebut otoritarian dengan menempatkan ABRI (TNI-POLRI) dalam posisi ketat mengawal pemerintah dengan status sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sospol yang dikenal Dwifungsi ABRI.

Dominasi peran ABRI kemudian berubah seiring era reformasi. Reformasi TNI selain di bidang struktur dan doktrin juga terhadap aspek kultur, ibarat mengubah kebiasaan lama yang sudah melembaga terbentuk. Sejak tahun 1998, TNI telah bekerja keras melakukan perubahan-perubahan mendasar berbagai tatanan, pola pikir dan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era demokrasi.

Tidak dapat disangkal perubahan mendasar selama 18 tahun masih meninggalkan kesan sikap trauma, hati-hati, bahkan apatis terhadap fenomena kehidupan politik nasional. Reformasi Internal TNI yang hingga kini diteruskan oleh generasi TNI sangat memerlukan kualitas integritas kepemimpinan TNI yang konsisten

dan komitmen terhadap Jatidiri TNI seperti yang dituntut oleh undang-undang.

POLITIK NEGARA

Politik TNI adalah politik negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Panglima Besar Soedirman sudah dipatrikan dalam makna Sapta Marga sebagai prajurit pejuang, prajurit rakyat, prajurit nasional dan prajurit profesional. Di masa kini dan mendatang pada era demokrasi yang penuh keterbukaan, akan sangat berbeda dengan masa lalu yang hitam putih memosisikan TNI dalam dua jenis misi di atas.

73

Di sini perlu kecermatan kepemimpinan dan manajemen TNI untuk menegaskan secara eksplisit kepada segenap prajurit. Rambu-rambu pelaksanaan misi negara di dalam iklim demokrasi yang memberikan ruang interaksi sipil-militer perlu menjadi pedoman. Hal ini penting, mengingat pergerakan demokrasi di Indonesia begitu cepat sehingga memungkinkan fenomena demokrasi memberikan imbas dan menggelitik pribadi prajurit.

TNI sudah membuka pintu yang luas bagi bangsa di era reformasi untuk meneropong perjalanan TNI dari masa ke masa. Bagi TNI hal ini tentu memberikan manfaat ganda bagi kehormatan dan nilai moral yang senantiasa menjadi tanggung jawab generasi TNI.

TNI yang tegas menerjemahkan esensi dan makna politik negara akan menghindari tafsiran tersamar dari publik yang seolah-olah TNI berdwifungsi. Memang kita masih sering mendengar pertanyaan dalam obrolan bebas di masyarakat, bagaimana TNI bersikap jika negara dan bangsa mengalami

turbulensi? Bagaimana status legitimasi dan legalitas TNI dalam misi negara tunduk kepada otoritas sipil yang berdaulat untuk lingkup penugasan pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis?

TNI bukan penentu akhir, melainkan elemen utama negara untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Sebagai militer profesional, TNI senantiasa diharapkan secara independen menyampaikan pemberitahuan dini kepada negara terhadap berbagai fenomena yang berpotensi menimbulkan destabilisasi kelangsungan hidup dan keselamatan bangsa.

74

Sikap independen adalah tuntutan profesionalitas militer secara universal yang berpegang kepada prinsip netral dan imparsial. Sikap independen ini pula menjadi rambu pengaman bagi TNI terhadap kesan publik yang mencari celah dari sikap dan gerak-gerik yang belum tuntas menghayati dan menjalankan reformasi kultur TNI yaitu mengubah rasio dan rasa lama yang sudah tidak relevan bahkan dapat menimbulkan noda kehormatan TNI.

INTEGRASI DAN INTEGRITAS

Suatu keniscayaan perlunya integrasi nasional dalam era demokrasi, diintesifikannya kerja sama sipil dan militer untuk bahu membahu dalam memikul beban politik negara.

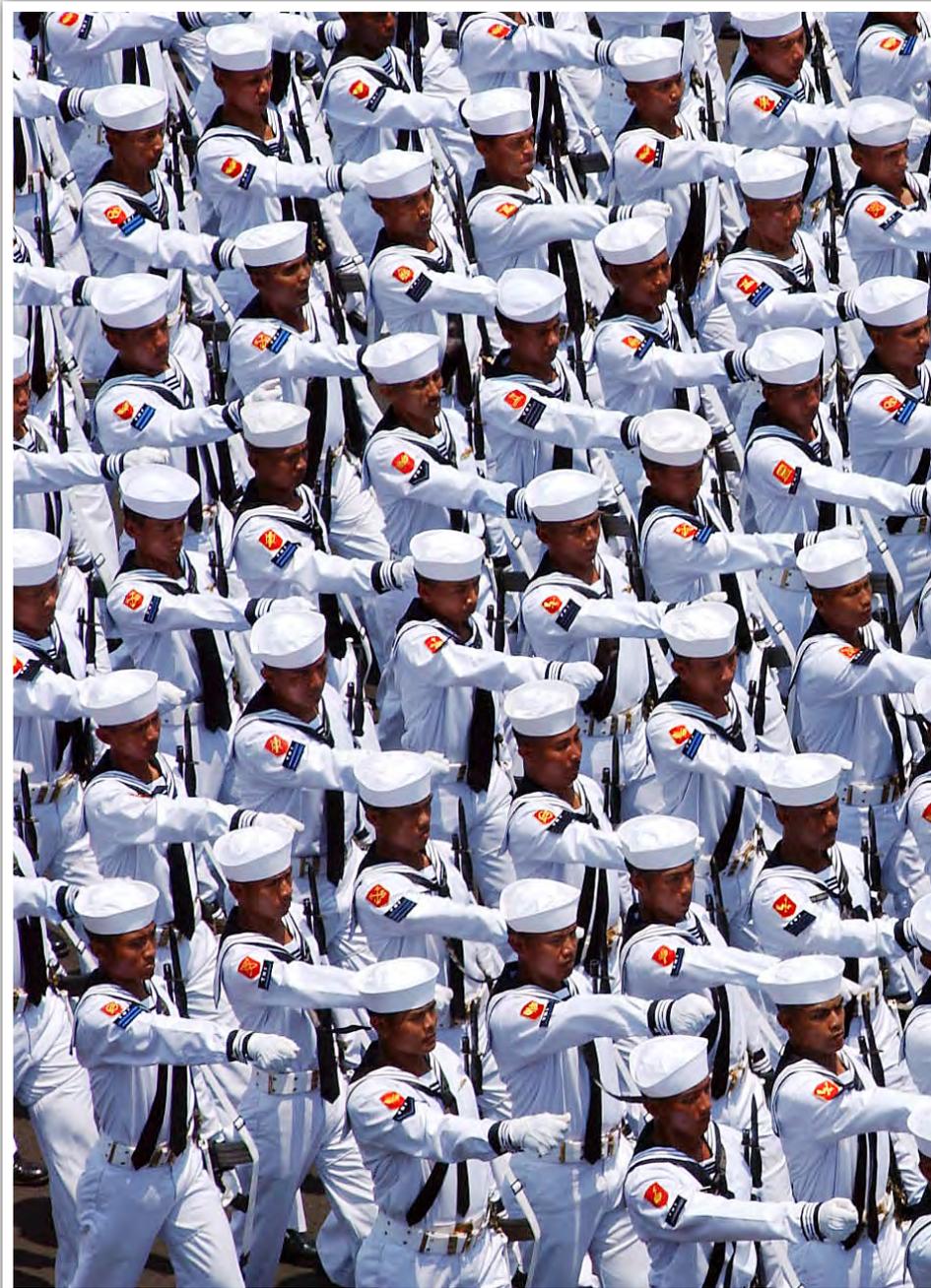
Pergeseran iklim konflik pada abad ke 21 dengan dimensi baru konflik tidak beraturan yang dikenal sebagai perang asimetris dengan padanan teknologi menjadi opsi efektif dibandingkan penggunaan *hard power* yang menggunakan peralatan militer berat di semua spektrum perang, baik di darat, laut dan udara, dengan persyaratan memerlukan kemampuan ekonomi yang tinggi. Padahal kondisi ekonomi global mengalami perlambatan

yang sangat pelan dan cenderung negatif. Kini secara universal kekuatan militer lebih mengutamakan untuk misi kemanusiaan dan misi negara demi menjamin stabilitas dan kedaulatan serta tugas perdamaian dunia.

Indonesia mencatat penanganan konflik dalam negeri cenderung diselesaikan melalui diplomasi, walaupun diakui bahwa operasi militer berperan besar dalam mendorong terbentuknya ruang diplomasi penyelesaian konflik.

Tantangan integritas TNI adalah bersikap “tidak” terhadap godaan kepentingan. Selain ini merupakan nilai moral tertinggi sebagai kehormatan TNI yang ditebus dengan keringat dan darah, juga menjadi sabuk pengaman bagi TNI di semua lini keprajuritan. Tanggung jawab kewenangan yang hanya mampir seketika di pundak TNI akan menjadi modalitas besar bagi pengakuan bangsa dan negara hendaknya patut dijaga, agar sistem tidak mengalami distorsi. Lebih dari itu revitalisasi manajemen dengan berbagai terobosan sistemik diperlukan dengan semangat jiwa korsya yang menyatukan rasa dan rasio dari para perwira dan prajuritnya, sehingga memastikan TNI menjadi kekuatan yang dahsyat dan mengagumkan.









“Komando Teritorial TNI dalam bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan negara. Karena itu, jika fungsi ini dihancurkan berarti TNI kehilangan gelar kekuatan. Kehadiran Komando Teritorial TNI dibutuhkan sepanjang mereka tidak mengerahkan fungsi teritorial seperti yang dilakukan pada masa lalu. Apabila dianggap perlu, maka TNI dapat melakukan penggelaran operasi kemanusiaan atau untuk membantu pemerintah daerah.”

11.

FUNGSI TERITORIAL TNI: MENDAMPINGI SATU DEKADE REFORMASI

79

Makna reformasi adalah perubahan dari suatu sistem yang tadinya otoritarian kepada demokratis. Dalam perubahan sistem tersebut, TNI diminta untuk memosisikan diri dalam suatu tatanan yang disebut dengan *Paradigma Baru TNI*. Dalam hal ini TNI harus menjaga pengertian reformasi di bidang pertahanan negara maupun TNI, bahwa perubahan ini tidak diartikan sebagai suatu revolusi, namun merupakan suatu perubahan rasional secara bertahap dalam upaya menghilangkan yang buruk dan memperbaiki yang rusak. Artinya, dalam menjalankan reformasi, harus dilaksanakan secara gradual sistematis, tidak dengan melakukan perombakan secara total.

Dari sisi manfaat, reformasi bagi TNI harus dilihat dari sisi introspeksi dan antisipasi, dengan istilah lain “mawas diri dan waspada”. Berdasarkan itu dapat dilihat bahwa pengertian introspeksi diri yaitu dalam melaksanakan tugas tidak ada lagi pelaksanaan tugas yang berjalan secara otomatis, tetapi semua pelaksanaan tugas harus berdasarkan legalitas dan legitimasi sesuai dengan pengaturan konstitusi. TNI tidak dapat lagi berbuat semauanya.

Bagi TNI, era reformasi telah menyediakan lebih banyak waktu untuk membenahi dan menata diri serta menambah bobot intelektual bagi prajuritnya. Dan yang paling penting bahwa reformasi ini harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan *civil society* dan demokratisasi, tanpa harus mengubah jati diri TNI. Pemahaman yang keliru di masyarakat, bahwa apabila TNI tetap dalam suatu prinsip mempertahankan jati diri itu seolah-olah status quo.

80 Selain itu bagi TNI, masa depan telah menuntut TNI untuk meningkatkan profesionalisme demi meraih kepercayaan publik. Pada masa otoritarian dulu, kelemahan TNI tidak terlihat karena kita ditutupi. Namun di era *civil society* saat ini, kekurangan-kekurangan TNI sangat terlihat. Apabila seorang perwira tidak mempunyai kemampuan dan gagal mengembangkan diri serta tidak memiliki daya saing, maka akan menjadi bahan tertawaan.

Reformasi TNI itu sebaiknya tidak dibatasi, karena organisasi itu dinamis. Apabila reformasi dibatasi, maka ketika selesai batas tersebut semua orang akan tertidur. Jadi TNI tidak pernah mengatakan reformasi itu bertahap, tetapi reformasi itu gradual. Artinya tidak secara drastis, tidak revolusioner, tetapi seperti evolusi. Lebih baik dikatakan sebagai perkembangan profesionalisme militer, yang mengarah kepada bagaimana militer beradaptasi dengan perubahan dunia. Dan yang dilakukan oleh TNI adalah perubahan implementasi secara rasional yang dipandang lebih produktif.

Dalam melakukan reformasi militer, TNI harus patuh pada undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan. Kemudian implementasinya ada pula pada UU Peradilan Militer, yang saat ini sedang

menunggu waktu untuk diratifikasi. TNI telah setuju untuk membawa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum umum diadili di pengadilan umum. Hal itu menjelaskan bahwa TNI tidak pernah menolak untuk patuh pada hukum atau prinsip Hak Asasi Manusia.

Sementara itu mengenai *civil society* yang diharapkan TNI, sebelum era reformasi, TNI dan pemerintah itu identik. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat kondisi konstitusi saat itu menuntut demikian. TNI melakukan dwi fungsi karena ada dasar hukumnya dan TNI terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari pemerintah. Maka menjadi keharusan bagi *civil society* (masyarakat madani) yang telah mengubah keadaan itu. Pada saat itu pula TNI adalah alat menyelesaikan masalah nasional, tetapi sekarang hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan *civil society* yang diwujudkan dengan mengabdikan tenaga dan pikiran kepada pengembangan profesionalisme sebagai alat pertahanan negara. TNI tidak lagi diidentikkan dengan pemerintah, karena keberadaan TNI telah diatur dalam undang-undang.

81

Kaitannya dengan supremasi sipil, bahwa adanya dikotomi antara sipil dan militer, dapat membuat terjebak kepada pemikiran-pemikiran sempit yang keluar dari koridor kebangsaan dan kenegarawanan. Seharusnya sudah tidak ada militerisme di Indonesia. TNI telah melawan militerisme sejak dalam pendidikan. Selain itu, sangat tidak tepat jika saat ini terus membicarakan mengenai supremasi sipil. Masyarakat sipil dan militer bekerja sama untuk membangun *civil society*. TNI adalah warga negara yang kebetulan bekerja sebagai profesi militer. Keduanya, masyarakat sipil dan mereka yang bekerja sebagai militer adalah sama sebagai warga negara Indonesia.

Di era globalisasi ini hanya akan membuang-buang waktu saja apabila terus berdebat mengenai dikotomi sipil-militer. Semua negara yang berpikir secara global tidak akan mempertimbangkan perdebatan mengenai masalah tersebut, karena masyarakat sipil dan militer sama-sama berkontribusi dalam pembangunan negara. Namun demikian diakui bahwa pada awalnya, adanya pemisahan antara sipil dan militer, lebih dikarenakan sebagai proses pencarian format ideal, sehingga untuk saat ini sangat tidak tepat membicarakannya lagi.

82 Mengenai komando teritorial, harus disadari bahwa fungsi teritorial bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah. Pada masa lalu TNI terlihat memonopoli fungsi teritorial sebagai bagian dari pemerintahan. Sebagai sebuah organisasi, TNI melakukan pembinaan teritorial, tetapi hanya bagian kecil dari keseluruhan pembinaan teritorial pemerintah. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum turut menjalankan fungsi teritorialnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pekerjaan Umum selalu mengadakan pemeliharaan terhadap semua aspek-aspek infrastruktur yang menyokong kepentingan pertahanan negara. Jadi, pembinaan teritorial itu dilaksanakan oleh semua aparat negara, pemerintah, untuk menjaga kelangsungan hidup negara terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan.

Komando Teritorial TNI dalam bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan negara. Karena itu, jika fungsi ini dihancurkan berarti TNI kehilangan gelar kekuatan. Kehadiran Komando Teritorial TNI dibutuhkan sepanjang mereka tidak menjerahkan fungsi teritorial seperti yang dilakukan pada masa lalu. Apabila dianggap perlu, maka TNI dapat melakukan penggelaran operasi kemanusiaan atau untuk membantu pemerintah daerah.

Tentang keberadaan TNI Angkatan Laut dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, TNI tidak mengenal sistem pertahanan matra, tetapi dikenal *Tri Matra Terpadu*, tidak ada salah satu angkatan yang dominan. Ketiga angkatan merupakan kesatuan guna mempertahankan negara dari ancaman dan bertugas memelihara integritas teritorial. Doktrin pertahanan saat ini adalah menggabungkan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, hal itu tidak membuat kita memfokuskan kepada TNI Angkatan Laut. Namun demikian diakui, bahwa benar pemeliharaan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara membutuhkan anggaran yang besar karena alutsista yang dimilikinya. Sebaliknya TNI Angkatan Darat yang sarat dengan jumlah personel juga membutuhkan alokasi anggaran yang sesuai.





2

**URGENSI PERTAHANAN
&
BELA NEGARA**



“Saat ini kita di era kebangkitan industri pertahanan. Dalam era kebangkitan industri pertahanan sebagai komponen pendukung, saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa efektivitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer (alutsista TNI) agar kemampuan peralatan militer kita dapat mandiri.”

12.

BERANI MEMBANGUN INDONESIA KUAT

89

Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional.

Tugas pertahanan berada di pundak angkatan perang. Untuk bisa menjalankan tugas itu, angkatan perang membutuhkan peralatan tempur yang modern dan mandiri. Karena itu, kemampuan angkatan perang sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri pertahanan yang mendukungnya. Kita dapat melihat bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak memperkuat angkatan perangnya.

Banyak negara yang memperkuat industri pertahanannya agar angkatan perangnya menjadi andal karena kebutuhannya dipenuhi secara mandiri melalui industri pertahanan dalam negeri. Ini memosisikan industri pertahanan menjadi salah satu faktor determinan bagi kelangsungan sistem pertahanan negara.

ANGKATAN PERANG ANDAL

Kita segera memiliki TNI yang sangat membanggakan, bukan hanya TNI yang profesional, melainkan juga TNI yang dipersenjatai dengan alutsista yang bisa diandalkan dan dapat dipenuhi secara mandiri oleh industri pertahanan di dalam negeri. Penguatan industri pertahanan dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan guna meningkatkan efektivitas pertahanan.

90 Sekarang ini kita sedang berupaya memiliki *minimum essential forces* yang mempunyai mobilitas tinggi dan daya pukul yang dahsyat, setara dan seimbang dengan negara lain, serta sejalan dengan perkembangan teknologi yang dikenal dengan *Revolution in Military Affairs*. Ini tuntutan yang perlu direspons oleh industri pertahanan dalam mengimplementasikan teknologi pada alutsista untuk membangun kekuatan militer.

SI VIS PACEM PARA BELLUM

Memang kadang muncul pertanyaan, apakah perlu kita melakukan modernisasi alutsista? Pertanyaan itu muncul karena menganggap bahwa tidak mungkin lagi akan ada perang. Tidak ada satu pun negara yang tidak menginginkan perdamaian. Semua negara pasti berupaya mencegah perang karena tahu bahwa perang akan menyengsarakan rakyat.

Namun, kita juga melihat tidak ada negara duduk tenang, tidak memperkuat angkatan perangnya. Banyak negara memperkuat industri pertahanan karena ingin memiliki angkatan perang yang bisa diandalkan.

Tidaklah mungkin ada negara yang menunggu perang, baru

kemudian mempersiapkan angkatan perang mereka. Membangun sistem pertahanan negara tidak bisa dilakukan seketika, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap sesuai postur sistem pertahanan yang diinginkan.

Kita mengenal prinsip "*si vis pacem para bellum*", apabila kita menginginkan perdamaian, kita harus siap berperang. Prinsip itu hendaknya jangan dipahami berlebihan, melainkan sebagai langkah strategis yang proporsional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita yang menjadi opsi formulasi pembangunan kekuatan pertahanan.

91

KEMHAN PEMBINA INDUSTRI PERTAHANAN

Kemhan sebagai pembina industri pertahanan berkepentingan untuk memberikan peluang kepada industri pertahanan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Kemhan bahkan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa melakukan ekspor produk mereka ke luar negeri.

Produk industri pertahanan seperti pistol, senjata serbu, mortir, dan kendaraan tempur roda ban (Panser Anoa) dari PT Pindad selain sudah mendukung kebutuhan TNI AD juga sudah diekspor ke beberapa negara. Demikian pula dengan beberapa pesawat angkut ringan dan sedang produksi PT Dirgantara Indonesia seperti CN 212, CN 235, dan CN 295, serta helikopter serbu Bell 412.

PT. PAL saat ini kita fokuskan untuk membuat kapal kombatan dan kita persiapkan membangun kapal selam. Selain itu, kita juga memiliki beberapa galangan swasta di dalam negeri yang memproduksi kapal patroli. Pertahanan militer kita pada posisi

kebangkitan kekuatan militer setelah kurang lebih 15 tahun kemampuan militer mengalami dampak krisis ekonomi dan embargo.

92 Saat ini kemampuan anggaran yang dikelola pemerintah sejak KIB I dan II telah mengangkat status pertahanan militer kita dengan ciri modernisasi peralatan militer yang memiliki daya pukul yang dahsyat dan mobilitas yang tinggi dengan teknologi militer canggih. Sebagai informasi lima tahun ke depan sejak saat 2010 kita akan memiliki tambahan skuadron pesawat tempur strategis dan pesawat angkut berat dan sedang. Juga memiliki tambahan kapal perang atas air dan bawah air (kapal selam) serta kapal patroli cepat.

Kemampuan Angkatan Darat sudah memiliki lebih 100 unit tank berat dan puluhan *infantry fighting vehicle* serta 200-an panser Anoa yang akan tersebar di wilayah nasional termasuk Heli Serang Taktis. Kemampuan pertahanan militer yang unggul tidak bermaksud menempati posisi ofensif, tetapi sebagai negara yang berdaulat terhadap wilayah teritorial dan melindungi bangsa dan negara, kemampuan pertahanan militer yang prima diperlukan untuk setiap saat mampu menghadapi ancaman militer.

PERTAHANAN NIRMILITER

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

Fungsi pertahanan nirmiliter yang diwujudkan dalam kom-

ponen cadangan dan komponen pendukung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2) dalam menghadapi ancaman militer. Hal yang menonjol dalam pertahanan nirmiliter adalah peran rakyat sebagai sumber daya manusia dalam bela negara seperti diamanatkan oleh Panglima Besar Soedirman *"Bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, perlu sekali mengadakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara"*, (Amanat Pangsar diucapkan di hadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada 12 November 1945 dan bertempat di MT-TKR Yogyakarta).

93

Kita perlu membangkitkan peran masyarakat dalam kerangka "komponen cadangan" yang hendaknya tidak dipahami sebagai militerisasi bangsa yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia mengikuti wajib militer. Sebaliknya, negara perlu mempersiapkan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu seperti kesehatan, psikologi, samapta, untuk dilatih kemiliteran guna memperkuat TNI sebagai komponen utama bila negara dalam keadaan darurat perang.

Selain itu, kita juga mengenal kemampuan pertahanan nirmiliter yang disebut "komponen pendukung". Urgensinya adalah kemampuan pertahanan negara tidak hanya mengerahkan komponen cadangan, tetapi juga ditopang oleh dukungan pertahanan. Untuk memudahkan kita memahami, kita gunakan istilah yang populer yaitu "industri pertahanan".

Saat ini kita di era kebangkitan industri pertahanan. Dalam era kebangkitan industri pertahanan sebagai komponen pendukung saya ingin meyakinkan kepada kita semua, bahwa efektivitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri

pertahanan untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer (alutsista TNI) agar kemampuan peralatan militer kita dapat mandiri. Saat ini kita dapat berbangga mengetahui industri pertahanan kita pada tingkat kemampuan teknologi menengah dan bergerak ke arah teknologi militer pada skala tinggi.

94 Negara kita memiliki kemampuan pertahanan negara dengan soliditas yang produktif antara postur pertahanan militer (komponen utama) yang diawaki TNI dan postur pertahanan nirmiliter (komponen cadangan dan pendukung) yang diawaki komponen bangsa profesional nonmiliter serta kemampuan industri pertahanan yang mandiri.





“Setiap warga negara tidak bisa dihindarkan dari kewajiban untuk mempertahankan dan membela negaranya, dan hal ini ditegaskan dalam UUD 1945. Dengan demikian hak dan kewajiban bela negara harus dipahami oleh setiap warga negara.”



13.

URGENSI PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN, KEAMANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

97

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi kita sebagai warga negara, secara tidak langsung berkaitan dengan peran lembaga negara dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, karena tantangan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depan bersifat multidimensional menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Harus kita sadari bahwa kompleksitas tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa pada era globalisasi ini diwarnai dengan persaingan dalam penguasaan sumber daya alam dan ekonomi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perang modern saat ini dapat juga berupa perang untuk mengubah paradigma berpikir dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam dinamika kehidupan suatu bangsa dan negara. Model perang seperti ini menuntut setiap negara harus memiliki strategi tertentu dalam menghadapinya. Ancaman dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang bila tidak ditangani dengan tepat dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Perlu dipahami bahwa dalam UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara kita bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Dalam menghadapi ancaman non militer lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan merupakan unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara tidak bisa dihindarkan dari kewajiban untuk mempertahankan dan membela negaranya, dan hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta pasal 30 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian hak dan kewajiban bela negara harus dipahami oleh setiap warga negara.

Perkembangan yang terjadi saat ini di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menunjukkan situasi yang memprihatinkan, seperti menurunnya rasa nasionalisme, adanya kemerosotan etika dalam kehidupan berbangsa, serta kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Realitas lainnya adalah bahwa sampai saat ini, berbagai instrumen hukum yang ada belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat publik tidak jelas penyelesaiannya, hal ini tidak saja merendahkan hukum itu sendiri, akan tetapi meniadakan rasa keadilan masyarakat. Karena itu setiap penegak hukum harus memiliki profesionalitas dan komitmen yang sama dalam memberantas KKN serta pelanggaran hukum lainnya, sehingga tercipta keselarasan antara tuntutan dan layanan yang diberikan dalam mekanisme penyelesaian masalah hukum dan penegakan HAM.

Dalam hal pelayanan publik, permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan itu sendiri yang dirasakan masyarakat masih rendah, karena dalam penyelenggaraannya masih memiliki kelemahan antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang terakses dan kurang terkoordinasi, sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan, yang mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih antara kebijakan satu instansi dengan instansi pelayanan lain, serta birokrasi yang panjang dan tidak efisien.

Kondisi tersebut disadari atau tidak menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih perlu lebih ditingkatkan lagi, sebagai wujud upaya bela negara guna terciptanya pemerintahan yang bersih, serta meningkatnya pelayanan dan rasa keadilan di masyarakat.







“Pilihan instrumen politik yang mengedepankan kekuatan diplomasi memosisikan bangsa kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab, juga menunjukkan kita bukan bangsa “sumbu pendek”, melainkan bangsa yang cermat dan tepat menentukan sikap. Disadari, membangun kekuatan militer hal yang mutlak bagi Indonesia sebagai bagian instrumen pertahanan. Mengedepankan kekuatan diplomasi tidak boleh diartikan “berjalan sendiri” tapi perlu diimbangi dengan “peran dan siasat” dari instrumen lainnya agar menghasilkan suatu resultan optimal.”



14.

MENENTUKAN INSTRUMEN PENANGKALAN

103

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mengelola strategi pertahanan di masa damai, ada tuntunan bagi pengelola negara menggunakan instrumen penangkalan sebagai pilihan fundamental untuk mencegah terjadinya perang yang hanya akan menghadihkan malapetaka, penderitaan dan bahkan kehancuran yang dahsyat bagi kehidupan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Pertahanan Negara, presiden telah menentukan kebijakan umum pertahanan negara lima tahunan yang juga dilengkapi dengan produk strategis seperti Doktrin Pertahanan, Strategi Pertahanan, Postur Pertahanan dan Buku Putih Pertahanan yang kesemua produk tersebut sebagai pedoman dalam mengelola sistem pertahanan negara.

Dengan demikian negara kita telah memiliki parameter yang sistemik dalam mengelola pertahanan negara. Para pakar dan praktisi pertahanan kita juga terlibat dalam menyampaikan pikiran cerdas mereka dalam memformulasikan berbagai produk strategis di bidang pertahanan negara.

INSTRUMEN PENANGKALAN

Bagi sistem pertahanan negara kita yang terdiri pertahanan militer dan nirmiliter, kita kenal beberapa instrumen penangkalan yang dominan yaitu instrumen militer bagi pertahanan militer dan bagi pertahanan nirmiliter tersedia instrumen politik, ekonomi, psikologi dan teknologi. Disadari, mewujudkan daya tangkal perlu biaya besar, tetapi ongkos membiayai perang bahkan akibatnya akan jauh lebih besar. Namun yang terpenting adalah melindungi kepentingan nasional dan martabat bangsa tetap terjaga.

104

Instrumen militer, kita tengah membangun kekuatan militer yang memiliki daya tangkal memadai pada kekuatan matra darat, laut dan udara walaupun penggunaan kekuatan militer TNI merupakan jalan terakhir. **Instrumen politik**, merupakan refleksi bagi sistem pemerintahan demokrasi dimana kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan yang diperuntukkan oleh para pelaku diplomasi yang kredibel dan memiliki reputasi internasional. **Instrumen ekonomi**, sebagai pilar kelangsungan hidup bangsa merupakan faktor vital yang dipunyai Indonesia dan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi bagi kebutuhan negara lain. **Instrumen psikologis**, nasionalisme dan patriotisme dari semua lini bangsa termasuk peran komunitas media dalam menimbulkan militansi bangsa dan bela negara. **Instrumen teknologi**, kita sudah saatnya tampil membangun daya tangkal teknologi dengan rekayasa produksi alutsista yang kita kembangkan di dalam negeri. Pasokan teknologi militer yang kita bangun pasti memberi daya tangkal bangsa.

SIKAP DAN KEBERANIAN

Pilihan politik merespons dengan tepat berbagai konflik dan

ketegangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak dapat disangkal pasti punya keuntungan dan kelemahan. Namun sekali lagi yang terpenting melindungi kepentingan nasional dan terjaganya martabat bangsa. Presiden memutuskan menggunakan kekuatan diplomasi, yang dipastikan sebagai sikap dan keberanian konstitusi yang melekat pada karakter presiden dan menegaskan kekuatan sistem pemerintahan yang presidensial.

Pilihan instrumen politik yang mengedepankan kekuatan diplomasi memosisikan bangsa kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab, juga menunjukkan kita bukan bangsa “*sumbu pendek*” seperti orang kebakaran jenggot, melainkan bangsa yang cermat dan tepat menentukan sikap. Disadari, membangun kekuatan militer hal yang mutlak bagi Indonesia sebagai bagian instrumen pertahanan, oleh karena itu mengedepankan kekuatan diplomasi tidak boleh diartikan “*berjalan sendiri*” tapi perlu diimbangi dengan “*peran dan siasat*” dari instrumen lainnya agar menghasilkan suatu resultan optimal.

105

Ada baiknya *stakeholders* instrumen penangkalan *selalu duduk bareng* menentukan “*peran dan siasat*” yang diambil menghadapi fenomena dan dinamika sebagai akselerasi terobosan.....
mission accomplished.....







“Trend perkembangan ancaman ke depan sudah tidak dapat lagi dihadapi dengan taktik dan teknik bertempur konvensional. Trend saat ini dihadapkan pada perkembangan global, musuh yang dihadapi adalah arena perang yang tersebar front-nya dan tanpa bentuk yang jelas. Garis pemisah antara perang dan damai semakin menipis. Perang ini akan menjadi perang dengan front non linier, bahkan mungkin tidak ada medan tempur yang terdefinisi dengan jelas maupun garis pemisah antara rakyat sipil dan militer.”



15.

GLOBALISASI DAN PERANG ASIMETRIS: DAMPAKNYA TERHADAP PEMBINAAN INFANTERI

109

Globalisasi dengan segala implikasinya telah membawa dampak sangat luar biasa terhadap dinamika politik dan keamanan internasional saat ini. Salah satu dimensi menonjol dari globalisasi, yaitu fenomena kemajuan teknologi dan informasi yang bersifat mondial, saat ini terbukti memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan dunia dan interaksi antarnegara. Banyak dampak positif dari kemajuan di bidang teknologi, seperti dalam hal teknologi komunikasi dan informasi yang mendorong meningkatnya *knowledge* dan *awareness* setiap penduduk di dunia. Globalisasi, secara umum menggambarkan proses perubahan pada masyarakat dan ekonomi dunia akibat meningkatnya arus perdagangan dan perubahan kultural secara dramatis yang didorong oleh kemajuan teknologi, yang membuat dunia seolah-olah menjadi mengecil sehingga menyebabkan manusia dapat berinteraksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mendalam dibandingkan sebelumnya (Friedman, 2002). Namun demikian, kemajuan teknologi juga telah menyebabkan permasalahan dan ancaman yang dihadapi suatu negara semakin kompleks.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan yang lebih kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup dimensi militer semata, melainkan juga dimensi yang bersifat non-militer. Karakteristik ancaman juga mengalami perluasan dengan munculnya ancaman non-tradisional yang bersumber dari segala aspek kehidupan mulai dari ideologi, sosial budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lainnya, di samping tetap hadirnya ancaman tradisional. Karakter perang yang berkembang saat ini juga mengalami perubahan, sebagaimana dapat dilihat dari mengemukanya konsep *Revolution in Military Affairs* (RMA), peperangan generasi keempat (*fourth generation warfare*), dari perang asimetris (*asymmetric warfare*), yang menjadi bagian integral dalam transformasi pertahanan di banyak negara, dan memengaruhi berbagai dimensi dalam kehidupan militer, mulai dari kelembagaan/organisasi, teknologi, doktrin dan penggunaan kekuatan.

Negara Republik Indonesia dengan luas wilayah 1.922.570 Km², memiliki 17.504 pulau, dihuni oleh lebih dari 300 macam etnik yang memiliki perbedaan agama dan adat istiadat, maka sangat riskan sekali dengan munculnya bahaya perang generasi ke empat (*4th generation warfare*). Ditambah pula dengan keadaan politik dalam negeri Indonesia yang semakin menimbulkan gejala perpecahan antar anak bangsa, juga kegiatan terorisme dan separatisme yang masih eksis mewarnai situasi keamanan negara. Di sisi lain keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan menimbulkan kekecewaan sebagian masyarakat akan sangat berpotensi menjadi pendorong meletusnya konflik asimetris. Hal ini harus segera diwaspadai dan dideteksi secara dini agar bahaya-bahaya yang timbul dapat segera dinetralisasi.

GLOBALISASI

Berbagai pakar sosial dan politik yang berasal atau menganut paradigma berbeda-beda relatif memiliki posisi yang hampir serupa bahwa globalisasi merekonstruksi dunia dengan trend penguatan dominasi sistem kapitalis ekonomi global, berbagai MNCs dan organisasi lain menekan status/kedudukan *nation-state*, serta terkikisnya nilai, tradisi dan budaya lokal oleh suatu budaya global. Trend tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan lalu lintas orang, barang, modal, dan gagasan melampaui batas-batas tradisional dari konsep negara, karena adanya faktor kemajuan teknologi informasi, yang secara perlahan namun pasti menyebar dan menjadi bersifat *mondial*, atau diterima, dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di berbagai belahan dunia manapun.

111

Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah memengaruhi dinamika masyarakat dunia, mulai dari tingkatan individu hingga kelompok masyarakat yang lebih terstruktur, yaitu negara. Timbul perbedaan di kalangan masyarakat tentang pandangan dan responsnya terhadap dampak globalisasi. Sebagian kalangan merespons globalisasi secara cerdas, kreatif dan kritis, namun sebagian kalangan lainnya merespons secara eksklusif atau bahkan menolak secara total. Dari respons ini, dapat dipetakan bahwa pandangan yang berkembang di antara kedua kelompok tersebut adalah yang satu memandang globalisasi sebagai tantangan, dan yang lainnya memandang globalisasi sebagai ancaman. Di satu sisi, globalisasi membawa kemudahan-kemudahan ekonomi yang kemudian membawa kemakmuran bagi banyak masyarakat dunia. Di sisi lain, globalisasi membawa dampak pada meluasnya kesenjangan ekonomi. Bagi kelompok yang memandang negatif atau kontra, globalisasi dipandang telah membentuk sistem "*survival of the fittest*" yang kemudian melahirkan kelompok

Sang Pemenang (*The Winner*) dan kelompok Sang Pecundang (*The Looser*) baik di tingkat negara, etnis, kelompok dan individu. Gempuran berlanjut dari Sang Pemenang kepada Sang Pecundang melahirkan Kelompok Sangat Marah (*The Angry Entity*) yang dapat mengalami polarisasi dan radikalisisasi menjadi kejahatan transnasional, separatisme bahkan terorisme.

112 Bagi suatu negara, tantangan globalisasi sangat beragam dan luas cakupan dimensinya, sehingga persinggungan nilai dan kepentingan yang terjadi juga sangat kompleks. Dalam kondisi ini, salah satu tantangan globalisasi yang dirasakan adalah menguatnya persepsi masyarakat tentang konsep kedaulatan populer di tengah-tengah kedaulatan negara yang dihadapkan pada kemajuan informasi dan teknologi, termasuk menguatnya liberalisasi politik dan ekonomi serta munculnya paradigma globalisme dan regionalisme dalam hubungan antarbangsa yang tidak lagi mengenal tapal batas negara atau yang lazim disebut dengan *the borderless world*.

PERANG ASIMETRIS

Perang asimetris pada dasarnya merupakan model peperangan antara dua pihak yang tidak seimbang kekuatan militer dan ekonominya, dengan pola yang tidak beraturan bersifat nonkonvensional. Berbeda dengan perang konvensional yang bersifat simetris, dalam perang asimetris negara berhadapan dengan aktor negara dan juga aktor-non-negara. Kedua aktor tersebut, berupaya mengembangkan taktik dan strategi untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya untuk mencapai kemenangan, yang dikembangkan dari cara-cara berfikir yang tidak konvensional, dan tentunya berada di luar aturan-aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat

luas, terbuka dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam perang yang bersifat asimetris terdapat sejumlah dimensi krusial dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Bersifat krusial karena sangat memengaruhi bentuk, tipe, dan pola serangan lawan atau musuh potensial. Dimensi-dimensi tersebut adalah menyangkut metode, teknologi, moral, organisasi, dan waktu.¹ Kelima dimensi ini secara nyata memperlihatkan wujud dan sumber ancaman asimetris, yang perang asimetris dapat dipicu oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi dan lainnya, seperti degradasi lingkungan (*environmental degradation*), pencurian kayu (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), penyelundupan manusia (*people smuggling*, *migrant smuggling*), perdagangan manusia (*illegal trafficking in persons*), kelangkaan sumber daya alam (*environmental scarcity*), ledakan jumlah penduduk, perubahan demografik (*demographic change*), besarnya beban hutang luar negeri yang tidak terkendali, kemiskinan, kelangkaan bahan pangan (*food scarcity*), kelaparan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, hak asasi manusia dan lain-lain. Terjadinya perang asimetris akan dapat menciptakan ancaman serius yang tidak dapat diabaikan terhadap keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan manusia secara luas, keamanan nasional, dan bahkan internasional.

113

Dalam menghadapi perang asimetris tersebut, kekuatan militer (*hard power*) bukan menjadi solusi yang proporsional karena medan peperangan dalam perang ini seringkali bersifat *intangibile*. Dengan kata lain, untuk memenangkan perang asimetris diperlukan keterlibatan seluruh *stake holder* di luar pihak

1. Steven METZ, *Asymmetric Warfare and the Future of the West*, 2003, dikutip dari http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_1_2003_METZ_ENG.pdf.

militer, yang bersatu padu memadukan segala sumber daya yang dimiliki secara bersama. Bagi pihak militer, kehadiran perang asimetris menuntut respons yang memadai, terutama dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tetap profesional melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

ANCAMAN TERHADAP NKRI

114 Seperti telah diungkapkan sebelumnya, dalam perang asimetris, pihak militer tidak hanya berhadapan dengan aktor negara, melainkan juga aktor non-negara, seperti kelompok teroris, separatis, dan kelompok lainnya. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan globalisasi, untuk melakukan aksinya karena didukung oleh kondisi bahwa mobilitas pemikiran/perintah tidak terhalang oleh batas geografis dan alam. Kelompok teroris menggunakan sarana komunikasi, internet dan fasilitas perbankan untuk memudahkan aksinya. Mereka mampu mentransfer sejumlah dana mengalir melalui transaksi di bank di seluruh dunia. Dengan menggunakan email, website, memungkinkan anggota jaringan teroris di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan efektif walaupun mereka tidak pernah bertemu (*face to face*). Melalui cara ini, mereka bisa melakukan indoktrinasi dengan efektif untuk mengajak melakukan suatu tindakan. Dalam rangka menyampaikan perintah pemimpin tidak perlu bertemu muka dengan anggota, tetapi cukup dilakukan dari tempat yang aman dan jauh, sehingga tidak terjangkau aparat.

Media dan teknologi informasi telah membuat perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi didorong oleh globalisasi akan meningkatkan interaksi kelompok teroris, separatis, kelompok anti pemerintah dan juga jaringan kejahatan internasional lainnya, sehingga memiliki

akses yang lebih besar terhadap informasi, teknologi, keuangan, pergerakan yang lebih canggih. Teknologi informasi juga memberikan kemungkinan kepada kelompok separatis dan teroris di tingkat lokal mengorganisasi operasi di tingkat global, dengan memanfaatkan kelompok politik yang terus menekan pemerintah. Kelompok tersebut menggunakan jasa internet, email, website yang mewujudkan kehadiran global untuk propaganda, menggalang pendukung baik personel maupun dana, dan menggunakannya secara terorganisasi.

Jaringan teroris dan separatis sangat sulit dipenetrasi karena berlandaskan ideologi dan fanatisme. Lain halnya dengan jaringan kriminal yang didasari oleh uang sehingga mudah untuk dihancurkan. Serangan-serangan melalui jaringan komputer sulit dilakukan pembalasan karena tidak jelas pihak yang mendukung dan mengontrol operasinya, kecuali ada pengakuan dari pelaku. Lawan tidak mungkin menyerang kekuatan militer, tetapi mereka akan menyerang sistem komputer bandara yang merusak sistem kontrol pesawat sehingga terjadi insiden dan pemerintah dipaksa harus menutup airport, yang tentunya akan merugikan negara, atau mengganggu sistem kontrol di luar negeri yang akan menghambat dunia usaha.

115

KONDISI SATUAN INFANTERI DALAM MENGHADAPI PERANG ASIMETRIS

Setelah membahas perang asimetris maka terdapat empat kecenderungan yang terpola dalam evolusi dari perang asimetris tersebut sebagai berikut:

Pertama, pencapaian *mission orders* akan cenderung semakin banyak ditentukan oleh aksi organisasi level bawah. Karena itu pengertian akan tujuan dari misi harus dimiliki oleh organisasi level terbawah sehingga mereka merespons perkembangan dengan secepatnya bertindak tanpa harus mengompromikan *mission orders* yang lebih besar.

116 Kedua, pergeseran unit terkecil harus mampu beroperasi secara mandiri dan tidak bergantung pada logistik terpusat. Setiap unit harus dapat hidup dari sumber daya alam dan sumber daya musuh yang berhasil dikuasai.

Ketiga, semakin pentingnya kemampuan manuver, dibandingkan jumlah ataupun *firepower*, mengingat konsentrasi massa dan *firepower* justru membuat semakin mudah untuk diserang. Di masa yang akan datang, pasukan yang kecil, berkemampuan manuver yang tinggi, cepat dan lincah akan mendominasi pertempuran.

Keempat, kecenderungan untuk menyerang lawan secara internal dengan menghancurkan kekuatan fisiknya. Hal ini bisa dicapai, antara lain dengan menekan basis politik, finansial dan material lawan agar tidak lagi memberikan dukungan pasukan lawan, atau bahkan menekan basis tersebut untuk menghentikan perang.

Keempat kecenderungan ini membuat perang asimetris akan menjadi perang tanpa bentuk yang jelas. Garis pemisah antara perang dan damai semakin menipis, dengan front non linear, bahkan mungkin tidak ada medan tempur yang dapat didefinisikan dengan jelas. Garis pemisah antara rakyat sipil dan militer semakin tidak jelas. Perang akan terjadi dalam

seluruh dimensi, termasuk pada dimensi kultural, maka perang psikologis menjadi salah satu dimensi yang sangat dominan. Pada level strategi, target peperangan pada generasi ini adalah menyerahnya motivasi pembuat kebijakan di pihak lawan, sehingga kemenangan strategis diperoleh dengan serangkaian serangan terkoordinasi dan simbolik melalui ragam cara untuk menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial budaya dan politik negara, yang akan meruntuhkan semangat perlawanan pemimpin politik negara.

Sistem Pertahanan Indonesia bersifat semesta mengacu dari Amanat UUD 1945 Pasal 30, dimana usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI, di mana sistem Pertahanan Negara dibangun dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik oleh kawan maupun lawan.

117

TNI adalah bagian dari komponen utama pertahanan yang menjalankan fungsi pertahanan menjabarkan UU No 3/2002 agar lebih operasional yang diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI di mana TNI mempunyai tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun jbaran dari UU No 34/2004 terdapat kendala dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dalam OMP maupun OMSP yang tidak ada rujukan teknis yang menjadi kewenangan TNI karena umumnya tugas-tugas tersebut bersifat bantuan yang

harus mempunyai legitimasi hukum sebagai payung hukum dalam implementasinya, padahal sesungguhnya tugas-tugas tersebut cukup bisa menjawab bagaimana menghadapi perang asimetris.

118 Dalam perjalanannya sesuai dengan trend yang semakin berkembang dan dinamis di mana perspektif ancaman semakin mengglobal, maka Pussenif Kodiklat TNI AD selaku LKT TNI AD dan penanggung jawab pembinaan latihan satuan infanteri perlu mengambil peran dengan membuat suatu terobosan yang inovatif dalam mengembangkan taktik dan teknik baik dalam OMP maupun OMSP dalam menghadapi perang asimetris tersebut, karena bila tidak maka kemampuan satuan operasional tidak akan mampu menjawab tantangan yang semakin tinggi. Program latihan yang disiapkan umumnya masih menggunakan doktrin dan taktik lama yang mengadopsi ilmu perang dari luar negeri seperti latihan pertahanan di daerah hampa atau kosong, pertahanan pantai, serangan dengan menyerang ketinggian dan latihan-latihan lain yang sudah digariskan dari komando atas, sehingga para Komandan Satuan kehilangan inisiatif untuk berinovasi karena program latihan yang digelar bersifat monoton dan membuat kejenuhan bagi prajuritnya yang tentunya berpengaruh kepada *skill* baik perorangan maupun satuannya.

Selain itu Pussenif Kodiklat TNI AD perlu juga belajar dari pengalaman beberapa negara yang sudah mengalami perang asimetris, di mana taktik dan teknik perang konvensional harus mulai ditata ulang menyesuaikan evolusi taktik bertempur yang semakin berkembang sesuai trend yang paling mutakhir. Ke depan program pelatihan tidak harus selalu bersifat given dari atas akan tetapi Pussenif Kodiklat TNI AD harus dapat memanfaatkan situasi untuk menggali pengalaman perwira-perwira muda yang memiliki pengalaman tugas dan sekolah, baik dalam maupun luar negeri

untuk memberikan masukan dalam merumuskan pelatihan yang sesuai dengan paradigma ancaman yang berkembang saat ini.

MENGANTISIPASI PERANG ASIMETRIS

Berangkat dari uraian tentang perang asimetris tersebut, maka trend perkembangan ancaman ke depan sudah tidak dapat lagi dihadapi dengan taktik dan teknik bertempur konvensional yang selama ini dipelajari dan dilatihkan yang merupakan bagian dari taktik dan teknik perang generasi kedua, di mana perimbangan kekuatan pasukan penyerang dan yang bertahan adalah 3:1 serta posisi-posisi pertempuran cenderung menghindari daerah pemukiman penduduk atau yang sering dilatihkan di satuan maupun di dalam lembaga pendidikan pelatihan di medan yang kosong atau tidak berpenduduk. Namun trend saat ini dihadapkan pada perkembangan global, musuh yang dihadapi adalah arena perang yang tersebar frontnya dan tanpa bentuk yang jelas, garis pemisah antara perang dan damai semakin menipis.

119

Perang ini akan menjadi perang dengan front yang non linier, bahkan mungkin tidak ada medan tempur yang terdefinisi dengan jelas maupun garis pemisah antara rakyat sipil dan militer semakin tidak jelas. Dari uraian di atas untuk mengantisipasi perang asimetris dihadapkan dengan perspektif ancaman yang semakin mengglobal disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, perlu suatu perubahan strategi, taktik dan teknik yang diawali dengan perubahan tentang payung hukum baik undang-undang maupun doktrin taktik bertempur TNI Angkatan Darat yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas pada

masa kini dan masa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki taktik pertempuran yang sudah dimiliki.

Kedua, bila telah terjadi revisi doktrin, maka Pussenif Kodiklat TNI AD selaku LKT mempunyai kewajiban untuk mampu mengembangkan taktik dan teknik baik OMP maupun OMSP yang lebih fleksibel menghadapi perkembangan dari trend yang berkembang.

120 Ketiga, penataan organisasi khususnya pada saat latihan maupun operasional tidak selalu terpaku TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan), tetapi bersifat kenyal dan berubah-ubah sesuai kebutuhan, sehingga satuan infanteri yang dilatih secara baik akan mempunyai keterampilan yang andal dan memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Keempat, perlu didukung logistik yang memadai baik alusista, sarana dan prasarana serta ransum dan memenuhi norma standar, sehingga para prajurit infanteri diharapkan tangguh serta mempunyai mobilitas yang tinggi.

Kelima, rekrutmen prajurit-prajurit infanteri harus benar benar selektif, terutama untuk unsur pimpinan karena kepemimpinan lapangan (*leadership*) yang baik dan pantang menyerah serta didukung kemampuan intelektual yang tinggi diharapkan akan mendukung keberhasilan tugas pokok satuan yang dipimpinnya.





“Di era perang asimetris abad 21 ini ada kecenderungan Si-lemah tidak perlu takut menghadapi Si-kuat sepanjang ada kemampuan untuk mengolah skill-level dan kualitas intelijen serta yang paling utama kemauan keras untuk menang. Tetapi yang paling penting sebaiknya kita menjaga jangan sampai timbul asymmetric enemy. Dalam konteks pertahanan menghadapi perang asimetris, yang paling efisien dapat dilakukan adalah diplomasi antara pihak yang berhadapan, hal ini lebih produktif daripada tindakan kekerasan yang menggunakan kekuatan militer walaupun diplomasi belum pasti dikehendaki oleh mereka yang sangat fanatik dan fundamentalis”



16.

PERTAHANAN MERESPONS PERANG ASIMETRIS

123

Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan yang lebih kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup dimensi militer semata, melainkan juga dimensi yang bersifat non-militer. Karakteristik ancaman juga mengalami perluasan dengan munculnya ancaman non-tradisional yang bersumber dari segala aspek kehidupan mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan aspek lainnya, di samping tetap hadirnya ancaman tradisional. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap karakter perang yang berkembang saat ini juga mengalami perubahan, sebagaimana dapat dilihat dari mengemukanya konsep *Revolution in Military Affairs* (RMA), peperangan generasi keempat (*fourth generation warfare*), dari perang asimetris (*asymmetric warfare*), yang menjadi bagian integral dalam transformasi pertahanan di banyak negara, dan memengaruhi berbagai dimensi dalam kehidupan militer, mulai dari kelembagaan/organisasi, teknologi, doktrin dan penggunaan kekuatan.

Negara Republik Indonesia dengan luas wilayah 1.922.570 Km², memiliki 17.504 pulau, dihuni oleh lebih dari 300 macam etnik

yang memiliki perbedaan agama dan adat istiadat, mengakibatkan Indonesia sangat beresiko menghadapi munculnya bahaya perang generasi keempat (*4th generation warfare*). Selain itu dengan kondisi politik dalam negeri Indonesia yang penuh tantangan konflik, belum tuntasnya pembongkaran jaringan terorisme dan masih eksisnya separatisme di beberapa daerah, sangat memengaruhi situasi keamanan dalam negeri, berpotensi menjadi pendorong meletusnya konflik asimetris yang dapat dikatakan suatu konflik yang menyimpang dari ukuran normal.

IMPLIKASI GLOBALISASI

Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah memengaruhi dinamika masyarakat dunia, mulai dari tingkatan individu hingga kelompok masyarakat yang lebih terstruktur, yaitu negara. Timbul perbedaan di kalangan masyarakat tentang pandangan dan responsnya terhadap dampak globalisasi. Sebagian kalangan merespons globalisasi secara cerdas, kreatif dan kritis, namun sebagian kalangan lainnya merespons secara eksklusif atau bahkan menolak secara total.

Dari respons ini, dapat dipetakan bahwa pandangan yang berkembang di antara kedua kelompok tersebut adalah yang satu memandang globalisasi sebagai tantangan, dan yang lainnya memandang globalisasi sebagai ancaman. Di satu sisi, globalisasi membawa kemudahan-kemudahan ekonomi yang kemudian membawa kemakmuran bagi banyak masyarakat dunia. Di sisi lain, globalisasi membawa dampak pada meluasnya kesenjangan ekonomi.

Bagi kelompok yang memandang negatif atau kontra, globalisasi dipandang telah membentuk sistem “*survival of the fittest*” yang kemudian melahirkan kelompok Sang Pemenang (*The Winner*) dan kelompok Sang Pecundang (*The Loser*) baik di tingkat negara, etnis, kelompok dan individu. Gempuran berlanjut dari Sang Pemenang kepada Sang Pecundang melahirkan Kelompok Sangat Marah (*The Angry Entity*) yang dapat mengalami polarisasi dan radikalisasi menjadi kejahatan transnasional, separatisme bahkan terorisme.

TIPOLOGI PERANG ASIMETRIS

125

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, dalam perang asimetris, pihak militer tidak hanya berhadapan dengan aktor negara, melainkan juga aktor non-negara, seperti kelompok teroris, separatis, dan kelompok lainnya. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan globalisasi, untuk melakukan aksinya karena didukung oleh kondisi bahwa mobilitas pemikiran/perintah tidak terhalang oleh batas geografis dan alam.

Dalam perang asimetris, kita akan diserang oleh lawan dari berbagai bidang yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer baik dari luar (internasional) maupun dalam negeri (domestik). Selain bentuk-bentuk ancaman yang sudah ada sebelumnya, seperti separatis, teroris, konflik komunal (SARA), kita juga akan menghadapi bentuk ancaman lain yang lebih halus dan sulit diidentifikasi, yang disebabkan oleh perbedaan politik, keresahan sosial, pengangguran, kelaparan, kemiskinan, kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang dieksploitasi oleh lawan. Berdasarkan pola pikir ini, maka analisis terhadap tipologi ancaman yang dihadapi Indonesia dipetakan sebagai berikut:

MATRIKS BENTUK ANCAMAN

No	Bidang	Bentuk Ancaman
1.	Ideologi	Radikalisme Penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa Konflik SARA
2.	Politik	Anarkisme, Pemberontakan. Kudeta Serangan terhadap objek vital nasional.
3.	Ekonomi	Kejahatan keuangan Kejahatan trans nasional Kelangkaan energi Korupsi Pencucian uang
4.	Sos-Bud	Konflik horizontal dan komunal Penyelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/ munisi) Bencana alam Bencana non-alam (kegagalan teknologi, kebakaran) Kerusuhan Pengrusakan lingkungan Kemiskinan, kebodohan, korupsi Pandemik
5.	Militer	Pelanggaran wilayah kedaulatan oleh militer asing Spionase Sabotase Penggunaan senjata kimia, biologi, radioaktif, nuklir, bahan peledak Blokade wilayah Kegiatan militer asing yang melanggar perjanjian Penggunaan tentara bayaran/kelompok bersenjata untuk kepentingan tertentu di wilayah Separatisme Pemberontakan bersenjata Terorisme Pembajakan bersenjata Kriminal bersenjata Penyanderaan bersenjata

Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut, baik yang bersifat aktual maupun potensial, pada prinsipnya menuntut adanya antisipasi dini, inisiatif dan respons yang proporsional, serta kemampuan lebih/khusus dalam penguasaan metode perang asimetris yang mungkin digunakan oleh pihak lawan, baik menyangkut teknologi, informasi, psikologi, dan lainnya. Untuk dapat berhasil mengatasi ancaman-ancaman tersebut, kolaborasi dan kerjasama, serta pola pikir non-konvensional senantiasa harus dikedepankan. Hal ini diperlukan agar untuk meniadakan *asymmetric enemy*.

127

KONSEPSI MENGHADAPI PERANG ASIMETRIS

Militer dalam merespons perang asimetris terdapat empat kecenderungan yang terpola sebagai berikut:

Pertama, pencapaian *mission orders* akan cenderung semakin banyak ditentukan oleh aksi organisasi level bawah. Karena itu pengertian akan tujuan dari misi harus dimiliki oleh organisasi level terbawah sehingga mereka merespons perkembangan dengan secepatnya bertindak tanpa harus mengompromikan *mission orders* yang lebih besar.

Kedua, pergeseran unit terkecil harus mampu beroperasi secara mandiri dan tidak bergantung pada logistik terpusat. Setiap unit harus dapat hidup dari sumber daya alam dan sumber daya musuh yang berhasil dikuasai. Di sini perlunya kemampuan perorangan yang tinggi.

Ketiga, semakin pentingnya kemampuan manuver, dibandingkan jumlah ataupun *firepower*, mengingat konsentrasi massa dan *firepower* justru membuat semakin mudah untuk diserang.

Di masa yang akan datang, pasukan yang kecil, berkemampuan manuver yang tinggi, cepat dan lincah akan mendominasi pertempuran, karena perang asimetris sangat tidak normatif.

Keempat, kecenderungan untuk menyerang lawan secara internal dengan menghancurkan kekuatan fisiknya. Hal ini bisa dicapai, antara lain dengan menekan basis politik, finansial dan material lawan agar tidak lagi memberikan dukungan pasukan lawan, atau bahkan menekan basis tersebut untuk menghentikan perang.

128

Keempat kecenderungan ini membuat perang asimetris akan menjadi perang tanpa bentuk yang jelas. Garis pemisah antara perang dan damai semakin menipis, dengan front non linear, bahkan mungkin tidak ada medan tempur yang dapat didefinisikan dengan jelas. Garis pemisah antara rakyat sipil dan militer semakin tidak jelas. Perang akan terjadi dalam seluruh dimensi, termasuk pada dimensi kultural, maka perang psikologis menjadi salah satu dimensi yang sangat dominan.

Pada level strategi, target peperangan pada generasi ini adalah menyerahnya motivasi pembuat kebijakan di pihak lawan, sehingga kemenangan strategis diperoleh dengan serangkaian serangan terkoordinasi dan simbolik melalui ragam cara untuk menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial budaya dan politik negara, yang akan meruntuhkan semangat perlawanan pemimpin politik negara.

STRATEGI MENGHADAPI PERANG ASIMETRIS

Dalam perjalanannya sesuai dengan trend yang semakin berkembang dan dinamis di mana perspektif ancaman semakin

mengglobal, maka perlu adanya konsep yang bersifat strategis dan inovatif, melalui pengembangan taktik dan teknik dalam menghadapi perang asimetris tersebut, terutama dengan mengembangkan pengalaman dari beberapa negara yang sudah mengalami perang asimetris. Amerika Serikat misalnya, sebagian di antaranya karena peran global, menjadikan aktor negara seperti Iran, Korea Utara dan Kuba maupun mereka yang memiliki kemampuan *cyber* seperti China dan Rusia sebagai ancaman asimetris.² Amerika juga masih menganggap kekuatan insurjensi yang sering dihadapinya di daerah “operasi kemanusiaan” seperti Afghanistan dan Iraq merupakan ancaman asimetris.³

129

Sementara itu China dan Rusia menganggap kekuatan domestik, misalnya Tibet dan Chechnya, sebagai ancaman asimetris. Di Indonesia, seperti di Barat, peperangan asimetris diakui sebagai taktik perang kaum lemah melawan pihak yang lebih kuat. Namun berbeda dengan Barat yang condong mencari solusi strategis, Indonesia memilih menafsirkan perang asimetris sebagai perang modern, yang memerlukan jawaban komprehensif, dan terutama dengan memperkuat pertahanan negara. Sebagian karena konstruksi geostrategis dan historis, solusi Indonesia untuk meredam perang asimetris adalah strategi kesejahteraan didukung keamanan.

Bagi Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, pada skala nasional tataran operasional:

- Menata ulang taktik dan teknik perang konvensional,

2. David E. Long, “Countering Asymmetrical Warfare in the 21st Century: A Grand Strategic Vision”, *Strategic Insights*, Volume VII, Issue 3 (July 2008)

3. Patrick Henrichon, “Protecting Canadian Forces against Asymmetric threats”, *the Canadian Military Journal* (Winter 2002- 2003)

menyesuaikan evolusi taktik bertempur yang semakin berkembang sesuai trend yang paling mutakhir. Selain itu perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan segenap komponen bangsa dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perang asimetris. Bagi TNI, kehadiran perang asimetris perlu direspons dengan cara melakukan penyesuaian doktrin, sistem dan metoda serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar lebih profesional dalam menghadapi lawan yang melakukan serangan non-konvensional. Hal ini karena dalam perang asimetris, tidak akan pernah bisa diperkirakan kapan, dengan cara apa, dan di mana lawan/musuh akan menyerang, serta apa yang akan dijadikan obyek sasaran. Untuk itu, apabila tidak bisa menyesuaikan, maka kita akan selalu terduduk meningkatkan kemampuan.

- Peran Komando Kewilayahan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Menjadikan pembinaan teritorial sebagai ujung tombak dalam menghadapi ancaman perang asimetris, Ipoleksosbud dan keamanan atau astra gatra dan memberikan saran kepada Menteri Pertahanan berupa konsep tindakan pada tataran operasional, serta kebijakan pada tataran yang lebih strategis, sehingga ancaman perang asimetris dampaknya dapat segera di eliminasi.
- Tataran kebijakan dan regulasi. Merealisasikan produk legislasi yang berkaitan dengan keamanan nasional sebagai arahan strategis untuk merespons permasalahan nasional pada skala luas.

Kedua, kawasan regional. Kerjasama regional adalah satu-satunya modalitas yang *feasible* untuk menghadapi peperangan

asimetris. Beberapa ancaman yang disebut di atas telah lama menjadi kecemasan bagi ARF, APEC, East Asian Summit, dan ASEAN. Namun solusi Asia Pasifik masih amat terbatas, titik paling jauh yang dihasilkan adalah CBM (*confidence building measures*), *preventive diplomacy*, serta berbagai bentuk kerja sama untuk peningkatan kapasitas negara (legislasi, kompetensi penegakan hukum, tukar-menukar informasi, *coordinated cooperation*, *community building*). Untuk itu perlu dipikirkan meningkatkan formula kerjasama di kawasan regional yang lebih menguntungkan dengan negara-negara tetangga atas dasar saling menghormati, kesetaraan, dan saling menghargai.

131

Akhirnya dalam era perang asimetris di abad 21 ini ada kecenderungan Si-lemah tidak perlu takut menghadapi Si-kuat sepanjang ada kemampuan untuk mengolah *skill-level* dan kualitas intelijen serta yang paling utama kemauan keras untuk menang. Tetapi yang paling penting sebaiknya kita menjaga jangan sampai timbul *asymmetric enemy*.

Dalam konteks pertahanan menghadapi perang asimetris, yang paling efisien dapat dilakukan adalah diplomasi antara pihak yang berhadapan. Hal ini lebih produktif daripada tindakan kekerasan yang menggunakan kekuatan militer walaupun diplomasi belum pasti dikehendaki oleh mereka yang sangat fanatik dan fundamentalis.







“Pemikiran kerja sama di bidang pertahanan Indonesia dan Singapura dipastikan selalu ada di benak para pemimpin kedua negara. Pemikiran kerja sama bidang pertahanan Indonesia dan Singapura bahkan ada dalam benak masyarakat di kedua negara, sebab kondisi geografi dan demografi kedua negara begitu dekat dan erat. Keduanya merasa perlu saling memelihara kenyamanan dan keamanan di antara dua negara jiran.”



17.

KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA-SINGAPURA

Tradisi bertetangga di kalangan masyarakat Indonesia adalah bagian dari sosio kultural. Maknanya, hubungan bertetangga perlu rukun dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah agar tercipta lingkungan yang damai, tanpa harus saling mencampuri urusan rumah tangga masing-masing.

135

Bulan Agustus sangat ideal bagi terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara Indonesia dan Singapura. Tahun ini kedua negara akan merayakan kemerdekaan yang istimewa. Indonesia akan merayakan Kemerdekaan ke-70, sementara Singapura akan merayakan Kemerdekaan Emas 50 tahun. Kedua negara telah melalui masa perjuangan panjang mengisi kemerdekaan dan sukses membangun negaranya.

Membangun suatu negara yang merdeka dalam era globalisasi dan demokrasi memerlukan tingkat integritas dan kapabilitas yang tinggi dan terbuka. Apalagi dalam konteks membangun hubungan di antara dua negara.

Indonesia dan Singapura telah menunjukkan bagaimana membangun hubungan yang dilandasi sikap saling mengerti, saling percaya, dan saling menghormati. Nyaris tidak ada

persoalan berat yang mengganjal hubungan di antara kedua negara.

Ke depan Indonesia dan Singapura perlu terus menjaga hubungan bertetangga yang saling menghormati dan saling memahami. Semua itu perlu dibangun dengan semangat kemitraan bertetangga. Artinya, hubungan ke depan harus saling menguntungkan kedua negara.

BIDANG PERTAHANAN

136

Tidak terkecuali tentunya di bidang pertahanan. Sebagai sebuah negara merdeka, tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara adalah suatu keniscayaan. Apalagi faham perang bagi kedua negara sangat jauh dari sikap ofensif. Pertahanan lebih ditempatkan dalam konteks menjaga keutuhan wilayah dan integritas negara yang berdaulat.

Prinsip yang dipahami oleh kedua negara dipastikan untuk menjadikan Indonesia dan Singapura menjadi negara yang kuat. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk saling membantu mengangkat martabat kedua negara.

Pemikiran kerja sama di bidang pertahanan Indonesia dan Singapura dipastikan selalu ada di benak para pemimpin kedua negara. Saya berpendapat, pemikiran kerja sama bidang pertahanan Indonesia dan Singapura bahkan ada dalam benak masyarakat di kedua negara. Mengapa? Karena kondisi geografi dan demografi kedua negara begitu dekat dan erat. Keduanya merasa perlu saling memelihara kenyamanan dan keamanan di antara dua negara jiran. Tentu tidak tertutup kemungkinan adanya faktor lain, antara lain tentunya hubungan ekonomi di mana kedua

bangsa merasakan manfaat yang saling menguntungkan.

Pada tahun 2007 kedua negara pernah membuat perjanjian kerja sama pertahanan. Saya ikut serta dalam proses pembahasan dan juga pelaksanaannya. Sebagai Wakil Menteri Pertahanan, saya bisa menangkap semangat yang ada pada diri Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura dalam menyusun kerja sama pertahanan saat mereka melakukan *retreat* di Istana Bogor, 13 Maret 2012. Saya mencoba menindaklanjuti kesepakatan itu dengan berkunjung ke Singapura untuk bertemu rekan-rekan saya di Kementerian Pertahanan Singapura guna membicarakan era baru bentuk kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura.

137

ERA BARU DCA

Saya melihat pentingnya Indonesia dan Singapura merumuskan pemikiran baru dalam kerja sama pertahanan, karena tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Menurut pendapat saya, kerja sama pertahanan yang perlu dilakukan harus lebih bersifat universal.

Kerja sama pertahanan yang lebih universal itu mencakup dua hal yaitu manusia sebagai pelaku dan peralatan militer sebagai penopang. Dari sisi manusianya, Indonesia dan Singapura harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan profesional dari para prajurit sebagai pelaksana sistem pertahanan.

Latihan bersama di antara kedua Angkatan Bersenjata bukan hanya akan meningkatkan kemampuan profesional, tetapi juga mendekatkan hubungan batin di antara para prajurit. Akhirnya, kita berharap akan ada rasa saling melindungi di antara keduanya.

Hal kedua yang bisa dilakukan adalah memperkuat industri pertahanan yang dimiliki. Indonesia dan Singapura secara bertahap harus menguasai teknologi industri pertahanan agar mampu lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan peralatan militer bagi kedua Angkatan Bersenjata. Fokus pada kerja sama pertahanan tanpa harus dikaitkan dengan nonpertahanan juga penting agar arah kerja sama tidak melenceng ke mana-mana. Pengalaman selama ini, penempatan kerja sama pertahanan di dalam kerja sama nonpertahanan justru membuat kerja sama pertahanan tidak bisa berjalan optimal.

138

Momentum untuk dilakukannya era baru kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura saya lihat ada setelah berlangsung Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Malaysia beberapa waktu lalu. Kita bisa mendorong pemimpin kedua negara untuk kembali melakukan *retreat*. Bahkan setelah itu para pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia dan Singapura bisa menindaklanjuti untuk merumuskan teknis kerja sama pertahanan yang diinginkan.

Saatnya Kementerian Pertahanan RI dan Ministry of Defence Singapura duduk bersama untuk menyusun format baru kerja sama bidang pertahanan yang lebih modern dan profesional. Sebaiknya ditinggalkan format lama yang tidak berkaitan dengan aspek pertahanan yang justru secara hukum memberikan beban internal bagi Indonesia.





“Komitmen kerja sama Indonesia-Tiongkok bidang pertahanan dan militer dalam formulasi memperkuat saling percaya atas dasar saling menghormati, saling pengertian dan menciptakan komunikasi yang tulus untuk mencegah terjadinya salah pengertian. Kedua lembaga militer, TNI dan PLA, perlu saling belajar meningkatkan profesi militer atas dasar saling membutuhkan.”

18.

DEKADE KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA – TIONGKOK

Perjalanan sejarah Indonesia-Tiongkok sangatlah panjang bahkan dimulai dengan 2000 tahun yang silam. Negara Tiongkok yang dikenal oleh Indonesia sebagai “Negeri Tirai Bambu” memulai hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok 13 April 1950 dan hubungan tersebut dengan cepat berkembang pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955 dan kulminasi autentikasinya ditandai dengan perjanjian persahabatan kebudayaan pada 1 April 1961. Walaupun pernah terjadi pasang surut tetapi semangat persahabatan tidak kunjung padam bahkan para Presiden RI di periodenya tampil menjadi pandu dalam memperluas rasa persaudaraan dan persahabatan kedua bangsa dan negara Indonesia-Tiongkok.

141

KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA-TIONGKOK

Di Jakarta pada tanggal 25 April 2005 menjadi awal hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kemitraan strategis yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Hu Jintao, pada peristiwa yang bersejarah justru pada saat peringatan 50 th Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Sepuluh tahun berikutnya, bertepatan dengan ulang tahun ke 60 Konferensi Asia-Afrika 2015, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jin Ping menyaksikan peningkatan hubungan ekonomi kedua

negara. Salah satu aspek penting dari fokus kemitraan strategis justru memperkuat kerjasama politik dan keamanan kedua negara dapat dikatakan bahwa tahun 2005 menjadi awal dekade terbaik bagi hubungan Indonesia-Tiongkok, khususnya kerja sama di bidang pertahanan.

ERA BARU KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN

142 Sejak tahun 2005 tanpa menunggu waktu, deklarasi kemitraan strategis di Jakarta segera direspons oleh Kementerian Pertahanan, dan PLA Tiongkok pada 9 Februari 2006 menyampaikan harapan kepada Kementerian Pertahanan RI untuk membahas kerja sama bidang pertahanan kedua negara.

Awal perjalanan kerja sama bidang pertahanan ditandai dengan pertemuan perdana di Jakarta oleh delegasi senior Kemhan Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Letjen Zhang Qinsheng, diterima oleh Menhan Yuwono Sudarsono dan Sekjen Kemhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan tersebut melakukan inventarisasi isu kerja sama antara lain hubungan strategis dan kerja sama pertahanan bilateral, isu keamanan regional, pertukaran informasi intelijen dan peningkatan *capacity building professional* industri pertahanan.

Sejak tahun 2006 hubungan kerja sama direalisasikan dengan melakukan *annual consultation meeting* secara bergantian di Jakarta dan Beijing sampai saat ini. Karenanya hubungan tidak hanya berbasis persahabatan tetapi lebih dari itu berlatar belakang persamaan kultur dari kedua negara dan bangsa. Itulah yang menjadi perekat hubungan kerja sama bidang pertahanan Indonesia -Tiongkok yang saya sebut spesifik.

Hubungan bilateral bidang pertahanan dan hal itu tidak hanya atas dasar persahabatan tetapi juga persaudaraan. Dari sudut pandang inilah kita bisa memetik manfaat *mutual respect* dan *mutual benefit* antara Indonesia-Tiongkok.

MEMBANGUN KERJA SAMA PERTAHANAN DAN MILITER

Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono pernah memberi pandangan bahwa kebangkitan Tiongkok merupakan suatu realita global yang bagi Indonesia tepat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengembangkan kerja sama ini dengan lebih memperluas pemikiran penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan secara diplomasi dan akses kerjasama teknologi dan industri pertahanan Indonesia - Tiongkok dalam pembuatan peluru kendali C-750 yang punya kemampuan sangat strategis.

143

Saya sejak tahun 2006 secara aktif merealisasikan penyelenggaraan hubungan dalam format Konsultasi Bilateral Bidang Pertahanan kedua negara yang bertujuan mengolahkembangkan berbagai peluang kerjasama bidang pertahanan mulai dari tingkat kementerian sampai tingkat matra angkatan bahkan hubungan personal pejabat dan prajurit.

KESEPAKATAN KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN

Tanggal 7 November 2007 merupakan realisasi komitmen dengan penandatanganan kerja sama oleh kedua Menteri Pertahanan RI-Tiongkok di Beijing yang mempunyai aspek luas di bidang peningkatan hubungan strategis, peningkatan kerja sama profesionalitas militer dan industri pertahanan.

Komitmen kerja sama Indonesia-Tiongkok bidang pertahanan dan militer dalam formulasi memperkuat saling percaya atas dasar saling menghormati dan saling pengertian dan menciptakan komunikasi yang tulus untuk mencegah terjadinya salah pengertian. Demikian pula kedua TNI dan PLA perlu saling belajar meningkatkan profesi militer atas dasar saling membutuhkan. Kedua negara bersepakat menjalin kerja sama untuk memelihara jalur pelayaran strategis yaitu selat Malaka, selat Lombok dan selat Sunda, atas dasar *Mutual Respect on Sovereignty and Teritorial Responsibility*.

144

Implementasi kerja sama bidang pertahanan kedua negara sangat kental dengan intensitas hubungan personel yang akrab dari semua tingkat jabatan mulai dari menteri selaku *decision maker* dan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Kepala Staf Umum PLA serta para pejabat tinggi dan perwira bahkan sampai kepada para prajurit lapangan pada saat latihan bersama atau *on the job training*. Suatu keadaan yang bisa mempresentasikan hangat dan akrabnya kedua negara Indonesia-Tiongkok. Inilah aplikasi konkrit hubungan personal dalam kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok.

ISU SPESIFIK

Beberapa isu spesifik terkait hubungan kerja sama Indonesia – Tiongkok antara lain sebagai berikut :

- Kebijakan *One China Policy* secara tegas dan lugas disampaikan oleh delegasi Indonesia pada setiap forum konsultasi bilateral.

- Laut Tiongkok Selatan merupakan isu hangat tetapi bagi Indonesia disikapi secara *cool* dan *wise* bahwa negara yang punya kaitan teritorial di kawasan Laut China Selatan hendaknya diselesaikan secara bilateral dengan Tiongkok melalui dialog perundingan tanpa menggunakan kekerasan militer untuk menciptakan kawasan yang stabil dan damai. Penilaian Indonesia ini direspons positif dan konstruktif oleh pihak Tiongkok. Pertemuan inilah yang perlu diperhatikan dan dikelola oleh kedua negara dalam kerja sama pertahanan. Dengan kata lain Indonesia mendorong agar stabilitas keamanan laut tercapai dengan mencermati *freedom of passage* dan *freedom of navigation*. Indonesia penuh harapan mekanisme penyelesaian Laut Tiongkok Selatan melalui jalur diplomasi dapat terealisasi dengan mengimplementasikan DOC (*Declaration of Conduct*) dan mewujudkan CoC (*Code of Conduct*). 145
- Industri pertahanan merupakan suatu modalitas untuk dikembangkan oleh kedua negara dengan harapan perusahaan industri pertahanan Indonesia dapat diikutsertakan kerja sama dengan industri pertahanan Tiongkok khususnya dalam alih teknologi. Beberapa industri pertahanan Tiongkok sudah bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia seperti PT. Pindad dan PT. PAL. Kedua negara sudah menandatangani *Letter of intent for Development and Production cooperation of Anti Ship Sea Defence Weapon System* antara Kemhan dengan SASTIND. Kerjasama ini perlu dilanjutkan dengan pola *joint production*.

MEMANTAPKAN *Military to Military*

146 Berbagai kerja sama Mil to Mil (*Military to Military*) yang telah dan akan dilakukan yang bersifat "hard power" antara lain latihan bersama Kopassus TNI-AD dengan Kopassus Tiongkok dengan sandi "*Sharp Knife*", latihan kerja sama antara TNI AU dengan AU Tiongkok dengan sandi "*Sharp Knife Airborne 2013*". Pada matra laut juga dilaksanakan oleh pasukan katak TNI-AL dengan pasukan khusus AL Tiongkok pada uji ketangkasan latihan multilateral memperingati 63 th Angkatan Laut Tiongkok 2014 di Qingdao, Tiongkok.

Pada aspek *soft power* juga dilaksanakan kegiatan forum komunikasi bilateral antar matra untuk mengikuti pendidikan, seminar. Hal yang menarik adalah penyelenggaraan *Navy to Navy Cooperation Talk* antara TNI-AL dan AL Tiongkok untuk memberikan issue profesionalisme.

Indonesia sangat sering melakukan muhibah kapal perang pada dekade 2005-2015 ke Tiongkok, sebaliknya AL Tiongkok melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengirim *Peace Ark* kapal Hospital ke Nusa Tenggara pada 2013 untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, demikian juga kapal rumah sakit AL Tiongkok RSCPPLA ke dermaga Tanjung Priok 2013 sebagai wujud persahabatan TNI AL dengan AL Tiongkok. Beberapa kapal perang AL Tiongkok juga merapat ke Tanjung Priok pada Tahun 2010-2012.

PENINGKATAN HUBUNGAN STRATEGIS

Hubungan kerja sama bidang pertahanan Indonesia-Tiongkok meningkat sejalan peningkatan status hubungan bilateral menjadi

Kemitraan Strategis Komperhensif saat kedatangan Presiden Xi Jin Pin pada 3 Oktober 2013 di Jakarta. Dari sisi pertahanan, kedua Menteri Pertahanan berkomitmen lebih memperluas kerja sama pertahanan dan militer secara lebih menyeluruh. Penyelenggaraan kerja sama tersebut dalam bentuk komite bersama bidang pertahanan untuk mematangkan pelaksanaan peningkatan kerja sama yang telah disepakati dalam konteks intelektualisasi.

Dari sisi intelektualisasi pada 9th *International symposium on Sun Tzu's Art of War* di Qingdao 2014, saya sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, memperoleh kesempatan menyampaikan pemikiran strategis Sun Tzu dalam perspektif Indonesia, mengingat filosofi Sun Tzu tidak hanya dapat diaplikasikan dari sisi militer tetapi juga dapat diaplikasikan dari sisi politik, ekonomi dan sosial. Hal itu menunjukkan bahwa filosofi Tiongkok juga sinkron dengan filosofi budaya Indonesia.

147

Pada tahun 2015, genaplah satu dekade hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok di bidang pertahanan sebagai bagian dari hubungan bilateral kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Akan sangat baik dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dan kunjungan Presiden Xi Jin Ping ke Indonesia lebih memperkuat kemitraan untuk merealisasikan berbagai pemikiran yang bermanfaat bagi kedua bangsa atas dasar persahabatan dan persaudaraan yang saling menghormati antara Indonesia-Tiongkok.



“Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”

19.

PERLUNYA SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Perubahan dalam *landscape* global, regional dan nasional tentu juga mengubah perkiraan ancaman dan cara mengatasinya. Potensi ancaman pada saat ini bukan lagi datang dari serangan militer dari negara lain, melainkan kegiatan terorisme, gerakan separatis, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang berkaitan dengan sumber daya alam dan bersifat multidimensional. Ancaman tidak hanya bersumber dari aksi-aksi aktor negara, tetapi juga dapat hadir dari aksi-aksi aktor non negara. Karakter perang yang berkembang saat ini juga mengalami perubahan menjadi model peperangan non konvensional, non linear atau asimetris (*Asymmetric warfare*). 149

Perang asimetris bersifat multi-dimensional dan berlangsung dalam berbagai sektor, dapat dipicu oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi dan lainnya. Persinggungan atau akumulasi dari aspek-aspek ini akan memengaruhi intensitas dan derajat ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, perang asimetris bersinggungan dengan berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan manusia secara luas (*human security*), keamanan nasional dan bahkan internasional. Bentuk ancaman bertambah dari separatis, teroris,

konflik komunal (SARA) yang sudah kita miliki sebelumnya, bertambah dalam bentuk ancaman lain yang lebih halus dan sulit diidentifikasi, yang disebabkan oleh perbedaan politik, keresahan sosial, pengangguran, kelaparan, kemiskinan, kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang dieksploitasi oleh lawan.

SI VIS PACEM PARA BELLUM

150 Memang kadang muncul pertanyaan, apakah perlu kita melakukan modernisasi alutsista? Pertanyaan itu muncul karena menganggap bahwa tidak mungkin lagi akan ada perang.

Tidak ada satu pun negara yang tidak menginginkan perdamaian. Semua negara pasti berupaya mencegah terjadinya perang, karena tahu bahwa perang akan menyengsarakan rakyat. Namun kita melihat tidak ada negara yang lalu duduk tenang-tenang, tidak memperkuat angkatan perangnya. Banyak negara memperkuat industri pertahanan karena ingin memiliki angkatan perang yang bisa diandalkan.

Tidaklah mungkin ada negara yang menunggu terjadinya perang, baru kemudian mempersiapkan angkatan perang mereka. Sebab, membangun sistem pertahanan negara tidak bisa dilakukan seketika, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan postur sistem pertahanan yang diinginkan.

Kita mengenal prinsip "*si vis pacem para bellum*", apabila kita menginginkan perdamaian, maka kita harus siap berperang. Prinsip itu hendaknya jangan dipahami berlebihan, melainkan suatu langkah strategis yang proporsional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita yang menjadi opsi formulasi

pembangunan kekuatan pertahanan.

Salah satu inti Pembukaan UUD 1945 secara jelas memberi tugas kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa melalui alat pertahanan negaranya. Perintah itu diterjemahkan dengan membangun kekuatan militer yang memiliki mobilitas tinggi dalam melakukan daya tangkal dan daya pukul.

EKSISTENSI NEGARA YANG BERDAULAT

151

Mencermati kecenderungan yang terjadi pada abad ke 21 dan tendensi perang asimetris, maka ke depan diperkirakan ancaman yang akan makin mengemuka dan menjadi ancaman nyata adalah praktek-praktek hegemoni, tekanan ekonomi dan politik, serta penggunaan teknologi dan informasi, dan nilai-nilai sosial budaya untuk menguasai negara lain, diperkirakan akan menjadi bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi di masa mendatang.

Adapun kepentingan strategis pertahanan Indonesia adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan nasional. Oleh karena itu, pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi negara yang berdaulat dari setiap ancaman yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri.

MISI PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah

melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara.

Upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah. Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, bahwa pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

152

Makna yang terkandung dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta adalah bahwa rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara pada dasarnya perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya.

SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Sistem Pertahanan

Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem Pertahanan Semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun secara terus-menerus sejak masa damai sampai masa perang.

Postur pertahanan negara merupakan wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang mencerminkan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan pertahanan negara. Postur pertahanan negara mengintegrasikan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan pertahanan militer serta kekuatan, kemampuan, dan penyebaran pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan terpadu. Postur pertahanan negara dibangun dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Pembangunan postur pertahanan militer menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan.

153

Pembangunan postur pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab pemerintah melalui koordinasi antara Menteri/Kepala LPND dan Menteri Pertahanan. Pembangunan postur pertahanan negara sangat tergantung pada anggaran pertahanan negara yang dialokasikan pemerintah, namun tidak berarti bahwa postur pertahanan dibangun atas dasar alokasi anggaran. Penyusunan postur pertahanan negara bersifat jangka panjang dan didasarkan atas visi negara di tengah-tengah persaingan global. Dalam konteks ini postur pertahanan negara disusun untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dalam 20 tahun ke depan yakni sampai tahun 2029.

Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer. Tentara Nasional Indonesia mendinamisasi pertahanan militer sebagai lapis utama pertahanan negara untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Pertahanan militer dalam melaksanakan OMP didasarkan atas keputusan politik melalui pengerahan kekuatan oleh presiden. Dalam melaksanakan OMP, TNI mengembangkan strategi militer sesuai dengan hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia serta sumber daya pertahanan yang tersedia. OMP yang diselenggarakan TNI dikemas dalam keterpaduan tiga matra (Tri Matra Terpadu). Dalam menyelenggarakan OMP, TNI menggunakan segenap komponen pertahanan negara yang terdiri atas Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Dalam kerangka pertahanan militer, TNI menyelenggarakan perencanaan strategis dan operasi militer, membina profesionalisme organisasi dan kekuatan TNI, serta memelihara kesiapsiagaan operasional. Gelar kekuatan TNI merupakan bagian vital dari upaya pertahanan militer, yang pelaksanaannya didasarkan pada pertahanan sebagai fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan.

Dalam rangka itu, TNI digelar di seluruh wilayah Indonesia secara kenyal berdasarkan strategi pertahanan. Gelar kekuatan TNI di daerah tidak berdasarkan struktur dan gelar instansi pemerintah, tetapi didasarkan pada strategi pertahanan dan strategi militer untuk kepentingan penangkalan dan pelaksanaan operasi militer. Oleh karena itu, kekuatan TNI yang digelar di daerah bukan merupakan kekuatan organik daerah yang bersangkutan.

Dalam gelar kekuatan TNI tidak mengenal kekuatan organik dan kekuatan non-organik. Kekuatan TNI adalah organik di seluruh wilayah Indonesia, bukan pada suatu daerah berdasarkan batas wilayah administratif sebagaimana ditentukan dalam otonomi daerah. Gelar kekuatan TNI dilaksanakan oleh TNI pada masa damai dan pada keadaan perang. Gelar kekuatan TNI diselenggarakan berdasarkan strategi pertahanan negara dan kekenyalan pelaksanaan strategi militer. Gelar kekuatan TNI pada masa damai ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal pertahanan, diproyeksikan ke dalam gelar secara Tri Matra Terpadu. Pertahanan negara adalah fungsi pemerintahan yang tidak diotonomikan. Maka wilayah gelar kekuatan TNI adalah seluruh wilayah Indonesia.

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter. "Bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara" (*Amanat Pangsar Jenderal Soedirman diucapkan di hadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945, di MT-TKR Yogyakarta*).

Fungsi pertahanan nirmiliter yang diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2) dalam menghadapi ancaman militer.

INSTRUMEN PENANGKALAN

Bagi Sistem Pertahanan Negara kita yang terdiri dari pertahanan militer dan nirmiliter, kita kenal beberapa instrumen penangkalan yang dominan, yaitu instrumen militer bagi pertahanan militer, dan bagi pertahanan nirmiliter tersedia instrumen politik, ekonomi, psikologis dan teknologi. Disadari mewujudkan daya tangkal perlu biaya besar, tapi ongkos membiayai perang bahkan akibatnya akan jauh lebih besar, namun yang terpenting melindungi kepentingan nasional dan martabat bangsa tetap terjaga.

156

Instrumen militer, kita tengah membangun kekuatan militer yang memiliki daya tangkal memadai pada kekuatan matra darat, laut dan udara, walaupun penggunaan kekuatan militer TNI merupakan jalan terakhir.

Instrumen politik, merupakan refleksi bagi sistem pemerintahan demokrasi di mana kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan yang diperuntukkan oleh para pelaku diplomasi yang kredibel dan memiliki reputasi internasional.

Instrumen ekonomi, sebagai pilar kelangsungan hidup bangsa yang merupakan faktor vital yang dipunyai Indonesia dan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi bagi kebutuhan negara lain.

Instrumen psikologis, nasionalisme dan patriotisme dari semua lini bangsa termasuk peran komunikasi media dalam menimbulkan militansi bangsa dan bela negara.

Instrumen teknologi, kita sudah saatnya tampil membangun daya tangkal teknologi dengan rekayasa produksi alutsista yang kita kembangkan dalam negeri. Pasokan teknologi militer yang

kita bangun pasti memberi daya tangkal bangsa.

Disadari bahwa membangun kekuatan militer merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat mutlak bagi bangsa Indonesia sebagai bagian dari instrumen pertahanan. Oleh karena itu, mengedepankan kekuatan diplomasi tidak boleh diartikan “berjalan sendiri”, tapi perlu diimbangi dengan “peran dan siasat” dari instrumen lainnya, agar menghasilkan suatu resultan yang optimal. Ada baiknya semua pemangku kepentingan instrumen penangkalan selalu duduk bersama dalam menentukan “peran dan siasat” yang diambil untuk menghadapi fenomena dan dinamika sebagai akselerasi terobosan dalam meningkatkan sistem pertahanan negara.

157







“The Art of War adalah suatu konsep berpikir berupa strategi berperang yang telah terbukti bersifat aktual dan tetap aplikatif dari waktu ke waktu. Aktual karena strategi Sun Tzu selalu cocok dengan perkembangan peradaban manusia maupun dengan perkembangan teknologi perang dan dapat dipakai di berbagai wujud peperangan. Teori Sun Tzu bahkan sangat cocok dipakai di era perang irregular, seperti perlawanan Non State Actor terhadap kekuatan yang besar. Strategi Sun Tzu dapat diaplikasikan oleh para ahli strategi dari berbagai bangsa. Dari persepsi Indonesia, Teori Sun Tzu itu telah diimplementasikan dalam dunia militer dan bisnis semenjak berdirinya Republik Indonesia.”

20.

SUN TZU'S WAR STRATEGY: PERSPEKTIF INDONESIA

161

Literatur dari Tiongkok telah lama di kenal di Indonesia. Penjajah Belanda dan Inggrislah yang membawa terjemahan buku-buku filosofi dari Tiongkok ke Indonesia sejak abad 18-an. Presiden Pertama RI, Soekarno misalnya, kerap menyebut nama tokoh-tokoh pergerakan Tiongkok ketika ia aktif berpidato. Secara spesifik, Presiden Soekarno tidak pernah menyebut nama Sun Tzu, namun beberapa ungkapan kunci tentang strategi militer, seperti “rebut hati dan pikiran rakyat, kuasai logistik musuh, kuasai persenjataan musuh”, menunjukkan bahwa ia pernah membaca buku tentang Sun Tzu. Paling tidak ia belajar dari gurunya, seorang *Founding Fathers* Indonesia bernama HOS Tjokroaminoto.

Teori Sun Tzu kembali berkembang pesat pada penghujung tahun 1990-an seiring dengan terbukanya akses informasi melalui internet. Era reformasi 1998 mendorong publikasi bebas, literatur asing telah menjadi bagian perpustakaan publik. Buku *The Art of War* versi bahasa Indonesia kini dijual bebas di toko buku dan telah banyak seminar di Indonesia yang mengangkat teori Sun Tzu sebagai strategi bisnis yang jitu.

JUSTIFIKASI TEORI SUN TZU DI INDONESIA

162

Walaupun tidak secara transparan, pada umumnya para pemimpin militer Indonesia, dengan doktrin teritorialnya telah menerapkan strategi Sun Tzu. Demikian pula dengan kegiatan intelijen penggalangan “ *to win the heart and mind of the people*”. Hal ini menunjukkan bahwa teori Sun Tzu memang telah lama dikenal di Indonesia, dalam bentuk implementasi di lapangan. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1947-1949, tokoh terkemuka dalam perang gerilya Indonesia adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dalam bergerilya beliau dikenal sangat menghormati hak-hak dan harta benda rakyat.

Panglima Besar Jenderal Soedirman yakin bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas himpunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapa pun juga.

Bagi Panglima Besar Jenderal Soedirman, rakyat dan tentara itu bagaikan air dan ikan, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Integritas, kesederhanan, semangat juang dan sikap pantang menyerah terhadap ultimatum Belanda yang secara fisik ditunjukkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman telah membuat anak buah dan rakyat rela berkorban untuk membela perjuangannya. Rakyat telah menjadi pelindung dan sekaligus mata telinga para pejuang yang sedang bergerilya di hutan sekitar perkampungan. Bekal logistik untuk mendukung anak buahnya juga berasal dari lumbung rakyat yang terpaksa harus dibeli dengan uang hasil penjualan perhiasan istrinya. Tindakan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang tidak pernah merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat telah

mengilhami TNI untuk menjadikannya contoh dalam membina wilayah teritorial di masa damai.

Strategi Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman menunjukkan suatu justifikasi penerapan teori Sun Tzu di lingkungan militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Pada tahun 1970-an, beberapa komandan satuan dalam melaksanakan pembinaan satuan sudah mulai menjadikan teori Sun Tzu sebagai referensi memimpin pasukan. Ajaran Sun Tzu yang paling populer waktu itu misalnya *“Ketahuilah musuhmu dan kenalilah dirimu, maka engkau akan menang dalam seratus kali pertempuran”*.

163

Pada tahun 2009 secara formal teori Sun Tzu baru diajarkan sebagai referensi kurikulum strategi di Universitas Pertahanan Indonesia. Tahun 2013 teori Sun Tzu mulai dikenalkan kepada siswa Sesko Angkatan.

Banyak teori Sun Tzu yang dapat diaplikasikan dalam dunia militer, bisnis, sport dan pendidikan, namun di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh teori yang cocok untuk dunia militer, politik dan bisnis di Indonesia sebagai berikut :

DI DUNIA MILITER INDONESIA

Dalam memenangkan hati dan pikiran rakyat di suatu wilayah, TNI melaksanakan strategi pembinaan teritorial. Kegiatan Binter sama sekali tidak menggunakan alat peralatan perang, namun sebaliknya prajurit TNI hanya “menggunakan“ alat peralatan petani, tukang, alat bantu pendidikan dan kelengkapan sipil lainnya untuk memberdayakan wilayah pertahanan.

Adapun sasaran pembinaan teritorial adalah terwujudnya Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan” yang meliputi: Kemampuan Temu Cepat dan Laporan Cepat, Kemampuan Manajemen Teritorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat dan Kemampuan Komunikasi Sosial.

164 Tercapainya 5 sasaran Binter yang tidak lain sama dengan tercapainya penguasaan suatu wilayah geografi lengkap dengan penduduknya dengan cara membantu mengatasi kesulitan masyarakat tanpa menggunakan alat peralatan perang menunjukkan justifikasi terhadap aplikasi teori Sun Tzu “*A Great General Wins Without Battle.*”

DI DUNIA POLITIK: MENYELESAIKAN KONFLIK ACEH.

Bencana Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 telah mengubah strategi TNI yang tadinya datang untuk bertempur kemudian beralih menolong rakyat. Hal ini mengubah perlawanan separatis GAM menjadi tidak berdaya sehingga kedua belah pihak menghentikan pertempuran. Pada tanggal 15 Agustus 2005, bertempat di Helsinki, Finland kedua pihak menandatangani MoU untuk mengakhiri konflik di Aceh. GAM pada akhirnya menerima otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Di dunia bisnis Indonesia: *A great General Wins Without Battle* diaplikasikan dengan strategi “Merebut pasar tanpa merusaknya”. Sun Tzu berkata: “Umumnya dalam suatu perang, kebijakan terbaik adalah untuk mengambil keadaan secara utuh; merusaknya adalah lebih rendah daripada itu”. Sun Tzu juga mengatakan, “untuk memenangkan seratus kemenangan dalam seratus pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Untuk menaklukkan musuh tanpa pertempuran adalah puncak keterampilan”.

Demikian pula dalam bisnis. Karena tujuan dari bisnis adalah untuk bertahan hidup dan berkembang, maka kita harus merebut pasar. Namun, kita harus melakukannya sedemikian rupa sehingga pasar tidak hancur dalam proses merebutnya. Sebuah perusahaan dapat melakukan hal ini dalam beberapa cara, seperti menyerang bagian pasar yang kurang terlayani atau dengan menggunakan pendekatan halus, tidak langsung, pada pangsa pasar yang rendah yang tidak akan menarik perhatian pesaing. Apa yang harus dihindari di semua langkah ini adalah perang harga. Penelitian telah menunjukkan bahwa serangan dengan membanting harga yang terlalu cepat akan mendapat tanggapan agresif dari pesaing, serta meninggalkan pasar tanpa keuntungan. Contohnya adalah bagaimana baju batik tulis dengan kualitas tinggi dan harga yang memang relatif mahal mampu merebut pasar di tanah air sendiri, mengalahkan baju-baju *import*. Demikian pula dengan produk kerajinan tangan dan kuliner asli Indonesia yang telah tumbuh dengan nama dagang unggulan (*branded*) tanpa merusak pasar tradisional.

HINDARI KEKUATAN PESAING BISNIS ANDA, DAN MENYERANG KELEMAHAN MEREKA

Sun Tzu berkata: "Pasukan tentara bisa diibaratkan seperti air, yang mengalir berkelok menghindari ketinggian dan mengalir deras menuju dataran rendah, sehingga strategi yang dikembangkan adalah menghindari kekuatan dan menyerang titik lemah/*Center of Gravity*".

Cara berperang Barat seringkali digunakan dalam persaingan bisnis, hal ini menyebabkan banyak perusahaan memulai serangan bisnisnya secara langsung terhadap titik terkuat pesaing bisnis mereka. Pendekatan ini membuat strategi bisnis mengarah

ke pertempuran gesekan, yang akan berakhir dengan ongkos yang sangat mahal bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, dengan pendekatan Sun Tzu, maka kita harus fokus menyerang kelemahan kompetitor, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan penggunaan sumber daya.

“Kenalilah musuhmu dan kenalilah dirimu, niscaya anda akan berjaya dalam ratusan pertempuran (*if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles*).”

166

Dalam setiap pelaksanaan latihan tempur para prajurit diharapkan mampu menganalisis 5 aspek medan di hadapan pada faktor TUMMPAS (Tugas, Medan, Musuh dan Pasukan Sendiri) untuk menentukan cara bertindak terbaik dan mampu melaksanakan Prosedur Pimpinan Pasukan (P3). Dalam proses analisis situasi dengan menggunakan pendekatan TUMMPAS, jelas terlihat bahwa dalam pertempuran, kemampuan untuk mengenal musuh dan pasukan sendiri sangat penting guna mencapai keberhasilan suatu pertempuran.

Dalam asas perang Indonesia, disebutkan bahwa perang di masa datang mengandalkan keunggulan informasi dan teknologi. Keunggulan informasi diperoleh melalui usaha mengembangkan kemampuan dalam menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis serta situasi dalam negeri sehingga terwujud keunggulan informasi secara akurat dan berlanjut. Sun Tzu menjelaskan dalam prinsip pertama bahwa ada lima faktor penting yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan mempelajari peperangan, yaitu politik, cuaca, medan, pimpinan dan doktrin. Kelima hal tersebut dapat disebut sebagai situasi strategis terkait lingkungan, aktor dan kebijakan. Kelima aspek

strategis (situasi strategis) merupakan faktor-faktor yang harus dipahami. Pemahaman dapat dilakukan apabila tersedia informasi yang memadai, yang dapat dilakukan melalui intelijen maupun sumber-sumber pengetahuan terbuka lainnya.

LESSON LEARNED

***The Art of War* adalah suatu konsep berpikir berupa strategi berperang yang telah terbukti bersifat aktual dan tetap aplikatif dari waktu ke waktu.** Aktual karena strategi Sun Tzu selalu cocok dengan perkembangan peradaban manusia maupun dengan perkembangan teknologi perang dan dapat dipakai di berbagai wujud peperangan. Teori Sun Tzu bahkan sangat cocok dipakai di era perang irregular, seperti perlawanan *Non State Actor* terhadap kekuatan yang besar. Strategi Sun Tzu dapat diaplikasikan oleh para ahli strategi dari berbagai bangsa. Meskipun Sun Tzu lahir dari budaya Timur, para ahli strategi Barat bahkan mengawinkan strategi Sun Tzu dengan strategi perang Clausewitz pada berbagai tahap operasi militer mereka. Di Indonesia, khususnya di Universitas Pertahanan dan pendidikan Sesko Angkatan, strategi Sun Tzu telah dipakai sebagai salah satu referensi dalam kurikulum strategi.

167

***The Art of War* selalu menginspirasi terciptanya pikiran-pikiran segar dalam menyusun strategi militer dan bisnis pada masa kini dan mendatang.** Keindahan kalimat Sun Tzu yang sarat dengan makna yang dalam seringkali mengilhami para ahli strategi dalam menemukan solusi suatu masalah. Sun Tzu sangat piawai mengibaratkan watak manusia dengan alam, watak tentara dengan air yang mengalir, sehingga ajarannya mudah dimengerti. Di Indonesia, kalimat syair, pantun dan mantra acapkali menjadi pola berpikir bangsa Indonesia. Demikian juga kata-kata mutiara

dan amanat tokoh terkenal telah menjadi bagian dari trik untuk memecah kebuntuan dalam berkomunikasi verbal.

The Art of War selalu menekankan pentingnya suatu strategi dan tidak sekedar taktik. Sun Tzu berkata: **“Strategi tanpa taktik adalah rute paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan”** (*Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat*). Keberhasilan strategi modern selalu diukur dengan 3 hal yaitu apakah formulasi strategi tersebut sesuai, dapat diterima dan memungkinkan untuk dilaksanakan? Agar dapat memenuhi ketiga syarat tersebut maka penyusunan strategi dibuat secara hirarki dan dilaksanakan sesuai rantai komando. Sebagai contoh adalah bagaimana Kementerian Pertahanan menyusun konsep kebijakan pertahanan untuk dijabarkannya menjadi strategi pertahanan, doktrin dan postur pertahanan serta buku putih pertahanan. Selanjutnya secara hirarki produk strategis tersebut dijadikan landasan bagi TNI dan organisasi operasionalnya untuk menyusun strategi militer dan strategi operasional lainnya.

The Art of War adalah pisau analisis yang tajam untuk membantu penyusunan suatu kajian di bidang keamanan dan bisnis. Dalam dunia militer dan bisnis, langkah analisis dapat dimulai dengan seksama dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan lawan utama kita. Sebagai contoh adalah analisis model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*). Dalam analisis SWOT, di luar kekuatan dan kelemahan ada juga peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman adalah faktor berpengaruh yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri atau di luar suatu perusahaan. Untuk menganalisis apakah sebuah strategi ofensif akan menjamin kemenangan, Sun Tzu mengajarkan agar

selalu memperhatikan faktor moral, disiplin, kepemimpinan, cuaca dan medan di samping 9 situasi klasik.

***The Art of War* mengingatkan para pemimpin untuk selalu melakukan langkah persiapan.** Sun Tzu berkata :”Prajurit jagoan itu menang dahulu baru kemudian pergi berperang, sementara prajurit pecundang itu pergi berperang dahulu baru kemudian berusaha untuk menang”. Penentuan keberhasilan itu ditentukan dalam persiapan yang mendetail dan tidak dalam eksekusi akhir. Dalam suatu rencana operasi militer bahkan disebutkan bahwa persiapan itu adalah $\frac{2}{3}$ dari kemenangan yang harus dilakukan untuk menghindari kefatalan. Perencanaan yang mendetail juga memerlukan geladi, *rehearsal* dan uji coba agar dalam pelaksanaan sebenarnya kita tidak kehilangan momentum yang dapat membawa kerugian/ korban.

169

The Art of War seperti doa Sapujagat, karena bersifat universal dan fleksibel. Paling tidak ada 2 asas berperang yang sangat khas TNI yang sejalan dengan teori Sun Tzu, yaitu pantang menyerah dan rela berkorban.

Pertama adalah asas pantang menyerah. Sun Tzu berkata: “Lari untuk bertempur di lain waktu”. Tentara Nasional Indonesia menerapkan salah satu taktik pertempuran dengan melakukan pengunduran dan konsolidasi. Pengunduran pasukan dilakukan manakala sesuai penilaian dan pertimbangan bahwa seluruh rencana aksi akan mengalami kegagalan. Doktrin TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan pernah menyerah dalam situasi apapun baik dalam pertempuran maupun tugas-tugas yang dilimpahkan oleh negara. TNI pun memegang prinsip bahwa menyerah adalah kekalahan total, kompromi adalah setengah kalah,

mundur bukanlah sebuah kekalahan.

Kedua adalah rela berkorban. Sun Tzu berkata: “Perintahlah anak buahmu sedemikian rupa sehingga mereka mau menjalankan tugas yang terberat pun dengan sepenuh hati. Anda dapat memimpinnya sampai ia mengorbankan jiwanya. Anda dapat memimpinnya agar tetap *survive*. Anak buahmu tidak boleh takut akan bahaya atau sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hidupnya”. Sifat rela berkorban bagi prajurit TNI diperoleh dari pewarisan nilai-nilai 45, yaitu keikhlasan dan niat yang sungguh untuk mengabdikan diri kepada tugas yang diemban tanpa memperhitungkan untung rugi harta benda, bahkan juga jiwa raga.

170

***The Art of War* mengajarkan para pemimpin untuk selalu menghargai waktu, momentum dan timing. Sun Tzu berkata: “Waktu adalah segalanya”.**

Kualitas keputusan itu seperti menukik tepat waktu dari seekor elang yang memungkinkannya untuk menyerang dan menghancurkan korbannya. Banyak orang membuat strategi dan keputusan bisnis yang bagus tetapi kemudian segalanya hancur karena salah *timing* pada saat mengeksekusinya. Kita perlu menahan dorongan nafsu dan perlu bersabar sejenak, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan dari sebuah momentum. Jadilah seperti elang kata, Sun Tzu. Kita sangat jarang mendapatkan kesempatan kedua untuk mengeksekusi keputusan secara efektif.

Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lebih hebat dibandingkan dengan nenek moyang kita yang lebih penyabar dan telaten. Padahal prinsip-prinsip pokok dari

keberhasilan suatu strategi tidak berubah. Sudah saatnya kita tidak mengabaikan sejarah tetapi mempelajari pelajaran apa yang dapat kita petik dari masa lalu sehingga kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun sebaliknya, kami juga melihat ada beberapa tantangan yang harus dihadapi para pemimpin ketika kita ingin mengaplikasikan teori Sun Tzu.

Perlu integritas yang tinggi. Dibutuhkan seorang yang dapat dipercaya, satu kata dan satu perbuatan, memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan keteladanan. Teori Sun Tzu sangat dipengaruhi oleh sejarah peperangan di masa lalu yang sangat berwatak perang darat yang kolosal dan linier, sehingga pemimpin harus berada di barisan depan.

171

Para ahli strategi harus seorang yang visioner. Teori Sun Tzu mengedepankan strategi, bukan sekedar taktik, sehingga pencapaian sasaran tidak serta merta cepat dan dekat. Dalam mengaplikasikan langkah desepsi diperlukan kreatifitas dan kemampuan berimajinasi yang kuat.

Para ahli strategi harus profesional. Diperlukan ketekunan dan keahlian di bidang yang digeluti. Semakin sering seorang strategis berhadapan dengan masalah yang memerlukan solusi strategis, maka ia semakin matang. Profesionalitas ini diperlukan ketika ia harus tegar memformulasikan strategi yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan nilai moral dan etik yang dianutnya. Teori perang SunTzu yang menekankan pentingnya desepsi sangat menuntut profesionalitas pelaksana strateginya.

***The Art of War* yang juga menekankan pentingnya beraliansi/koalisi barangkali tidak dapat sejalan dengan polugri bebas aktif yang dianut Indonesia.** Bagi Indonesia pentingnya beraliansi

diinterpretasikan dalam wujud kerja sama pertahanan tanpa suatu pemusatan pakta militer. Prinsip penghormatan terhadap independensi itu penting, tetapi harus dilandasi dengan sikap “*Mutual benefit and Mutual respect for each other’s teritorial integrity and sovereignty.*” Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Saya ingin menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

172

- Dari persepsi Indonesia, teori Sun Tzu telah diimplementasikan dalam dunia militer dan bisnis semenjak berdirinya Republik Indonesia. Teori Sun berkembang pesat pada penghujung tahun 1990-an seiring dengan terbukanya akses informasi melalui internet. Kini teori Sun Tzu telah menjadi referensi teori strategi di dunia pendidikan militer dan sipil.
- Dari persepsi Indonesia, teori Sun Tzu memberikan implikasi positif yang besar terhadap aspek politik, ekonomi dan pertahanan, namun di sini saya hanya memberikan beberapa contoh aplikasi.
- Dari persepsi kultural, teori Sun Tzu sangat aplikatif di Indonesia mengingat adanya kesamaan dan korelasi budaya yang sangat kuat di antara kedua bangsa Indonesia dan bangsa Tiongkok.
- Dengan semangat filosofi *Art of War* dari Sun Tzu, Indonesia menggugah semua bangsa untuk bekerja sama dengan suasana akrab membangun dunia yang damai dan stabil.



SAMBANG UNWIKITATI
AL-FALAH



“Defence intellectual management merupakan suatu resultan dari kualitas praktis dan akademis yang diterapkan dalam interaksi kepemimpinan dan manajemen untuk membangun kekuatan pertahanan dalam merespons ancaman dan tantangan multidimensional. DIM memang dimulai dari panggilan hak dan kewajiban pembelaan negara bagi setiap warga dari semua aspek profesi baik militer dan nirmiliter. Tetapi sebenarnya DIM juga merupakan tuntutan fenomena profesional yang harus ditumbuh-kembangkan agar menghasilkan adrenalin yang cukup pada saat diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan.”

21.

DEFENCE INTELLECTUAL MANAGEMENT

175

Panglima Besar Jenderal Soedirman selalu berpesan kepada para prajurit agar senantiasa memenangkan hati dan pikiran rakyat dalam melawan penjajah Belanda. Makna pesan ini sangat efektif dari masa ke masa artinya tentara dan rakyat harus bersatu dalam mempertahankan negara.

Negara kita yang merdeka karena diperjuangkan dengan cucuran darah dan keringat dari para pahlawan dan pendahulu kita yang telah mewujudkan “kecerdasan yang brilian” seperti yang ditunjukkan dalam rumusan Mukadimah UUD 1945. Makna yang tertuang di dalam mukadimah itu begitu visioner dan aplikatif dari masa ke masa, menembus semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekarang ini kita sedang melihat bagaimana para politisi sedang memperjuangkan demokrasi yang mereka yakini. Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, masing-masing anggota DPR menyampaikan pembenaran atas sikapnya agar bisa mencapai tujuan politik yang diinginkan.

Saya tidak ingin masuk kepada siapa yang benar dan siapa salah. Juga tidak berniat untuk mengomentari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hanya saja jika kita berkaca bagaimana para Bapak Bangsa dalam memperdebatkan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ini ke depan, kita pantas kagum akan sikap kenegarawanan para pendiri negara ini.

176 Tidak ada sedikit pun niatan hati yang bengkok ketika mereka menyampaikan pandangannya. Semua berangkat dari pikiran yang jernih demi kepentingan bangsa dan negara ini. Tidak usah heran apabila isu paling krusial tentang isu agama sekali pun bisa mereka selesaikan dengan cara yang elegan.

Semua itu berangkat dari sikap dan kekayaan intelektual yang mereka miliki. Meski tidak hidup di era teknologi informasi yang canggih, wawasan mereka begitu luas untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan bumi yang lain. Mereka mampu mengelola kekayaan intelektual itu dengan baik dan menyampaikannya dengan bahasa yang santun dan terukur, sehingga mampu mengajak semua mau melangkah kepada tujuan yang sama membangun sebuah Indonesia yang merdeka sebagai jembatan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur.

KONTEKS PERTAHANAN

Saya ingin menggunakan pengalaman yang dulu dipergunakan para Bapak Bangsa itu di dalam mengelola sistem pertahanan. Kita membutuhkan *Defence Intellectual Management* (DIM) dalam membangun sebuah kemampuan sistem pertahanan yang

bisa melindungi segenap kehidupan warga bangsa ini.

Adalah hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam pembelaan negara untuk mewujudkan negara yang majemuk dan luas serta kaya ini terjaga, maju, sejahtera, dan cerdas kehidupannya. Tentu sebagai negara kebangsaan, kita harus mampu hidup bermartabat dan bisa menempatkan diri berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Era globalisasi yang cenderung tanpa batas ditandai kemajuan komunikasi dan informasi serta pengetahuan dan teknologi, yang sudah pasti memengaruhi tata nilai dan pola penyelenggaraan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman multidimensional yang kompleks. Dengan perkataan lain kita perlu memiliki kualitas kemampuan pertahanan yang unggul untuk menekan eskalasi ancaman.

177

Defence Intellectual Management merupakan suatu resultan dari kualitas praktis dan akademis yang diterapkan dalam interaksi kepemimpinan dan manajemen untuk membangun kekuatan pertahanan dalam merespons ancaman dan tantangan multidimensional.

DIM memang dimulai dari panggilan hak dan kewajiban pembelaan negara bagi setiap warga dari semua aspek profesi baik militer maupun nirmiliter. Tetapi sebenarnya DIM juga merupakan tuntutan fenomena profesional yang harus ditumbuh kembangkan agar dia menghasilkan *adrenalin* yang cukup pada saat diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Maka DIM menjadi semacam cairan solusi, yang seketika tanpa perlu mencari referensi atau membuka kamus ketika hendak menangani masalah.

DIM bukan institusional tetapi *individual capability* yang berbasis profesionalitas yang sarat dengan tantangan kemauan dan kesanggupan individual yang dibentuk melalui tiga koridor membangun DIM. Tiga koridor itu ialah koridor pendidikan dan pelatihan formal, beragam pengalaman kegiatan dan akses pekerjaan, serta kemampuan pengembangan diri. Inilah yang membentuk modalitas yang berharga bagi kemampuan individu. Seorang profesional harus memiliki sikap pantang menyerah walaupun dia harus siap menghadapi dinamika pasang surut sepahit apapun dan tidak akan punah menghadapi tekanan seberat apapun.

Permasalahan negara yang cenderung kompleks dan eskalatif tidak cukup dihadapi dengan alat utama sistem persenjataan modern dan organisasi militer canggih, tetapi membutuhkan kemampuan DIM yang dikelola dalam kepemimpinan dan manajemen yang multiguna. Mengapa? Karena kita tidak boleh terkecoh dengan istilah “perang modern“ yang bertumpu kepada berbagai ragam kecanggihan, tetapi akhirnya makna “*The man behind the gun*” yang penuh dengan *adrenalin* yang berkualitas itulah tumpuan dari solusi permasalahan yang sebenarnya.

DIM adalah ibarat mengumpulkan jam terbang yang harus dijalani sendiri, bahkan pencapaian kualitas DIM didapatkan dari perjuangan melintas perjalanan jauh untuk memperoleh suatu pengalaman yang berharga itu. Semakin sering mengalami intensitas penanganan masalah yang kita hadapi, maka akan lebih tajam pisau analisis dan keputusan yang kita miliki. Inilah tantangan yang perlu dijawab bagi generasi penerus pertahanan negara sebagai *role model* yang produktif untuk pembelaan negara masa kini dan masa depan.

Ada harapan yang sangat besar dari generasi penerus untuk terpanggil melakukan hal produktif dalam bela negara dengan menunjukkan kompetensi profesionalitasnya. Kita harus menjadi garda terdepan sekaligus motor penggerak dalam mewujudkan gerakan nasional bela negara. Di samping itu sebagai agen perubahan dalam membangun daya tangkal, generasi penerus harus mampu mempertahankan nilai-nilai karakter dan jatidiri bangsa dengan selalu kreatif dan inovatif menyebarkan nilai bela negara untuk bangsa seraya memahami perubahan tatanan dunia baru.

179

Itulah *Defence Intellectual Management* yang harus kita pahami juga sebagai suatu upaya untuk terus meningkatkan *capacity building* dari masing-masing pribadi kita.





3

**ALUTSISTA,
INDUSTRI PERTAHANAN
&
KEAMANAN NASIONAL**



“Industri pertahanan yang andal merupakan tulang punggung kemampuan pertahanan negara. Indonesia pasti sanggup menjadi kekuatan regional dengan didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri “

22.

INDUSTRI PERTAHANAN PENOPANG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional.

185

Efektifitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan guna meningkatkan efektifitas pertahanan negara.

Angkatan perang membutuhkan peralatan tempur yang modern dan mandiri. Oleh karena itu, kemampuan angkatan perang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri pertahanan yang mendukungnya. Kita dapat melihat, bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak memperkuat angkatan perangnya, bahkan banyak negara yang memperkuat industri pertahanannya agar angkatan perangnya menjadi andal, karena kebutuhannya dipenuhi secara mandiri melalui industri pertahanan dalam negeri. Hal ini memosisikan industri pertahanan menjadi salah satu faktor determinan bagi kelangsungan sistem pertahanan negara.

ANGKATAN PERANG HANDAL

186 Memiliki angkatan perang andal dan pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional. Angkatan perang yang andal harus didukung dengan peralatan yang modern dan mandiri. Hal ini hanya bisa terwujud apabila didukung oleh industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri. Kita berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memiliki TNI yang sangat membanggakan, bukan hanya TNI yang profesional, melainkan juga TNI yang dipersenjatai dengan alutsista yang bisa diandalkan dan dipenuhi secara mandiri.

Dalam membangun angkatan perang yang andal, bukan hanya harus memiliki prajurit yang profesional, tapi harus pula dipersenjatai dengan alutsista yang modern dan dapat diandalkan. Kita harus memiliki *minimum essential forces* yang mempunyai mobilitas tinggi dan daya pukul yang dahsyat, setara dan seimbang dengan negara lain, serta sejalan dengan perkembangan teknologi yang dikenal dengan *Revolution in Military Affairs*. Hal ini merupakan tuntutan yang perlu direspons oleh industri pertahanan dalam mengimplementasikan teknologi pada alutsista untuk membangun kekuatan militer.

STRATEGI REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN

Setelah Presiden SBY memberikan direktif revitalisasi industri pertahanan pada *Round Table Discussion* industri pertahanan pada tahun 2004, maka mesin kerja dari semua pemangku

kebijakan segera bergerak, Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijakan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna dan industrialis pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam satu target melakukan revitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri dalam negeri. Strategi revitalisasi industri pertahanan sebagai berikut :

Pertama, mewajibkan pengguna dalam negeri menggunakan produksi dalam negeri untuk kebutuhan alutsista dan nonalutsista bagi TNI maupun Polri serta instansi pemerintah lainnya diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri.

187

Kedua, manakala harus membeli dari luar negeri, maka persyaratannya adalah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi. Tapi pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan perlunya ToT (*Transfer of Technology*) dan *offset* dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri baik dengan *joint production*, bila perlu *joint investment*.

Ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.

UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN

Pada tahun 2010, presiden telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri baik alutsista maupun nonalutsista. Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan *grand strategy*

pembangunan industri pertahanan. Dan pada tahun 2012, pemerintah dan DPR menetapkan UU No. 16 tentang Industri Pertahanan sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas, serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan terorganisasi, efektifitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat ditingkatkan. Undang-Undang Industri Pertahanan merupakan landasan hukum dalam mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Kemhan sebagai pembina industri pertahanan, berkepentingan untuk memberikan peluang kepada industri pertahanan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Bahkan Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa melakukan ekspor produk mereka ke luar negeri. Seperti pistol, senjata serbu, mortir dan kendaraan tempur roda ban (Panser Anoa) dari PT. Pindad selain sudah mendukung kebutuhan TNI AD juga sudah diekspor ke beberapa negara, demikian pula dengan beberapa pesawat angkut sedang produksi PT Dirgantara Indonesia.

MANDIRI TIDAK TERGANTUNG

Suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri teknologi pertahanan yang mandiri. Filosofi ini penting untuk mendukung misi negara menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Dengan industri pertahanan, kita tidak lagi tergantung kepada negara lain, tetapi bangsa kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan bagi angkatan perangnya.

Dengan industri pertahanan, kelangsungan pertahanan/pertempuran dapat dipelihara, embargo dapat diminimalkan, kebutuhan alutsista dapat dipenuhi secara mandiri (*self reliance*), serta akan memberikan kontribusi ekonomi secara makro dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menghemat devisa. Saat ini, industri pertahanan telah bangkit dengan kemampuan produksi kendaraan tempur, pesawat angkut sedang dan kapal patroli. Hal ini tentunya sangat membesarkan hati kita sebagai bangsa. Bahwa kita tidak hanya bergantung pada negara lain, tetapi mampu memenuhi sendiri kebutuhan angkatan perang kita.

189

Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya industri pertahanan kita sudah dapat membuat sendiri dan sudah digunakan oleh TNI, sebagai contoh:

- Alutsista darat buatan PT. Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (Panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI-AD. Bahkan produk PT. Pindad itu sekarang sudah berstandarisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya. Saat ini sedang dilakukan retrofit kendaraan tempur roda rantai (Tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.
- Untuk alutsista laut, kita bahkan memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT. PAL kita andalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar seperti *class* korvet dan kapal selam. PT. PAL juga kita dorong untuk membuat kapal perang untuk tanker. Kita juga

memiliki badan usaha milik negara yang lain yaitu PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN ini kita beri porsi untuk membangun *Landing Ship Tank* atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang. Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat yang ukuran 60 m ke bawah seperti Palindo, Lundin, Anugrah.

- Untuk alutsista udara, PT. Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan *joint production* dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan seperti C-212 sampai CN 235 dan CN 295 yang bermuatan 50 penerjun. Hal yang sama kita lakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT. Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan.

190

Saat ini industri pertahanan PT. PAL bahkan perlu untuk merekrut tenaga terampil umur 18 – 20 tahun agar mereka siap digunakan dalam pembangunan kapal selam yang diharapkan bisa kita lakukan sendiri pada tahun 2020, minimal kita sudah mandiri dalam *over haul* kapal selam. TOT ini diawali dengan TOT Sumber Daya Manusia yang kemudian diikuti dengan TOT peralatan. Telah disiapkan 100 lebih personel untuk kita kirim ke Korea dan terlihat animonya cukup besar. Berikutnya pemerintah harus memikirkan biaya pembangunan infrastruktur kapal selam di PT. PAL. Sedangkan TOT PKR (Perusak Kawal Rudal) akan diberangkatkan 50 orang ke Belanda untuk bekerja sama dengan Damen Spelde Navalship Building Belanda.

TOT Pesawat jet tempur kita lakukan melalui proyek jangka

panjang dalam pembangunan pesawat tempur KFX dan IFX generasi 4,5 yang pada saat ini sudah pada proses desain dan pengiriman personel ke Korea. Kita punya kontribusi yang sama dengan Korea dengan target pada akhir 2020 sudah mempunyai satu pabrik jet tempur.

Pada saat kita membeli tank berat (MBT Leopard) dari Jerman, dalam paket kontrak kita meminta adanya *transfer of technology*. Pihak Jerman menyetujui dalam pemeliharaan pascajual, kita akan mendapat kesempatan untuk melakukannya sendiri dengan pendampingan pihak produsen. Bahkan kita juga berencana untuk membuat pabrik amunisi MBT yang spesifik itu sehingga PT. Pindad kelak dapat menjadi pemasok amunisi MBT di Asia.

191

MASA DEPAN INDUSTRI STRATEGIS

Masa depan industri pertahanan Indonesia banyak memiliki peluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Berbagai capaian dalam teknologi robot, pesawat tak berawak, kapal tak berawak, roket dan rudal, pembuatan satelit mikro, kendaraan lapis baja, kapal perang dan pesawat merupakan peluang pengembangan industri pertahanan pada masa datang. Dengan kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran yang meningkat setiap tahunnya untuk industri pertahanan, pengembangan dan peningkatan kemampuan industri pertahanan perlu ditransfer menjadi sebuah kapabilitas pertahanan yang lebih mumpuni dan lebih andal pada masa datang.

Tantangan sekaligus peluang bagi industri pertahanan dalam negeri adalah meningkatkan kualitas manajemen yang profesional dan kompetitif, sehingga memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme

dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa dimanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna. Tantangan ini merupakan cambuk untuk meraih kapasitas produksi yang maksimal.

192 Hal kritis dalam pembangunan industri pertahanan adalah pengawakan manajemen yang unggul dan kemampuan untuk mengeliminasi parasit dalam manajemen industri pertahanan dan meniadakan peran “*broker*” yang berdampak kepada “*mark-up*”. Manajemen industri pertahanan jangan pernah memberi peluang distorsi internal dan eksternal yang hanya menimbulkan kerusakan manajemen. Aturan yang mengharuskan kita membeli langsung ke pabrikan dan menjual langsung kepada pembeli adalah cara yang paling tepat untuk menciptakan efisiensi dan manfaat.

Alokasi anggaran untuk industri pertahanan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan tingginya atensi pemerintah dalam memberikan *good will* dan *political will* dalam memenuhi kebutuhan alutsista melalui pemberdayaan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta menghemat devisa.

TEKAD DAN MILITANSI

Tekad untuk membangkitkan industri pertahanan kita harus didukung militansi dan intelektualisasi dari teknokrat kita baik sipil dan militer disertai sekali lagi “*political will*” yang konsisten dan berkelanjutan dari negara.

Industri pertahanan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara merupakan faktor determinan yang perlu terus dikembangkan sesuai dinamika perubahan strategis. Industri pertahanan saat ini masih lebih pada pembangunan teknologi pertahanan yang terlihat (*tangible*) untuk keperluan alutsista darat, laut dan udara, tetapi di masa depan perlu dikembangkan juga pada kemampuan lain seperti rekayasa perangkat lunak untuk keperluan-keperluan sistem yang berorientasi pada perangkat lunak (*software based system*) seperti simulator, *artificial intelligence*, robot, dan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan asimetris seperti *cyber* untuk kebutuhan informasi dan komunikasi khususnya kemampuan *intelligence, surveillance and recognition (ISR)*. Selain itu industri pertahanan harus mampu mengakomodasi pencapaian-pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang didapat oleh para anak bangsa.

193

Industri pertahanan dalam pengembangannya perlu memperhatikan aspek institusional, industrial, legal dan personal atau SDM sehingga arah pengembangan industri pertahanan lebih fokus dan sesuai dengan kultur Indonesia. Oleh karena memperhatikan pengembangan strategis ke depan, kesinambungan kebijakan pada industri pertahanan memerlukan komitmen dan kepedulian berbagai pihak agar jalannya industri pertahanan tidak tersendat-sendat. Bahkan dengan melakukan *strategy driven analysis*, maka akan diketahui bahwa kebutuhan akan anggaran pertahanan akan jauh lebih tinggi dan itu akan memacu pengembangan industri pertahanan.

Karena perubahan strategis yang begitu cepat bahkan cenderung penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan adaptasi terhadap kemampuan industri

pertahanan harus senantiasa dikembangkan yang merupakan hasil dari kontemplasi dan gagasan serta pertimbangan dari perubahan-perubahan strategis yang terjadi di sekitar Indonesia dan dipengaruhi aspek strategi, teknologi, serta persepsi dan kalkulasi hubungan internasional. Kementerian Pertahanan dalam hal ini mendukung setiap kerja keras dan kerja cerdas, serta kreasi dan inovasi pelaku industri pertahanan yang akan mendukung meningkatnya kapabilitas strategis demi terciptanya Indonesia sebagai kekuatan regional seperti yang diharapkan.





*“Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah
kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa.”*

23.

ERA KEBANGKITAN INDUSTRI PERTAHANAN

Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional. Efektifitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan. 197

Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004, sejak saat itu mesin dari semua pemangku kepentingan segera bekerja. Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.

Berbagai langkah, strategi, dan regulasi segera diambil. Pemerintah yang diperankan oleh Bappenas, Kementerian BUMN,

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah lain sebagai pengguna, segera menerjemahkannya.

Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun nonalutsista.

198 Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

INDUSTRI PERTAHANAN

Suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri teknologi pertahanan yang mandiri. Filosofi ini penting untuk mendukung misi negara menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Presiden melihat kebangkitan industri pertahanan dalam negeri dan untuk semakin mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, presiden bahkan menggariskan beberapa kebijakan teknis. Pertama mewajibkan pengguna dalam negeri memakai produksi dalam negeri untuk alutsista dan nonalutsista. TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya diwajibkan memakai produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri. Kedua, manakala harus

membeli dari luar negeri, maka persyaratannya adalah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi. Namun, pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan transfer teknologi dan *offset* dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri. Ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.

Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan berkepentingan memberikan peluang kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Bahkan, Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa ekspor produk mereka ke luar negeri.

199

Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI. Sebagai contoh, alutsista darat buatan PT. Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah berstandarisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya.

Saat ini sedang berlangsung pembaruan kendaraan tempur roda rantai (tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.

Saat membeli tank berat (MBT Leopard) dari Jerman, dalam paket kontrak ada klausul transfer teknologi. Pihak Jerman menyetujui dalam pemeliharaan pascajual, artinya kita akan

mendapat kesempatan melakukan didampingi pihak produsen.

Untuk alutsista udara, PT Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan kerja sama produksi dengan *Airbus Military* untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun.

200 Hal yang sama kita lakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan.

Di sisi alutsista laut, kita bahkan memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker.

Kita juga memiliki badan usaha milik negara yang lain, yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN ini kita beri porsi untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang.

Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah. Bila berkualitas, peluang yang sama juga diberikan kepada beberapa galangan swasta lain di dalam negeri. Alokasi anggaran kepada industri pertahanan cukup besar dalam rencana strategis 2010–2014, minimal Rp 5,4 triliun.

Peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas manajemen agar mampu memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi, dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa dimanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna.

Saat ini industri pertahanan PT PAL bahkan perlu untuk merekrut tenaga terampil umur 18–20 tahun agar mereka siap digunakan dalam pembangunan kapal selam, yang diharapkan bisa kita lakukan tahun 2020. 201

Hal kritis dalam pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah pengawakan manajemen yang unggul dan kemampuan untuk mengeliminasi parasit dalam manajemen industri pertahanan dan meniadakan peran "broker" yang berdampak pada penggelembungan biaya.

Manajemen industri pertahanan jangan pernah memberikan peluang distorsi internal dan eksternal yang hanya menimbulkan kerusakan manajemen. Aturan yang mengharuskan kita membeli langsung ke pabrikan dan menjual langsung kepada pembeli adalah cara paling tepat untuk efisiensi dan manfaat. Bila kita mau, Indonesia pasti sanggup menjadi kekuatan regional yang didukung oleh kemampuan industri teknologi pertahanan dalam negeri.







“Tidaklah mungkin ada negara yang menunggu terjadinya perang, baru kemudian mempersiapkan angkatan perang mereka. Sebab, membangun sistem pertahanan negara tidak bisa dilakukan seketika, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan postur sistem pertahanan yang diinginkan.”

24.

MODERNISASI ALUTSISTA: SEKARANG ATAU TIDAK AKAN PERNAH

Setiap kali terjadi musibah alutsista yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI, memberikan sengan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Apalagi jika itu terkait dengan kondisi alat utama sistem persenjataan yang dinilai tidak sesuai dengan tantangan zaman. Sebab tidaklah mudah untuk menghasilkan prajurit andal yang memerlukan biaya sangat tinggi. 205

Hanya saja kita harus menerima kenyataan bahwa dalam dua dekade terakhir tidaklah mungkin kita melakukan modernisasi alutsista karena krisis keuangan yang kita hadapi sulit untuk menyisihkan anggaran bagi modernisasi sistem pertahanan negara.

Kini ketika kondisi perekonomian negara mulai membaik, sepantasnya apabila kita memperhatikan kebutuhan alutsista bagi ketiga angkatan. Keputusan politik negara yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat memungkinkan kita untuk menaikkan anggaran pertahanan dari semula 0,7 persen dari produk domestik bruto menjadi di atas 1 persen dari PDB.

Sejak 2010 hingga tahun 2014, Kementerian Pertahanan diberikan porsi anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk memodernisasi

persenjataan bagi TNI. Anggaran tersebut sudah ditetapkan untuk dipergunakan memperkuat matra darat, laut dan udara.

Kita tidak berniat untuk membangun kekuatan angkatan perang yang besar, tetapi kita harus memiliki *minimum essential forces* yang punya mobilitas tinggi dan daya pukul yang dahsyat.

206 Sebagai negara yang berada dalam posisi silang yang strategis, Republik yang berdaulat ini mutlak memiliki kekuatan militer yang setara dan seimbang dengan negara lain sejalan dengan perkembangan teknologi militer yang dikenal dengan *Revolution in Military Affairs* yang tidak dapat dihindari dan sekaligus merupakan tuntutan dan tantangan yang perlu direspons oleh negara dalam memformulasikan postur pertahanan yang didalamnya ada postur TNI.

“SI VIS PACEM PARA BELLUM”

Memang kadang muncul pertanyaan, apakah perlu kita melakukan modernisasi alutsista? Pertanyaan itu muncul karena menganggap bahwa tidak mungkin lagi akan ada perang.

Tidak ada satu pun negara yang tidak menginginkan perdamaian. Semua negara pasti berupaya mencegah terjadinya perang, karena tahu bahwa perang akan menyengsarakan rakyat.

Namun kita melihat tidak ada negara yang lalu duduk tenang-tenang, tidak memperkuat angkatan perangnya. Banyak negara memperkuat industri pertahanan karena ingin memiliki angkatan perang yang bisa diandalkan.

Tidaklah mungkin ada negara yang menunggu terjadinya

perang, baru kemudian mempersiapkan angkatan perang mereka. Sebab, membangun sistem pertahanan negara tidak bisa dilakukan seketika, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan postur sistem pertahanan yang diinginkan.

Kita mengenal prinsip “*si vis pacem para bellum*”, apabila kita menginginkan perdamaian, maka kita harus siap berperang. Hendaknya jangan difahami berlebihan, melainkan suatu langkah strategis yang proporsional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita yang menjadi opsi formulasi pembangunan kekuatan pertahanan.

207

Salah satu inti Pembukaan UUD 1945 secara jelas memberi tugas kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa melalui alat pertahanan negaranya. Perintah itu diterjemahkan dengan membangun kekuatan militer yang memiliki mobilitas tinggi dalam melakukan daya tangkal dan daya pukul.

INDUSTRI PERTAHANAN

Kita pantas bersyukur bahwa sepanjang reformasi kita telah mampu merevitalisasi industri pertahanan. Saat ini industri pertahanan dalam negeri telah bangkit kembali dengan kemampuan produksi kendaraan tempur dan pesawat angkut sedang maupun kapal patroli.

Hal ini tentunya membesarkan hati kita sebagai bangsa. Bahwa kita tidak lagi hanya tergantung kepada negara lain, tetapi bangsa kita sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan persenjataan bagi angkatan perangnya, bahkan senjata serbu buatan Pindad

telah berulang kali menjuarai pertandingan menembak militer Asia Pasifik.

Kementerian Pertahanan memfokuskan pengadaan alutsista dengan mengandalkan industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Pengadaan alutsista bagi TNI dilakukan secara saksama dengan memperhatikan tugas yang diembankan kepada TNI baik dalam melaksanakan tugas OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

208 Kita sedang bekerja keras untuk memodernisasi peralatan untuk memiliki TNI yang bisa dibanggakan. Bukan hanya TNI yang memiliki prajurit yang profesional, tetapi alutsista yang bisa diandalkan. Postur pertahanan mengarahkan perlunya pembangunan kekuatan TNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur dengan pengadaan kendaraan tempur dengan sistem senjatanya. TNI melakukan olah teknis dan taktis sesuai dengan doktrin operasinya dengan memperhatikan perkembangan di bidang militer secara universal.

Faktor utama dalam mengelola modernisasi peralatan militer dengan melaksanakan proses yang transparan dan akuntabilitas yang dipahami dalam bahasa terang bahwa modernisasi TNI “*tidak asal-asalan*”, tapi mekanisme dan prosedur serta sistemnya bisa dipertanggungjawabkan oleh Kemhan dan TNI serta produsen.





“Dalam iklim rezim demokrasi, media punya peran penting menjembatani hubungan antara publik dengan negara sekaligus media sebagai partisipan kontrol proses good governance terus memberikan solusi bagi pembangunan integritas penyelenggara negara.”

25.

MEDIA DAN ANTI KORUPSI

Kontrol sosial pada era demokrasi terhadap sistem penyelenggara negara saat ini sudah mendunia dan semakin pesat lajunya bahkan sudah menembus dinding birokrasi negara. Makna yang tersirat bahwa di era demokrasi, transparansi dan akuntabilitas perlu ditafsirkan luas sebagai terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada konteks manajemen penyelenggara negara sangat penting kecermatan mesin kinerja dalam mengelola anggaran negara.

211

Signifikansi eksistensi media saat ini bukan instrumen propaganda negara seperti era autoritarian tetapi justru menjadi instrumen publik untuk kontrol sosial termasuk bagi penyelenggara negara. Dalam berbagai pengalaman negara di belahan dunia kini fenomena perilaku korupsi merupakan ancaman kesuksesan misi negara bahkan menjadi catatan tragis bagi martabat bangsa dan kredibilitas negara tersebut.

MEDIA

Merupakan salah satu kekuatan nasional berperan sebagai instrumen publik untuk membangun *nation capacity building*. Media dikenal eksis dalam iklim dan situasi dua rezim demokrasi dan non rezim demokrasi. Di Indonesia pengalaman sejarah media mengalami kedua rezim tersebut. Media pada situasi rezim non

demokrasi tidak diinginkan menulis berita permasalahan berbau korupsi termasuk isu penyuaipan bahkan ada celah disalahgunakan menjadi corong propaganda elit rezim. Berbeda di era rezim demokrasi media diharapkan menemukan problema korupsi dan diinginkan turut serta memberikan solusi anti korupsi. Lebih luas lagi media menjadi partisipan aktif kontrol sosial demokrasi bagi sistem tata laksana negara dengan memberikan kontribusi dari sumber berbeda dari negara.

212 Media yang efektif berperan dalam anti korupsi dengan memberikan suasana kondusif bukan kepanikan dengan tampilan pemberitaan dari jurnalis profesional yang memiliki referensi dan *back ground* yang sama terhadap legislasi dan berbagai aturan negara. Media terbuka memperoleh pasokan dari pakar dan profesional tentang problema manajemen penyelenggara negara mengelola anggaran. Keterbukaan media yang membuka interaksi dengan penyelenggara negara untuk membangun pemahaman atas problema dan solusi anti korupsi. Ini bagian dari opsi produktif untuk memperkuat visi media bersama negara melawan korupsi.

PENYELENGGARA NEGARA

Perlu memberi akses kerja sama dengan media dengan beberapa opsi seperti intensitas *media briefing* atas transparansi dan akuntabilitas membangun *good governance*, memberikan ruang gerak media turut serta dalam pelatihan dan seminar pencegahan korupsi serta tidak kalah pentingnya intensitas hubungan institusi informasi dengan media pada skala waktu yang fleksibel.

Korupsi jelas mengancam suksesnya misi negara karena

menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan instabilitas bahkan kerusakan sistem yang berakibat buruk bagi kredibilitas negara dan menghilangkan kepercayaan rakyat.

Penyelenggara negara hendaknya memahami target media turut serta dalam gelombang anti korupsi untuk melakukan investigasi problema korupsi yang terjadi dalam struktur negara dan menginginkan akuntabilitas untuk informasi publik sebagai kontrol sosial.

Sebagai instrumen kontrol sosial publik, media ingin memperoleh transparansi – akuntabilitas – kecepatan informasi – profesionalitas dari ketepatan berita dan *full coverage*. Hal ini bukan membuka rahasia negara sebab ada parameter legal dan regulasi yang mengatur hal rahasia negara.

213

MUTUALISTIS

Interaksi media dan penyelenggara negara dalam anti korupsi berbasis profesionalisme – akurasi dan transparansi penting sebagai komitmen membangun integritas dan kualitas *good governance*. Ada tiga aktifitas partisipasi media membangun *good governance* yakni menemukan fakta problema, memberikan esensi koreksi sosial dengan usulan solusi dan memonitor proses yang menjadi respons negara.

Sekali lagi dalam iklim rezim demokrasi, media punya peran penting menjembatani hubungan antara publik dengan negara sekaligus media sebagai partisipan kontrol proses *good governance* terus memberikan solusi bagi pembangunan integritas penyelenggara negara.



“Dunia mengenal dengan sebutan manajemen krisis, namun ada yang menafsirkan manajemen krisis sebagai mengelola krisis agar krisis tersebut terus terjadi. Tetapi kita sepakat manajemen krisis untuk mengatasi dan menanggulangi krisis agar situasi kembali normal dan stabil.”



26.

REINFORCEMENT CRISIS MANAGEMENT

215

Saya ingin memberikan kontribusi pandangan sebagai siswa kursus Krisis Manajemen pada NATO School yang berasal dari negara bukan anggota NATO.

Dunia yang tanpa batas pada era keterbukaan di abad ke-21 dewasa ini, tentu memiliki perbedaan pada era perang dingin sebelumnya. Berbagai fenomena yang membuat dunia kaget dengan terjadinya berbagai peristiwa yang bahkan akibatnya fatal. Dunia dikagetkan dengan peristiwa 9-11-2001 di Amerika Serikat yang bisa menembus kecanggihan sistem pertahanan udara nasional Amerika Serikat. Setelah serangan itu, dunia membuka mata dan pikiran meyakinkan semua pihak bahwa dunia menghadapi ancaman yang tidak hanya datang dari *State Actors*, tetapi nyatanya ada ancaman dari *Non State Actors*. Tentunya NATO sebagai Institusi Aliansi Negara Atlantik yang punya kredibilitas global tampil sebagai penjuror untuk melakukan *Quick Respond* mengantisipasi serangan semacam itu.

Kita tidak hanya berhenti pada peristiwa yang menakutkan yang menyerang *Twin Towers*, bahkan menyerang *Pentagon* pada

waktu itu di Amerika Serikat, dan di belahan dunia lain terjadi beragam fenomena krisis pada skala nasional dan skala regional. Dimensi lain bisa disebutkan krisis ekonomi yang terjadi di Yunani baru-baru ini meminta perhatian EU (*European Union*) untuk membantu.

FENOMENA ASIA

216 Dunia juga memperhatikan apa yang terjadi di Asia terkini, yang oleh pemerintah negara kejadian harus membangun suatu pusat pengendalian krisis, karena akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut menimbulkan akibat yang meluas terhadap kemanusiaan dan kelangsungan hidup bangsanya. Beberapa peristiwa yang terjadi di ASIA yang bisa dikategorikan krisis seperti terjadinya gempa bumi di Jepang tahun 2011, wabah penyakit MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) di Korea Selatan dan Saudi Arabia, Flu Burung di Singapura tahun 2013. Selain itu seperti yang kita semua mengikuti dinamika instabilitas keamanan di Afghanistan dan Irak serta fenomena terbentuknya ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) yang membuat dunia tidak boleh diam untuk mengatasinya.

Saya mencatat beberapa dimensi krisis sejak Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah tahun 1945, sejarah Indonesia mencatat peristiwa strategis yang mengakibatkan peristiwa kemanusiaan dan peristiwa negara yaitu peristiwa Kudeta Partai Komunis Indonesia 1965 yang membunuh Pimpinan Angkatan Darat. Peristiwa ini nyaris menimbulkan perang saudara di Indonesia. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang mengancam kelangsungan hidup 200-an juta rakyat Indonesia. Terjadi bencana alam yang mengundang bantuan internasional pada tahun 2004 di Aceh terjadi gempa bumi di atas 8 Skala Richter dan tsunami yang mengorbankan 100 ribu lebih

jiwa dan kehancuran desa dan kota serta fasilitas militer dan saat ini di Indonesia sedang terjadi bencana kebakaran di Sumatra dan Kalimantan yang menimbulkan asap di atas 300 PSI (*Pollutant Standard Index*) yang mengganggu kesehatan warga setempat dan warga di negara tetangga Singapura dan Malaysia.

FENOMENA KRISIS

Saya ingin *share* bahwa penyebab krisis bisa terjadi oleh 217
penyebab fenomena alam dan juga fenomena buatan yang mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia dan mengganggu stabilitas kelangsungan negara. Fenomena krisis tidak hanya berdimensi militer tetapi juga dari dimensi non militer.

Kecenderungan globalisasi dengan indikasi perang generasi ke-empat ditandai dengan perang asimetris, merupakan kecenderungan yang dapat menimbulkan fenomena krisis buatan lebih besar peluang dari pelaku *Non State Actors*, tetapi menghasilkan factor fatalitas yang sangat menakutkan. Spesifikasi *Non State Actors Threat* juga perlu memperhatikan kultur atau genetika dari kelompok yang memang memiliki “Habitat Teroris” dan “Ekspansionis” dengan *Trend* menggunakan label agama yang justru bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.

REINFORCEMENT CRISIS MANAGEMENT

Dunia mengenal dengan sebutan manajemen krisis, namun ada yang menafsirkan manajemen krisis sebagai mengelola krisis

agar krisis tersebut terus terjadi. Tetapi kita sepakat manajemen krisis untuk mengatasi dan menanggulangi krisis agar situasi kembali normal dan stabil.

Berbagai pola dan manajemen penanganan krisis yang sudah dikembangkan pada semua tingkat dan dengan peralatan canggih juga saya ingin berkontribusi beberapa hal sebagai berikut :

218 **Esensi Manajemen Krisis** adalah Kepemimpinan dan Manajemen yang perlu dikembangkan secara terintegrasi dan terkendali. Kontijensi militer dalam merespons dinamika taktis dan strategis dapat menjadi kerangka dasar dalam membangun respons mengatasi krisis, tetapi perlu *Combine Access and Combine Efforts* untuk memperkuat Organisasi Manajemen Krisis. Faktor penting manajemen krisis pada tingkat nasional dan internasional melakukan tindakan cepat mengatasi krisis dengan menggunakan *Resources and Capabilities* dari *Local First Responders*. Untuk itu, seluruh *Emergency Support* diidentifikasi dan dipersiapkan untuk mobilisasi ke daerah krisis dalam waktu singkat.

Informasi merupakan fakta yang dominan dalam manajemen krisis untuk mengantisipasi, merencanakan dan mengendalikan krisis manajemen. Informasi mengenai infrastruktur (*critical infrastructure*) yang mempunyai nilai vital dan strategis harus menjadi bagian penting dalam manajemen mengantisipasi serangan teroris. Beberapa serangan terjadi disebabkan kegagalan melakukan identifikasi dan pengamanan wilayah sebagai pencegahan.

Ekstra Kesiapan (*extra readiness*). Di era teknologi modern saat ini sudah sangat canggih teknologi perlengkapan yang kita miliki, tetapi perlu usaha manual yaitu komunikasi dengan

Traditional Resources yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pembinaan Teritorial (*Territorial Management*) sangat penting untuk mendukung *Crisis Teams Experts* yang sudah dilengkapi berbagai peralatan canggih.

Media. Pengalaman menunjukkan Media Operasional Manajemen Krisis harus transparan. Media perlu memperoleh sebanyak mungkin dan *Timely* informasi. Jangan lupa dunia media tidak lepas dari sensasi terutama tragedi kemanusiaan dan korban sipil dipastikan menjadi *High Level Attention*. Oleh karena itu, para pelaksana manajemen krisis harus *Proper Execution*. Fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit serta keperluan mendasar masyarakat akan jadi perhatian media, maka itu perlu menjadi target *First Responders*. Dengan kata lain, manajemen krisis tidak hanya selesaikan masalah krisis, tapi lebih penting *They Care about People and Have a Heart*. Saya berpendapat dalam manajemen krisis perlu dibentuk IBO (*Image Building Operation*) yang terus menerus hadir dalam memberikan informasi.

219

Cyber. Agar menjadi kewaspadaan kita semua ancaman *cyber* akan sangat mungkin ambil porsi signifikan dalam manajemen krisis. Ancaman *cyber* tidak mematikan tapi melumpuhkan sistem multi dimensi suatu negara. Mengingat *cyber war* ini tidak kenal batas dan waktu, maka organisasi internasional seperti NATO perlu ambil inisiatif untuk merancang Pertahanan Internasional *cyber*. Di Indonesia upaya melakukan *interaksi dengan para hackers* untuk merespons suatu pusat pertahanan *cyber war*. Ada keperluan untuk merancang strategi pertahanan *cyber* secara terintegrasi untuk mengamankan kepentingan nasional negara yang bebas dari target serangan *cyber*.

Untuk keperluan prevensi secara global, NATO perlu

mengingatkan dunia perlunya kepedulian masyarakat memahami manajemen krisis. Itulah pandangan saya ini sebagai perkuatan atas pemikiran dalam pembahasan krisis manajemen seperti yang pernah saya lihat dan alami.





“Siapa pun rezim pemerintahan yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat pasti dituntut untuk menjalankan aturan perundangan yang sesuai dengan era demokrasi, karena kedaulatan rakyat dalam era demokrasi tidak cocok disandingkan dengan aturan perundangan yang berlaku pada era otoritarian seperti yang masih berlaku sampai saat ini. Seharusnya Undang Undang Keamanan Nasional justru sejak awal diwujudkan mengingat dinamika kehidupan nasional kita telah mengalami perubahan iklim politik baru di era demokrasi yang dikenal dengan reformasi.”

27.

KEAMANAN NASIONAL: LANDASAN DAN OPERASIONALISASI

U paya untuk mewujudkan cita-cita nasional dituangkan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

223

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Dari alinea keempat tersebut dapat diartikan: (1) diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional; (2) membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik secara konsepsional; dan (3) NKRI hidup di tengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendorong terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.

Merangkum jbaran tujuan nasional itu pada dasarnya pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk mengelola Keamanan Nasional dan Kesejahteraan Nasional serta turut mewujudkan dunia internasional yang damai dan abadi. Kondisi keamanan nasional menjadi faktor strategis jika diingat dinamika pencapaian kesejahteraan dan kondisi lingkungan strategis sangat tinggi.

224 Tantangan keamanan nasional saat ini dihadapkan dengan munculnya paradigma baru berupa demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas, yang telah dikedepankan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional perlu dilakukan pengelolaan secara cermat dan terukur agar pembangunan dapat terus berlangsung dan negara jaya, berdaulat dan terhormat. Belum lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu perubahan pola hidup yang lebih rasional, spesialisik dan individualistik sehingga keadaan ini sangat berpengaruh di dalam proses pembangunan nasional, yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

Menghadapi tantangan terhadap stabilitas keamanan nasional demikian itu, segenap sektor tanpa kecuali memang sudah memiliki perangkat kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Namun demikian terhadap kondisi upaya pembangunan nasional yang dihadapkan dengan semakin langkanya sumber daya dan tantangan mendiasporanya energi kolektif bangsa, kelancaran dan kesuksesannya sangat bergantung pada kondisi aman secara nasional yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional yang dirumuskan dan dijabarkan ke dalam suatu sistem keamanan nasional bersinergi, terpadu, terarah dan konsepsional, dengan

landasan historis dan yuridis yang kuat sehingga tidak kehilangan daya operasionalnya.

LANDASAN HISTORIS

Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia mengamanatkan pemerintah menyusun suatu aturan perundangan untuk mewujudkan amanat pembukaan tersebut yang diawali oleh UU No. 6/1946 Tentang Keadaan Bahaya dan berkembang menjadi UU No. 74/1957 Tentang Pencabutan "*Regelling of de Staat-Van Oorlog Van Beleg*" terus menjadi Perpu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya dengan turunan PP No 16 tahun 1960 yang esensinya memberi otoritas kepala daerah untuk meminta bantuan militer manakala diperlukan. Timbul pertanyaan pada masa itu, mengapa undang-undang ini terus berkembang? Jawaban faktualnya, pada masa itu pemerintah lebih fokus kepada upaya membangun keamanan dengan kondisi gangguan yang masih kompleks yaitu gangguan fisik terhadap keamanan dan kedaulatan negara semata. Sehingga bisa dipahami saat itu dominasi peran Pemerintah sangat besar mengatasi keamanan dan menjadikan aturan perundangan yang dibuat menjadi otoriter di iklim otoritarian.

225

Namun kondisi saat ini yang sangat heterogen dan multi efek apalagi dalam era demokrasi, tentunya perlu penyesuaian yang mendasar dengan maksud, ada aturan yang perlu untuk merespons fenomena yang heterogen berskala nasional tetapi sesuai dengan era demokrasi. Mengawali respons demokratis itu, penyikapan negara terhadap peristiwa 1998 menunjukkan gambaran bagaimana transformasi nilai, yang meskipun patut disayangkan terjadinya korban, tetapi dihadapkan dengan

skenario Balkanisasi, NKRI masih dapat menjaga eksistensinya.

Penyikapan terhadap peristiwa 1998 yang relatif lebih demokratis itu menjadi tonggak historis, yang diikuti lahirnya berbagai aturan perundangan yang mengatur secara teknis penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul baik yang disebabkan oleh gangguan keamanan fisik dan juga penyebab dari bencana alam, narkoba, penyakit dan lainnya yang dapat berpengaruh secara nasional. Bahkan kita perluantisipasi fenomena berbagai gangguan itu bisa saja datang simultan pada waktu yang sama menggoyahkan keamanan nasional.

226

LANDASAN TEORITIS

Anak Agung Banyu Perwita, yang menyitir kalimat mantan **Presiden AS, Harry S. Truman**, menjelaskan bahwa ***national security does not consists only of an army, a navy, and an air force ... it depends on a sound economy ... on civil liberties and human freedom.*** Disini keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga berbagai aspek kehidupan nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, dan pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa.⁴

Bahkan, pandangan senada tertuang dalam tulisan **Barry Buzan** yang mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang

4. Anak Agung Banyu Perwita. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembaruan Politik dan Kebijakan* (Jakarta: Pro Patria. 2007). hlm xxxix.

stabil dan kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.

*“Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environment. A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive”.*⁵

Konsepsi keamanan nasional komprehensif juga meletakkan warga negara atau masyarakat sebagai posisi sentralnya. Di dalam naskah **United Nation Development Program (UNDP)** yang telah mengangkat topik peran serta masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan perlunya mengubah konsep keamanan (*concept of security*), dari konsep keamanan nasional yang dipandang secara eksklusif, diubah menjadi konsep yang lebih ditekankan kepada keamanan masyarakat atau rakyat (*people security*). Keamanan tidak hanya menyangkut alat-alat perang atau militer semata, namun keamanan juga menyangkut pengembangan manusia (*human development*). Keamanan tidak hanya menyangkut keamanan terhadap wilayah teritorial negara (wilayah kedaulatan) saja, tetapi juga meliputi masalah keamanan sosial ekonomi (seperti pangan dan ketenagakerjaan) serta lingkungan,

227

*“The concept of security must change – from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armament to security through human development, from teritorial to food, employment and environmental security”.*⁶

5. Barry Buzan dikutip dalam Anak Agung Banyu Perwita. “Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara” dalam T. Hari Prihartono (eds). Op cit. hlm. 25.
6. Pernyataan PBB ini tertuang dalam paper UNDP. “Human Development Report: People’s Participation” dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, *Ibid*. hlm. 28.

Demikian pula, konsepsi keamanan nasional komprehensif juga harus mengakomodasi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Gagasan ini misalnya dikemukakan oleh Patrick Garrity. Ia menekankan bahwa keamanan tidak semata-mata berupa perlindungan terhadap bahaya dan kejahatan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidup seperti akses untuk memperoleh air bersih, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan segala kebutuhan dasar setiap manusia. Pada intinya keamanan menampung keinginan masyarakat untuk dapat hidup dengan selamat dan berkualitas. Inilah konsepsi keamanan nasional komprehensif yang ditonjolkan oleh Patrick Garrity. Selanjutnya ia menyatakan:

...applies most at the level of the citizen. It amounts to human well being; not only protection form harm and injury but from access to water, food, shelter, health, employment, and other basic requisites that are the due to every person on earth. It is collective of the citizen needs – overall safety and quality life – that should figure prominently in the nation’s view of security.⁷

Dari pelbagai literatur yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Senada dengan hal tersebut, Kusnanto Anggoro mengatakan keamanan nasional yang kontemporer memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan *nexus military-external*, tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi militer, seperti yang sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan,

7. Patrick Garrity, yang dikutip oleh Stephen Cambone. *A New Structure for National Security Policy Planning* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 1998). hlm. 107.

tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara.⁸

Dengan merujuk kepada pendapat Klaus Norr dan K.J. Holsti, Indria Samego mengatakan bahwa perkembangan elemen kekuatan modern terdiri dari informasi (*informational*), kemampuan diplomasi (*diplomatic*), daya tahan ekonomi (*economic*), dan kekuatan militer (*military*), sehingga keamanan nasional tidak semata-mata diarahkan pada pemahaman lama yang bersifat fisik, melainkan lebih luas dari itu, yaitu keamanan manusia (*human security*).⁹ Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari pelbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

229

Hasnan Habib mengatakan keamanan nasional merupakan perpaduan atau gabungan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia. Dengan penggabungan tersebut, maka keamanan nasional merupakan keamanan yang bersifat komprehensif. Adapun penjabarannya terdiri dari:

1. Keamanan Teritorial.

- a. Ancaman terhadap *Keamanan Negara* atau *Keamanan Teritorial (kedaulatan, integritas wilayah nasional dan luar/ external threat)*.

8. Kusnanto Anggoro. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum". Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 Juli 2003.

9. Indria Samego. "Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman Terhadap Pertahanan Negara" dalam . Hari Prihartono (eds). *Op cit.* hlm. 51.

b. Dimensi Militer.

c. Sarana utama penanggulangan dari Kekuatan Militer (senjata) dikerahkan di medan perang (*front* militer).

2. Keamanan Manusia.

a. Ancaman langsung terhadap manusia (individu, masyarakat, bangsa), meliputi: kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular (*AIDS*), pengangguran, *power abuse*, degradasi lingkungan, kejahatan (terutama *organized crime*), konflik SARA, terorisme, kekerasan politik, perilaku hukum rimba, dan diskriminasi.

b. Dimensi non-militer; meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, kemanusiaan.

c. Sarana penanggulangan: diarahkan kepada kekuatan sosial, budaya, politik, HAM dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Hasnan Habib menyebutkan keamanan nasional yang bersifat komprehensif memberi implikasi bahwa keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri, karena sudah menjadi keamanan bersama (*common security*). Lantas perlu dilakukannya pembinaan *kerjasama* keamanan (*cooperative security*) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non-militer.¹⁰ Adapun Ingo Wandlet mengatakan bahwa keamanan komprehensif tidak lagi terjamin oleh aktor-aktor profesional seperti militer, polisi, dan intelijen. Perluasan skala ancaman mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor

10. Uraian ini dikembangkan dari makalah Hasnan Habib. "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia", Makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.

penjamin keamanan secara institusional.¹¹

Mengenai perkembangan keamanan komprehensif, Rizal Sukma memaparkan bahwa konsepsi mengenai “keamanan” tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional, namun dengan berakhirnya Perang Dingin, telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*).¹²

231

Dengan ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer, muncul istilah *human security*, keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*).¹³ Bahkan “aman” juga dapat diartikan sebagai:

1. *Security*: aman dari gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan.
2. *Safety*: selamat dari kecelakaan, bencana atau marabahaya yang dapat mengancam keselamatan kehidupan individu, masyarakat termasuk harta benda.
3. *Surety*: jaminan adanya kepastian/keyakinan suatu kegiatan dapat berlangsung lancar, aman dan tertib, termasuk jaminan

11. Ingo Wandlet. “Perkembangan Reformasi Sektor Keamanan: Kebutuhan Bahasa dan Komunikasi”. Makalah pada Public Lecture tentang *Military Reform 2009-2014: Managing Civil-Military Relations in Indonesia*. Pasivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung. FISIP UI 13 Mei 2009.

12. Rizal Sukma. *Konsep Keamanan Nasional*, Makalah yang disampaikan dalam: FGD ProPatria, Jakarta, 28 November 2002, dikutip dari: <http://www.propatria.or.id>.

13. Kusnanto Anggoro. *Op.Cit.*

adanya kepastian hukum (*certency*)

4. *Peace*: suasana damai dan tenteram jiwa.

232 Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*), tetapi sudah bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dalam negeri. Sejalan dengan itu watak ancaman (*nature of threat*) juga bergeser menjadi multidimensional, tidak lagi mengarah kepada kekuatan militer semata, tetapi sudah masuk baik ke gatra budaya, ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan.

Dari uraian tersebut di atas, apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan dalam negeri” atau *internal security* sudah dapat menjangkau ke jenis ancaman yang lebih luas, mulai dari kemiskinan, epidemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Gangguan-gangguan yang timbul karena kesenjangan sosial, pertikaian antar golongan maupun gerakan separatis/pemberontakan bersenjata merupakan ancaman yang secara langsung dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Sementara itu dari pelbagai sumber di negara maju, berkembang wacana untuk mengembangkan fungsi Keamanan Nasional (*national security*) meliputi fungsi Pertahanan (*defence*), Keamanan Negara (*home land security*), Keamanan Ketertiban Masyarakat (*public security*), Keselamatan Masyarakat (*public safety*) dan Keamanan Insani (*human security*). Mengacu kepada pembahasan di atas maka sistem keamanan nasional

mutlak memasukkan fungsi-fungsi tersebut sebagai konsep operasionalisasi teknis pelaksanaannya.

LANDASAN YURIDIS

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menjamin rasa aman dan keamanan bagi warga negara. Dengan demikian tujuan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi NKRI dengan segala isinya yang menyiratkan bahwa keamanan dan rasa aman adalah kebutuhan utama bangsa dan negara sejajar dengan kebutuhan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Esensi dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersebut telah jelas dan tegas sehingga merupakan referensi yang sangat cukup untuk memformulasikan suatu sistem keamanan nasional tanpa perlu mengadopsi konsepsi dari negara lain.

233

Dari aspek keamanan nasional, alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang merupakan salah satu ruh dari UUD RI tahun 1945 itu dijabarkan secara konstitusional pada Bab X tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan penduduk (Pasal 26, 27) dan Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30). Secara lebih eksplisit Pasal 30 Ayat (1) dan (2) berisikan *“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*, dan *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*, yang merupakan refleksi atas prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela

negara dengan berpartisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yaitu mempertahankan dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional guna mewujudkan tujuan nasional.

234 Secara yuridis untuk menyelenggarakan upaya pembelaan negara dan melaksanakan usaha pertahanan negara pada sektornya terurai dalam kebijakan pembangunan berlandaskan peraturan perundang-undangan masing-masing. Terdapat 13 peraturan perundang-undangan yang menjadi pengaturan sektoral terkait dengan keamanan, namun dalam kerangka keamanan nasional yang terintegrasi belum ada. Ketigabelas peraturan perundang-undangan itu adalah:

- Perpu 23/1959 (PP 16/1960)
- UU No. 39/1999 tentang HAM
- UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
- UU No. 3/2002 tentang Hanneg
- UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 34/2004 tentang TNI
- UU No. 24/2007 tentang Bencana Alam
- UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 35/2009 tentang Narkotika
- UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
- UU No. 17/2011 tentang Intelijen.
- UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan berbagai usaha yang dituangkan dalam kegiatan pembangunan nasional

agar terjadi perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dan bangsa. Pembangunan nasional menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, Negara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional, baik dalam pelaksanaan fungsi yang menjamin terwujudnya kondisi kesejahteraan masyarakat secara nasional maupun pelaksanaan fungsi yang menjamin terwujudnya kondisi keamanan nasional yang stabil dan kondusif. Rancangan undang-undang tentang Keamanan Nasional yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraannya.

235

URGENSI RUU KEAMANAN NASIONAL

Pengaturan sistem keamanan nasional pada dasarnya memberikan arahan strategis kepada institusi yang punya kompetensi proporsional agar tercapai sinergi implementasi regulasi mengatasi kompleksitas permasalahan nasional. Selain itu negara perlu merevisi kategori tingkat kedaruratan yang sesuai dengan iklim demokrasi agar otoritas akan lebih jelas status dan prosesnya. Ada yang perlu diketahui publik bahwa Undang-Undang lama yang saat ini masih berlaku sama sekali tidak menyinggung peran *civil society* dalam proses penyelesaian masalah nasional sebaliknya masyarakat hanya sebagai objek bukan subjek yang ikut serta menyelesaikan permasalahan. Undang-undang Kamnas mengakomodasi peran *civil society* dalam Dewan Keamanan Nasional yang bukan lembaga operasional seperti Kopkamtib dan Bakorstanas tetapi semata-mata perangkat negara yang

terintegrasi untuk mengadakan simulasi dan formulasi solusi masalah keamanan nasional yang sedang terjadi dari berbagai aspek. Di sinilah peran masyarakat dilibatkan sebagai representasi dalam Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai anggota tidak tetap bersama para pejabat negara yang ditunjuk sebagai anggota tetap dipimpin oleh Presiden. Selanjutnya implementasi solusi diselenggarakan oleh institusi yang punya kompetensi dan otoritas yang *legitimate*.

236 Singkatnya, **Undang-Undang Kamnas** adalah Undang-Undang yang memberikan arahan strategis kepada pemangku kepentingan dalam penyelesaian permasalahan nasional dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses simulasi dan formulasi penyelesaian masalah dalam Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dengan kata lain, UU Kamnas adalah wujud dari *Collective respond to Protect the Country* yang sarat sensitif kepada disintegrasi-gangguan lingkungan dan kedaulatan negara.

Indonesia dengan **posisi geografis strategisnya** sangat rawan menerima berbagai distorsi globalisasi yang dapat bermuara kepada stabilitas nasional terhadap keutuhan teritorial dan kedaulatan Negara. Selain itu fenomena domestik yang sangat variabel dalam berbagai aksi dan kekerasan komunal yang berskala besar sampai berbagai kejahatan yang mengancam *public security* dan *public order* serta separatis dan terorisme di dalam negeri, belum lagi dampak fenomena lingkungan. Adalah wajar saat ancaman yang variabel tersebut kita prediksi dapat muncul pada saat yang bersamaan dan memerlukan respons cepat yang terintegrasi dari komponen bangsa ini sebagai wujud dari Sishankamrata. Maka tuntutan perlunya UU Kamnas menjadi mengemuka.

Siapun rezim pemerintahan yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat pasti dituntut untuk menjalankan aturan perundangan yang sesuai dengan era demokrasi, karena kedaulatan rakyat dalam era demokrasi tidak cocok disandingkan dengan aturan perundangan yang berlaku pada era otoritarian seperti yang masih berlaku sampai saat ini. Seharusnya Undang Undang Keamanan Nasional justru sejak awal diwujudkan mengingat dinamika kehidupan nasional kita telah mengalami perubahan iklim politik baru di era demokrasi yang dikenal dengan reformasi. Kita memiliki sejumlah Undang Undang yang mengatur hal yang berkaitan dengan rasa aman dan keamanan **tetapi ada hal pokok yang dirasakan penting dan perlu serta layak didukung oleh segenap komponen bangsa yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman serta amanat kepada negara untuk mampu menyelenggarakan jaminan atas hak-hak warga negara termasuk peran serta bela negara.** Hal pokok itulah diformulasikan dalam suatu rancangan Undang Undang Keamanan Nasional sebagai suatu Undang Undang sistem yang mengintegrasikan dan mensinergikan penyelenggaraan keamanan nasional secara komprehensif.

CIRI-CIRI RUU KEAMANAN NASIONAL

RUU Kamnas merupakan Undang Undang sistem yang mengintegrasikan peran, tugas dan fungsi penyelenggaraan keamanan nasional secara komprehensif dengan peran integrasi semua komunitas nasional untuk merespons spektrum permasalahan luas pada skala nasional agar dapat menjamin perlindungan kepada negara dan isinya.

Ada peran utama masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan keamanan nasional, dengan kata lain Undang

Undang Kamnas sebagai wujud dari *Collective Respond to Protect the Country* yang sarat sensitif terhadap disintegrasi, gangguan kedaulatan dan dampak lingkungan.

238 Membangun keamanan nasional untuk memperkuat kultur kelembagaan dalam proses demokratisasi dengan mengedepankan kepentingan nasional. Undang Undang Keadaan Bahaya yang masih berlaku saat ini sama sekali tidak menyinggung peran masyarakat dalam penyelesaian masalah nasional sebaliknya Undang Undang Kamnas menempatkan masyarakat sebagai subyek yang ikut serta dalam penyelesaian permasalahan nasional.

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang berperan melaksanakan simulasi dan memformulasikan solusi kepada Presiden yang melibatkan penyelenggara negara dan simpul masyarakat dalam suatu wadah yang bukan lembaga operasional berbeda dengan masa lalu seperti lembaga operasional Kopkamtib dan Bakortanas.

Undang Undang Kemanan Nasional tidak mengeliminasi keberadaan Undang Undang yang berlaku bahkan menyinergikan satu sama lainnya tanpa sedikitpun mengurangi substansi kewenangan dan menghilangkan kebebasan berdemokrasi.

PERSEPSI DAN POSISI

Sebenarnya kosakata keamanan nasional ada legitimasinya dalam Undang-Undang No 17 tahun 2007 yang merupakan arah pembangunan nasional jangka panjang perlunya keamanan nasional mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta menjaga keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara. Dalam Undang Undang Dasar 1945 kosakata yang dipergunakan

adalah sistem usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini dirasakan kosakata tersebut mempunyai makna yang sama.

Tidak dapat disangkal realitas dalam era kebebasan yang memerlukan konsolidasi kematangan sangat sering timbul misinformasi malahan disinformasi terhadap sesuatu yang kita ingin bangun sebagai pilar dan rambu serta navigasi dalam bentuk sistem keamanan nasional. Dengan demikian tidak perlu tersirat kesan paranoid sektoral dan multitafsir berlebihan yang pada akhirnya kita kehilangan momentum untuk memiliki suatu UU sistem yang perlu kita miliki untuk menjaga kepentingan nasional dalam era demokrasi. Amat sangat mungkin terjadi redaksional RUU Kamnas yang mengundang kekhawatiran berbagai pihak tentu ini bukan sakral dan pintu koreksi dalam proses legislasi sangat terbuka tetapi bahwa kita bertujuan memiliki UU yang sistemik ini layak kita pahami bersama urgensinya, serta kita semua memahami era demokrasi tetap memerlukan ketaatan terhadap asas dan penegakan hukum serta HAM.

239

Lebih jauh lahirnya RUU Keamanan Nasional telah melahirkan berbagai kekhawatiran:

1. Berdasarkan pobia sejarah yang berlebihan timbul kekhawatiran kembalinya TNI ke wilayah politik.
2. Sementara dengan keyakinan akan kemampuan Polri sekarang ini, dikhawatirkan mereduksi kewenangan Polri
3. Merangkum kekhawatiran itu timbul anggapan akan merusak kebebasan dan demokrasi

Dalam era demokratisasi pula segenap argumentasi dan kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan fakta dan kondisi riil persepsi masyarakat. Oleh sebab itulah dalam rangka penyusunan RUU Keamanan Nasional pada tahun 2009 telah dilakukan survei persepsi terhadap keamanan nasional. Beberapa hasil survei dapat dikemukakan sebagai berikut:

240

1. Mayoritas responden setuju bahwa keamanan nasional melingkupi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu (95,6%) dan merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah, aparat keamanan dan warga negara (96,8%).
2. Evaluasi responden akan TNI:
 - a. Sekitar 65 % yang positif menyatakan bahwa sikap anggota TNI dalam masyarakat cukup baik dan begitu pula halnya dengan kesejahteraan anggota TNI.
 - b. Untuk kompetensi TNI kira-kira 70% memberi evaluasi positif bahwa anggota TNI profesional, sigap dalam bidang pertahanan dan reformasi yang berlangsung dalam tubuh TNI berjalan baik.
 - c. Responden cukup menyadari mengenai kondisi alutsista TNI, karena kira-kira 64% responden menganggap bahwa kualitas dan jumlah pesawat tempur, kapal perang dan persenjataan TNI buruk adanya.
3. Evaluasi responden akan Polri:
 - a. Sekitar 76% responden menganggap kesejahteraan

anggota Polri sudah baik,

- b. Untuk kompetensi anggota Polri dalam mengatasi kriminalitas 62% yang menjawab baik
 - c. Sedangkan mengenai sikap anggota Polri dalam masyarakat, 53% responden berpendapat buruk.
4. Berkenaan dengan point di atas, sekitar 68% setuju bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga yang mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan keamanan nasional, sekitar 27,4% yang menyatakan tidak perlu. Lebih lanjut, sekitar 72,5% dari responden yang menyetujui terbentuknya lembaga tersebut berpendapat bahwa apabila lembaga tersebut harus dibentuk sebaiknya ditempatkan langsung di bawah Presiden. 241
 5. Agar sistem keamanan nasional memiliki kekuatan hukum, maka 81% responden memandang perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur keamanan nasional.

Terhadap berbagai kekhawatiran dan usulan yang berkembang kiranya perlu soliditas persepsi dari jajaran pemerintahan baik di kementerian/lembaga pemerintah non kementerian beserta simpul kekuatan nasional lain, dengan berpegang pada:

1. Kenyal dalam penyempurnaan.
2. Tujuan urgensi bangsa miliki undang-undang sistem tercapai.
3. Realita era demokrasi, yang tetap taat asas, hukum dan

menjunjung tinggi HAM.

Saat ini RUU Kamnas sedang dalam proses legislasi yang diolah oleh Pansus RUU Kamnas, sesuai jadwal proses legislasi RUU Kamnas menjadi salah satu target penyelesaian Prolegnas pada tahun 2013. Pemerintah merespons positif berbagai usulan dan koreksi untuk penyempurnaan RUU Kamnas ini.

242 Ada tiga hal yang jadi pedoman respons bagi pemerintah. Pertama, asas kekenyalan yang memberi ruang kepada publik untuk memberikan perbaikan dan koreksi dalam masa proses legislasi. Kedua, asas tujuan perlu jadi pegangan untuk kita tidak lepas dari kebutuhan untuk memiliki suatu sistem Keamanan Nasional. Ketiga asas realita sebagai negara demokrasi tentunya perlu taat kepada supremasi sipil dan menjunjung tinggi penegakan hukum.

Dengan memperhatikan urgensi RUU Kamnas sebagai penjabaran dari Undang Undang Dasar 1945 yang sewajarnya didukung oleh komponen bangsa dan dengan segala keterbatasan formulasi RUU Keamanan Nasional, Pemerintah mengedepankan sikap keterbukaan dan sikap kenegarawanan dalam mengantarkan kesempurnaan proses legislasi RUU Kamnas ini, tanpa perlu menimbulkan apriori dan kekhawatiran bahkan menakutkan sebagian kalangan masyarakat.



28.

MENYEIMBANGKAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN, MENGATASI KRISIS EKONOMI

244 **D**alam dekade terakhir abad ke-20 tatanan geopolitik dunia diwarnai dengan saratnya kepentingan nasional dari negara-negara super power ekonomi untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Perwujudan dari seluruh upaya ini tampak pada cara dan tingkah laku ekonomi dalam berinteraksi dengan negara lain di dalam pergaulan internasional.

Perkembangan ilmu dan teknologi, terutama sistem teknologi informasi yang diimbangi oleh globalisasi aktivitas finansial menjadi “platform” baru pola interdependensi negara-negara maupun kelompok ekonomi adikuasa di dunia. Titik kulminasi dari bertemunya berbagai kepentingan di era paska perang dingin ini telah bernuansa pada suatu kondisi krisis di kawasan Asia pada periode tahun 1997 dan tahun-tahun selanjutnya, yang berkontribusi kepada kerusakan tatanan perekonomian lama yang mengimbas pada sistem sosial, politik dan ekonomi negara di kawasan Asia dan memunculkan wajah baru reformasi tatanan politik ekonomi.

Di Indonesia gambaran dari akibat pengaruh situasi politik ekonomi kawasan tercermin pada runtuhnya sendi-sendi perekonomian bangsa di awal krisis, yang segera menerjemahkan

diri pada krisis sistem politik dan ketatanegaraan. Krisis di Indonesia telah mengubah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta bercorak multidimensi, sehingga pada gilirannya menyentuh hajat hidup rakyat yang bernuansa pada masalah kesejahteraan dan keamanan.

Dengan melakukan kajian interaksi peran keamanan dan kesejahteraan, yang merujuk baik kepada konsepsi Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara maupun melalui telaah berdasarkan data empirik, diperoleh titik fokus sasaran upaya penanganan akibat krisis, yang diformulasikan ke dalam suatu langkah prioritas penyelesaian masalah.

Berdasarkan pertimbangan seluruh kondisi lingkungan strategis global maupun regional, dan mengacu kepada kondisi faktual bangsa pada saat ini, maka suatu strategi penangkalan untuk mengatasi krisis dapat dirumuskan dengan pendekatan aspek kesejahteraan dengan titik berat dekonsentrasi aktivitas ekonomi dan aspek keamanan dengan titik berat intelijen ekonomi secara seimbang dan harmonis.

Dengan didukung oleh visi dan komitmen kebangsaan yang

kuat, suatu pendekatan simultan pada masalah kesejahteraan dan keamanan yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Indonesia, diharapkan akan membawa kepada suatu solusi pemecahan masalah krisis ekonomi.

PENGARUH SITUASI LINGKUNGAN STRATEGIS

246 Dengan berakhirnya era perang dingin di dunia, maka wujud dari kepentingan politik negara-negara besar di dunia mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Bentuk pergeseran ideologi yang biasa diikuti oleh konflik militer terbuka telah beralih kepada suatu bentuk pergeseran ekonomi dengan orientasi yang berfokus kepada kepentingan nasional maupun regional negara raksasa di dunia.

Bentuk kepentingan politik yang bermuara pada tekanan ekonomi ini semakin memperlihatkan kecanggihannya dari waktu ke waktu, yang pada titik kulminasinya adalah dengan penggunaan komoditi paling besar dan paling kritis di dunia yaitu “mata uang”, sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Dalam pertengahan dekade terakhir abad ke-20, beberapa negara raksasa ekonomi maupun kelompok ekonomi di dunia, secara bersungguh-sungguh telah mempersiapkan upaya besar dalam menghadapi kecenderungan ekonomi global dikaitkan dengan kepentingan nasional maupun regionalnya, sekaligus guna mengantisipasi era ekonomi dunia yang terbuka pada milenium ketiga.

Berbagai perjanjian multilateral di bidang perdagangan bebas, seperti GATT dan WTO, diratifikasi. Demikian pula kelompok negara pendukung ekonomi masa depan yang terbuka seperti

NAFTA, APEC, yang disponsori oleh Amerika, secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pertemuan dan membuat perjanjian kerjasama guna membentuk suatu kesepakatan bagi proses terjadinya infrastruktur pasar bebas pada akhir dekade abad 20 serta di awal milenium baru.

Krisis ekonomi di Asia yang diawali dari suatu situasi krisis ekonomi di Korea pada awal tahun 1997, tidak dapat dipisahkan dari kombinasi kebijakan pemerintah setempat dengan situasi keuangan global yang begitu likuid. Masuknya dana jangka pendek dari para investor dunia, yakni para *Fund Manager*, di mana dana tersebut biasa dinamakan sebagai *hot money*, telah melebihi daya tampung perekonomian negara setempat.

247

Pemberlakuan infrastruktur pasar bebas ini, tanpa disadari memengaruhi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang sangat bergantung kepada negara pemberi pinjaman dan fundamental struktur perekonomiannya masih menitikberatkan kepada komoditi-komoditi impor, serta struktur moneterinya cenderung sangat bergantung pada kegiatan perdagangan luar negeri.

PENGARUH GLOBAL

Kecenderungan kepentingan politik negara besar dalam memengaruhi sistem perekonomian dunia dapat ditinjau dari beberapa indikasi.

Amerika sebagai negara raksasa ekonomi yang menggunakan US Dollar dalam transaksi dalam negerinya, sekaligus juga menggunakan US Dollar dalam transaksi perdagangan dunia, telah dihadapkan pada dua masalah utama yang selalu menghantui

perekonomiannya, yakni tingginya tingkat pengangguran serta inflasi.

248

Hal ini dapat dipahami, mengingat besarnya tingkat sirkulasi mata uang domestik dan dunia ditangani oleh sistem perbankan Amerika, sementara pada saat yang sama Federal Reserve, sebagai Bank Sentral Amerika bertindak sebagai otoritas moneter atas US Dollar, termasuk mencetak mata uang US Dollar sebagai mata uang domestik dan sekaligus sebagai alat tukar pada perdagangan transnasional. Dengan demikian, terlepas dari tumbuh atau tidaknya sistem perekonomian Amerika, mata uang US Dollar sangat besar tingkat sirkulasinya di Amerika dan pada saat yang sama, negara raksasa ekonomi dunia yang menggunakan US Dollar sebagai acuan mata uangnya, juga melihat Amerika sebagai pasar raksasa bagi produk ekspornya. Hal inilah yang memicu besarnya defisit neraca transaksi perdagangan Amerika dari tahun ke tahun terhadap hampir semua negara di dunia.

Dalam dekade 70-an dan 80-an, upaya untuk menekan pengangguran dan inflasi selalu diusahakan. Cara-cara yang digunakan antara lain dengan melakukan koreksi terus menerus atas tingkat suku bunga US Dollar, melakukan pendekatan fiskal, dan upaya menjual surat berharga pemerintah (*US Treasury Bills/ US Government Bond*), sebagai bagian dari cara untuk menekan defisit neraca transaksi dalam negeri, serta melakukan kontraksi atas mata uang US Dollar yang berada di dalam negeri. Upaya yang dilakukan terutama diakhir dekade 80-an serta awal 90-an tersebut dirasa kurang efektif mengingat jumlah uang US Dollar yang beredar dari waktu ke waktu sudah melampaui kemampuan pengontrolan Bank Sentral Amerika. Namun demikian, dengan berkembangnya fenomena transaksi keuangan dunia melalui transaksi mata uang sebagai komoditi, atau dalam bentuk jual

beli surat berharga pemerintah Amerika (mencapai perputaran kurang lebih US \$ 2,6 triliun setiap 8 hari), telah menyebabkan dampak inflasi yang dicerminkan dengan merosotnya nilai tukar US Dollar terhadap mata uang dunia lain dapat dikendalikan.

Dengan masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Amerika tersebut, yang pemecahannya adalah menggerakkan mata uang sebagai komoditi ekspor yang diperdagangkan, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah suatu keputusan politik akan penghormatan negara-negara di dunia atas asas pasar bebas.

249

Melalui sosialisasi asas pasar bebas ke seluruh dunia, di mana justru mata uangnya yang diperdagangkan (diekspor), maka Amerika sedang memainkan suatu peran kepentingan nasional bagi kemakmuran bangsanya.

Dalam konteks ini maka infrastruktur tingkah laku yang paling tepat adalah isu hak asasi manusia dan demokratisasi. Tidak dapat disangkal bahwa asas universalitas dalam hak asasi manusia dan sifat penghormatan atas hak-hak individual dalam demokrasi secara tepat berkorelasi dengan sifat universalisme US Dollar yang telah dijadikan bahasa keuangan global.

Dengan demikian maka keputusan untuk menjalankan politik luar negeri yang sangat berat bertumpu pada asas hak asasi manusia, demokrasi, serta ekonomi pasar bebas, pada dasarnya adalah menjalankan “*Core Values*” bangsa Amerika yang perwujudannya adalah kemakmuran dan kepentingan nasional Amerika.

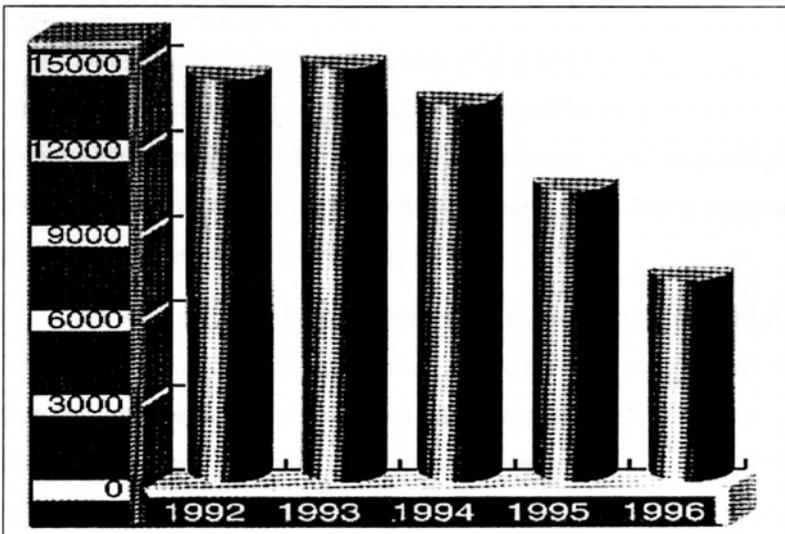
Untuk itu sikap politik sebagai “Polisi Dunia” sangat diperlukan untuk melegitimasi suatu tindakan atas semua resistensi

serta kebuntuan sikap negara di dunia terhadap suatu keinginan politiknya.

Atas dasar hal-hal tersebut, dapat digambarkan betapa negara-negara di dunia ini menjadi katup atas kemakmuran di Amerika sehingga bagi negara yang tidak memiliki “*Core Values*” yang mengakar dan fundamental ekonomi yang kuat akan segera mengalami dampak negatif penerapan “*Core Values*” baru ini.

250 Sementara itu, Jepang dalam dekade terakhir abad ke 20, telah mengalami problem internal yang sangat serius. Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 terdapat penurunan surplus perdagangan luar negeri yang terus menerus (lihat tabel berikut).

**SURPLUS NERACA PERDAGANGAN JEPANG
TAHUN 1992-1996
(DALAM MILIAR YEN)**



Sumber : Hongkong Bank

Hal tersebut juga ditambah dengan ancaman kredit macet di sektor properti akibat dari kebiasaan para investor Jepang meminjam dana dari Bank Jepang secara mudah dan murah untuk kemudian diinvestasikan di sektor properti secara besar-besaran, terutama di negara ketiga, seperti Amerika, tempat kepentingan politik Jepang banyak digantungkan.

Pada kenyataannya dengan pergerakan nilai tukar akibat perdagangan mata uang telah menyebabkan mata uang Yen terhadap US Dollar menguat secara luar biasa dari tahun ke tahun. Nilai tukar 260 Yen/US Dollar pada tahun 1985, menjadi 130 Yen/US\$ dalam tahun 1987, 160 Yen/US Dollar pada tahun 1990 dan pada puncaknya kurang lebih 80 Yen/US Dollar pada awal 1995.

251

Dengan sistem moneter Jepang yang berdasarkan mata uang Yen, maka jumlah Yen yang dibukukan dalam sistem neraca perdagangannya menjadi semakin turun, sementara nilai propertinya di luar negeri menjadi rendah akibat konversi mata uang negara setempat terhadap Yen lebih lemah.

Konsekuensi dari keadaan ini, maka properti yang dijaminan oleh para investor Jepang kepada bank-bank Jepang menjadi bernilai lebih rendah dari pinjaman yang diberikan. Demikian pula hasil usaha yang diperoleh dari properti di negara tersebut menjadi lebih rendah dari yang diproyeksikan, sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman ke perbankan nasional Jepang.

Seluruh keadaan ini pada awalnya dipicu oleh kemajuan perekonomian Jepang yang menakjubkan dalam dekade 80-an, yang menyebabkan kepentingan politik Jepang cenderung sangat berat kepada suatu ekspansi besar-besaran di pasar dunia termasuk yang terbesar adalah Amerika Serikat, serta pada waktu

yang bersamaan melakukan investasi besar-besaran di kawasan Asia terutama Thailand dan Indonesia. Hal itu dapat dipahami karena Jepang sebagai negara kepulauan dengan frekuensi gempa terbesar di dunia adalah negara yang amat kaya dengan sumber daya manusia, namun pada saat yang sama relatif sangat miskin akan sumber daya alam.

252 Alur kepentingan nasional inilah yang membawa Jepang kepada suatu orientasi keputusan politik bagi pembentukan infrastruktur pasar raksasa di Amerika pada era 1970-an dan antara lain investasi dalam skala besar di Indonesia, yang kesemuanya berkontribusi menjadikan Jepang sebagai negara *super power* ekonomi dunia.

Dengan tekanan ekonomi yang dialami akibat menguatnya nilai mata uang Yen secara terus menerus telah mendorong pemerintah Jepang melakukan suatu upaya raksasa. Inti persoalan utama yang dibaca adalah problem struktural dalam masalah demografi, dan kebebasan finansial penduduk Jepang.

Dengan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam perekonomiannya, maka diprediksikan akan terjadi masalah ketika statistik justru menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan kelahiran di Jepang saat itu hanya 1,4 anak/ keluarga, sehingga hal tersebut dianggap terlalu rendah untuk mampu meningkatkan jumlah populasi guna mendukung industrinya.

Sementara jumlah manula terus bertambah dari waktu ke waktu dikarenakan semakin membaiknya tingkat kesehatan, sehingga diperhitungkan pada tahun 2013 angkatan kerja akan menyusut dengan cepat dan diestimasikan bahwa Jepang akan kehilangan 9 juta pekerja pada tahun 2025. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut, maka tidak ada jalan lain diperlukan upaya yang sangat

besar untuk meningkatkan produktivitas per kapita penduduk Jepang setinggi mungkin guna tetap memelihara standar hidup mereka.

Untuk itu pemerintah Jepang mengumumkan suatu keputusan politik, yaitu mencanangkan program Reformasi Big-Bang, yang intinya adalah deregulasi di bidang institusi keuangan, di mana sejak 1 April 1998 seluruh transaksi lembaga keuangan di luar dan di dalam negeri akan dibebaskan dan semua warganegara akan diijinkan untuk membuka rekening Yen di semua Bank Asing (non Bank Jepang) untuk pertama kalinya. Dengan kata lain warganegara Jepang didorong untuk lebih mandiri, meningkatkan produktivitasnya dengan mau meminjam uang di bank asing, namun pada saat yang bersamaan sistem perbankan Jepang sejak saat yang ditetapkan tersebut akan bersaing dengan bank asing terutama di negara dimana kepentingan bisnis Jepang paling berorientasi.

253

Dalam memberikan gambaran tentang tatanan ekonomi dunia yang baru pada saat ini, tidaklah bisa dilepaskan dari kemajuan sistem informasi yang canggih serta mengglobal yang mendukung proses peredaran uang di dunia.

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju dan mengglobal, telah menimbulkan konsekuensi terbentuknya infrastruktur pendukung di pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hongkong, Tokyo, London, Frankfurt, New York, yang didukung oleh perkembangan jaringan informasi sistem keuangan global, telah mampu menggerakkan (transfer) dana dalam jumlah yang spektakuler serta dalam hitungan detik.

Sebelum krisis moneter menimpa Asia pada tahun 1997, suatu

survey dari European Monetary Union telah menyatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 1995 perkiraan perdagangan valas di dunia telah mencapai US \$ 1,9 triliun/hari, sedang menurut BIS (Bank For International Settlement), yaitu Bank Sentral dari bank-bank sentral 10 negara maju, saat itu volume perdagangan valas dunia telah mencapai US \$ 1,57 triliun/hari. Meskipun data yang diberikan cenderung kepada data perhitungan secara kasar, namun terdapat gambaran bahwa ada sejumlah dana dalam suatu volume yang tidak terbayangkan telah bergerak cepat dalam suatu transaksi transnasional, transaksi mata uang lintas batas negara yang relatif terbuka terutama bagi negara yang telah menerapkan ekonomi pasar bebas.

Dengan mengabaikan, bahkan melupakan banjir likuiditas yang dapat merusak kemampuan otoritas moneter serta mengakibatkan konsekuensi hebat pada sistem nilai terhadap suatu negara, maka ketergantungan ekonomi pada pinjaman luar negeri, pasti akan memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi terhadap keluar masuknya dana tersebut.

Gambaran yang sebaliknya terjadi pada Amerika, tercapainya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi, inflasi yang rendah serta pengangguran yang rendah justru ketika negara tersebut mengalami defisit neraca transaksi perdagangannya dengan hampir semua negara raksasa ekonomi dunia, namun pada saat yang sama mengalami penguatan nilai mata uang akibat tingginya permintaan akan komoditi mata uang US Dollar terutama di negara yang sedang dilanda krisis ekonomi.

Fenomena ini telah memberikan suatu pengertian bahwa di dunia telah lahir suatu paradigma ekonomi baru dimana asumsi dasar bahwa ukuran perdagangan komoditi fisik transnasional

dapat merefleksikan ukuran kemajuan suatu kemakmuran bangsa menjadi tidak sepenuhnya benar. Kestabilan nilai mata uang yang pada gilirannya mewakili nilai kekuatan ekonomi suatu bangsa menjadi orientasi baru perekonomian negara.

Memberikan penggambaran yang lebih riil tentang perekonomian dunia pada dasarnya melibatkan lebih dari dua potensi raksasa ekonomi, seperti Jepang dan Amerika. Negara raksasa eksportir Asia seperti Cina, juga mempunyai faktor dominan yang mampu memengaruhi tingkah laku politik Amerika maupun Jepang.

255

Dengan bentuk penolakan Cina terhadap perdagangan bebas mata uang (mata uang Yuan tidak diperdagangkan di pasar valas dunia), maka sistem perekonomian Cina relatif tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar mata uang. Di sisi lain kekuatan sumber daya manusia yang besar dan sangat murah, didukung oleh terbukanya Cina terhadap masuknya teknologi Barat dalam revolusi industri dua dekade yang lalu telah membuat Cina menjadi negara pengeksport hasil industri modern yang murah ke Amerika, Eropa, bahkan ke Jepang sendiri.

Sistem politik yang otoriter dan homogen, namun berbasis kepada industri Barat, telah menjadikan Cina sebagai lingkungan yang kondusif bagi masuknya investor Barat terutama yang melihat kemungkinan Cina sebagai pasar raksasa (dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar), sekaligus bagi lahan pemindahan industri dari negaranya yang dinilai tidak efisien dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi otomatisasi yang semakin canggih. Dengan situasi tersebut, maka baik Jepang maupun Amerika selalu memperhitungkan kemajuan ekspor Cina. Suatu tindakan mendevaluasi secara sepihak mata uang Cina, akan

menyebabkan murah dan membanjirnya barang produk Cina ke negara maju terutama Amerika.

PENGARUH REGIONAL

256 Krisis yang dimulai dari Korea pada awal tahun 1997, yang memberi efek domino ke seluruh kawasan Asia telah membuat sejumlah dana sebesar kurang lebih sama dengan US \$ 100 miliar keluar dari kawasan ini pada saat pertengahan tahun 1997. Situasi ini telah membuat nilai asset di pasar Asia jatuh, dan Asia jatuh ke dalam resesi ekonomi.

Keadaan yang terjadi di Asia pada tahun 1997 serupa dengan situasi yang terjadi di negara Amerika Latin, yakni ketika pemerintah Mexico melakukan devaluasi atas mata uang Pesonya dalam tahun 1995, di tengah-tengah banjir investasi dari para investor Amerika.

Krisis di Korea bergulir cepat ke Thailand pada awal tahun 1997. Segera setelah itu ancaman ini dikenal sebagai "Tom Yum Effect", yakni efek berantai dari kepanikan investor. Hal ini segera saja mencemaskan seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai negara Asia dimana investor Jepang mengambil porsi terbesar di dalam investasinya di Asia.

Pada gilirannya situasi ini menjadi krisis regional yang mendorong suatu devaluasi mata uang, akibat jatuhnya nilai mata uang sebagai konsekuensi keluarnya sejumlah dana yang masif dari negara di kawasan tersebut yang diikuti oleh kerusakan pada sistem perbankan.

Rangkaian kejadian krisis di Asia pada tahun 1997 tidak

langsung menyentuh sistem perekonomian suatu negara. Gejala kerusakan sistem perekonomian hampir selalu dimulai dari suatu serangan atas nilai mata uang suatu negara, dimana serangan tersebut bergulir secara gradual, cepat dan eskalatif, menyebabkan bentuk serangan ini disebut sebagai serangan moneter (lihat peta berikut).

PETA SERANGAN MONETER DI ASIA PADA TAHUN 1997



Diawali pada tahun 1997, terjadi skandal Hanbo di Korea. Hanbo, adalah produsen baja nomor dua di Korea, pada tanggal 23 Januari 1997 dinyatakan bangkrut, setelah gagal melunasi hutangnya sebesar US \$ 15 juta dari total tunggakan US \$ 6 miliar. Hanbo adalah konglomerat no 14 di Korea. Bank Sentral Korea segera menyuntikkan dana sebesar 2,3 miliar. Kejadian ini disebut skandal, karena melibatkan tokoh nasional, Kim Young Sam serta putra keduanya, Kim Hyun Chul.

Skandal Hanbo segera diikuti oleh skandal KIA pada bulan-bulan berikutnya (KIA adalah industri otomotif yang menurut rencana akan menjadi basis mobil mandiri untuk Indonesia). Skandal di Korea segera saja melemahkan nilai Won. Apabila ditelusuri secara cermat, maka kejatuhan nilai Won disebabkan oleh investor (investor Jepang cukup dominan) yang menarik dana jangka pendeknya (modal kerja) yang biasa selalu diperpanjang apabila jatuh tempo. Dampak akhir dari krisis Korea justru tidak di dalam sistem keuangannya tapi pada sektor industri. Bantuan IMF secara nyata berkorelasi kepada kepentingan Jepang sebagai salah satu negara kontributor terbesar IMF. Justru syarat utama dari bantuan IMF, di samping mengganti pemerintahan, adalah tekanan agar industri Korea lebih terbuka kepada kepemilikan asing. Deregulasi di bidang industri, terutama industri otomotif inilah yang menyebabkan sistem pengendalian pangsa pasar Korea tidak sepenuhnya di tangan konglomerasi Korea.

Di Thailand, pada pertengahan Mei 1997, mata uang Baht dihantam spekulasi. Para “dealer” mata uang (biasa disebut “Chartisf”) ramai-ramai menjual Baht, dan membeli US Dollar. Isu devaluasi yang ditiupkan oleh spekulasi dan dieskalasi besar-besaran oleh media massa telah membuat “rush” terhadap US Dollar (terjadi pembelian besar-besaran Dollar di dalam negeri). Dalam kaitan krisis di Thailand, istilah “Issue” mengemuka karena saat terjadinya “rush” tersebut, tidak terdapat indikator yang signifikan yang harus membuat para investor menarik dananya dari Thailand.

Di Thailand program bantuan dari IMF mensyaratkan lebih dahulu penutupan 16 lembaga keuangannya pada 27 Juni 1997. Penutupan ini menimbulkan dampak berantai dan segera melemahkan sistem perbankannya. Nuansa kepentingan Jepang sangat tampak pada saat Thailand memperoleh 3,9 miliar dana

bantuan IMF pada tanggal 20 Agustus 1997 yang dikenal sebagai Paket Tokyo.

Negara berikut yang terkena dampak krisis di Thailand selain Indonesia adalah Philipina. Tingginya tingkat pinjaman perbankan ke sektor real estate memicu kekhawatiran terjadinya krisis serupa yang segera saja menyebabkan penarikan dana jangka pendek keluar Philipina. Jatuhnya nilai Peso terhadap US Dollar pada awal Juli 1997 menandai proses jatuhnya nilai mata uang tersebut pada bulan-bulan berikutnya.

259

Hampir bersamaan dengan Philipina, maka Malaysia pun pada pertengahan Juli terkena krisis mata uang yang terus melemah sampai ditetapkan suatu langkah drastis oleh pemerintah Malaysia untuk membatasi transaksi mata uang Ringgit serta mematok Ringgit pada kisaran MYR 3,80/US Dollar.

Situasi yang terbalik terjadi di Cina. Negara yang tidak memperdagangkan mata uangnya di pasaran dunia dianggap memiliki sistem perekonomian dan moneter yang relatif stabil. Dalam situasi demikian, maka dana global yang bergerak mencari tempat baru, segera menyerbu ke Cina. Dampaknya segera terlihat. Krisis Korea yang diakumulasi oleh krisis berbagai negara di kawasan Asia telah menyebabkan sejumlah besar valuta asing memasuki Cina, akibatnya mata uang Cina Yuan segera mengalami penguatan yang sangat signifikan sepanjang tahun 1997. Di satu pihak akibat positifnya adalah meningkatnya investasi di Cina, namun di lain pihak menguatnya nilai Yuan dalam perdagangan internasional telah menyebabkan melemahnya daya saing ekspor hasil industri Cina. Hal inilah yang menyebabkan pada akhir 1997, pemerintah Cina memberi sinyal untuk mendevaluasi mata uang Yuannya. Hasilnya luar biasa. Kekhawatiran negara raksasa dollar

Amerika dan Jepang akan banjir ekspor hasil industri Cina yang menjadi murah, menyebabkan nilai Yuan segera stabil sepanjang tahun 1998.

PENGARUH NASIONAL

260 Pada akhir triwulan I tahun 1997 terdapat kecenderungan yang sangat kuat, bahwa secara sistematis, terus menerus dan terkoordinasi terjadi proses pembentukan ketidakpercayaan pasar terhadap surat hutang dari Indonesia terutama surat hutang yang dikeluarkan oleh bank milik pemerintah. Caranya dengan melakukan penjualan “dumping” (penjualan dengan harga diskon) dalam volume relatif kecil, namun terus menerus.

Dengan teknologi informasi yang terbuka di sektor keuangan, dibentuk sentimen negatif pasar terhadap Indonesia. Tindakan “dumping” surat berharga mulai dikombinasi dengan berita lama tentang isu kerusuhan, hak asasi manusia dan suksesi.

Gejala aktivitas politik ekonomi yang pada saat itu diakumulasi oleh serangkaian kejadian isu keamanan (antara lain isu born) telah mulai membentuk suatu persepsi publik yang mengarah kepada pemikiran ketidakstabilan politik, ekonomi dan keamanan sekaligus. Ketidakmampuan instrumen birokrasi Indonesia dalam membaca, menganalisa serta memecahkan masalah secara komprehensif, telah menyebabkanantisipasi serangan tidak dilakukan secara proporsional. Tidak tergambar suatu bentuk pasar dapat direkayasa dengan memanfaatkan elemen-elemen politik dan stabilitas keamanan pada suatu infrastruktur sistem informasi pembentuk opini di sektor keuangan.

Hal ini menyebabkan timbulnya permintaan US Dollar dalam

negeri naik secara lambat dan pasti dan eksodus investor asing ke luar negeri. Pada gilirannya seluruh situasi ini menyebabkan keguncangan sistem perbankan nasional. Nuansa krisis di Indonesia pada saat itu terlihat sangat berat bertumpu pada kepentingan nasional Jepang.

PERTAMA, SASARAN SERANGAN MONETER DI INDONESIA

Arah dari serangan moneter terfokus pada suatu kondisi dimana nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar tidak terkendali. Dalam kondisi normal, nilai tukar dibentuk oleh mekanisme pasar, berupa permintaan dan penawaran komoditi Rupiah terhadap US Dollar di dalam perdagangan mata uang yang dikenal dengan transaksi valas, dimana nilai akhir mata uang benar-benar merefleksikan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Sasaran serangan moneter ini jelas merupakan suatu sasaran antara, terhadap serangan kepada sistem Ketahanan Nasional Indonesia. Wilayah kritis kebijakan pemerintah Orde Baru adalah perekonomian, di mana medan kritisnya adalah sistem perbankan, karena semua aktivitas perekonomian negara disirkulasikan melalui sistem ini. Di medan kritis sistem perbankan inilah beradanya titik kritis keterbukaan rezim devisa bebas, berupa sistem nilai tukar Rupiah bebas. Di titik sistem nilai tukar inilah faktor besarnya pinjaman luar negeri Indonesia yang akan menentukan besarnya kontribusi perekonomian bangsa untuk mampu mengembalikan pinjaman, menjadi titik sasaran yang sangat krusial untuk diserang.

261

KEDUA, OPERASIONAL SERANGAN MONETER DI INDONESIA

Melalui pemanfaatan sentimen pasar, maka proses pembentukan opini pelaku pasar dilakukan. *Eskalasi* proses yang

didukung oleh pemberitaan media secara meluas menjadikan tingkah laku pelaku pasar diadopsi oleh tingkah laku publik. Rangkaian pembentukan sentimen ketidakpercayaan dilakukan antara lain :

- a. Melakukan “*dumping*” (banting harga) atas surat hutang bank-bank pemerintah.
- b. Beredarnya isu born di lokasi sentral keuangan Jakarta justru pada setiap puncak aktivitas harian transaksi keuangan dengan pasar uang dunia. Putusnya transaksi karena para “*dealer*” (pelaku transaksi pasar uang) meninggalkan gedung dengan alasan keamanan, justru menimbulkan dampak psikhologis hebat bagi “*counter part*” dealer di pusat keuangan dunia, yang dalam banyak hal menjadi sumber informasi bagi pemilik dana (*fund manager/investor*) di luar negeri.
- c. Memperdagangkan mata uang Asia Tenggara pada Juli 1997 di *New York Cotton Exchange* dan pasar uang Dublin (Irlandia) untuk transaksi “*future*” (masa depan) atas mata uang Rupiah, Ringgit dan Baht yang memberi keleluasaan untuk dimanfaatkan oleh spekulasi merekayasa suatu transaksi nilai tukar.
- d. Pengumuman Indonesia sebagai negara peringkat ke 46 dari 52 negara yang paling korup berdasarkan perhitungan *Corruption Perception Index* (CPI), yang dilakukan oleh *Transparancy International*.

Dikombinasi oleh pemberitaan skala luas oleh media yang mengutip komentar pakar yang lebih banyak menimbulkan

ketidakpastian, terbentuk krisis kepercayaan atas nilai Rupiah. Situasi ini diperparah oleh tindakan penutupan 16 bank di Indonesia atas permintaan IMF November 1997, serta pernyataan spekulan raksasa dunia, George Soros pada bulan September 1997 di Hongkong, bahwa Rupiah berada di tangannya, artinya spekulan berada pada posisi memborong US Dollar. Ketika opini pasar yang diikuti oleh tingkah laku publik sudah satu arah maka terbentuk rasa tidak percaya akibat ketidakpastian harga mata uang pada transaksi “future” (nilai Rupiah tidak dapat diprediksi dan cenderung terus melemah).

263

Dalam situasi tersebut, maka isu yang berkembang dengan mudah digunakan untuk memanipulasi permintaan dan penawaran Rupiah terhadap US Dollar di pasar uang. Bank Sentral selaku otoritas moneter, di samping menutup 16 bank justru melakukan pelepasan kendali atas penentuan nilai tukar. Akibatnya dapat diduga, nilai tukar yang menjadi dasar transaksi ekonomi berbasis valuta asing ditentukan oleh ulah pelaku pasar yang umumnya para spekulan mata uang. Korelasi krisis moneter pada tatanan politik ekonomi Indonesia telah membuka suatu persepsi bahwa krisis ini pada awalnya berbentuk suatu serangan moneter yang mempunyai target berkelanjutan.

Pada dasarnya setiap investor adalah pengusaha, yang artinya tujuan dari transaksinya adalah memperoleh keuntungan. Sifat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya pada prinsipnya selalu dilakukan sampai batas yang memungkinkan “*counter part*” bisnis yang merugi dapat memperkuat diri untuk kemudian bertransaksi lagi. Krisis Poundsterling yang merugikan pemerintah Inggris akibat jatuhnya nilai Pound pada tahun 1992 yang dilakukan oleh spekulan, nyata tidak menghancurkan perekonomian Inggris.

Krisis di Indonesia terlihat bernuansa terencana, matang, gradual, konsisten serta berlanjut disamping mempunyai sifat mematikan, yang bukan merupakan karakter bisnis pelaku pasar kelas dunia. Efek “multiplier” (berantai) dari turunnya nilai rupiah terhadap US Dollar sejalan dengan kepentingan politik serangan, dimana secara perlahan dan pasti diakomodasi oleh pemerintah. Namun hal ini tidak mengabaikan keuntungan besar yang diperoleh pelaku yang merekayasa nilai tukar tersebut.

264 Korelasi nyata ditunjukkan oleh pernyataan Menlu AS, Madeleine Albright pada pertemuan dengan para Menlu di Malaysia pada kuartal ketiga tahun 1997 yang isinya bernada negatif terhadap pemerintahan di Asia yang dianggap menjalankan politik otoriter dan tidak disukai oleh Amerika. Indikasi krisis Asia dikaitkan oleh situasi negara yang bersangkutan. Pada saat itu, krisis memiliki warna politik yang didominasi oleh isu kepentingan nasional Amerika dalam menjalankan kebijakan luar negeri tentang hak asasi manusia, demokrasi dan pasar bebas. Situasi tersebut menimbulkan implikasi-implikasi baik yang langsung kepada bidang moneter, maupun yang bersifat lanjutan pada tatanan politik ekonomi.

1. Implikasi Langsung Krisis Moneter

Ketahanan ekonomi Indonesia di bidang moneter hancur, karena nilai ekonomi Indonesia yang direfleksikan dalam nilai tukar menjadi tidak berarti. Krisis kepercayaan dari sudut pandang investasi menyebabkan para investor menarik dananya dan mengakibatkan suatu krisis likuiditas yang ditimbulkan oleh meningkatnya permintaan US Dollar di dalam negeri yang sangat tajam.

Timbulnya krisis nilai tukar di antara para pemilik dana, telah menyebabkan “capital flight” (keluarnya modal besar-besaran dari Indonesia) yang menurut indikasi, dana masuk dalam Asian Currency Unit, suatu sistem pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah Singapura, adalah sebesar US Dollar 43,7 miliar pada akhir 1997. Hal ini memicu suatu kerusakan yang besar pada sistem perbankan nasional.

2. Implikasi Krisis Moneter Pada Tatanan Politik

Dampak krisis moneter akan memengaruhi seluruh tatanan kehidupan manakala hal ini menyentuh sektor riil, dan dibuktikan dengan antisipasi keliru pemerintah terhadap krisis melalui penutupan 16 bank, institusi keuangan yang menampung hajat perekonomian publik.

265

Bermula dari krisis yang sudah diadopsi publik sebagai krisis masyarakat, maka dukungan peliputan informasi yang tidak terkendali yang oleh media massa memperbesar tekanan yang negatif pada kondisi umum nasional. Berbagai informasi negatif yang bersumber pada persoalan latent mencuat dan secara perlahan bertransformasi pada isu baru yakni isu reformasi.

Penangkalan terhadap serangan moneter tidak tersentuh esensinya. Sebaliknya esensi masalah moneter beralih kepada penggalian problematik masalah nasional yang terpendam dan bernuansa pada isu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Masalah moneter telah berkembang menjadi masalah ekonomi dan sosial yang menyentuh mayoritas rakyat banyak. Dimulai dari kaum intelektual, dosen dan mahasiswa, semua

kekuatan oposan berusaha mewakili dan mengaktualisasi permasalahan. Usaha menarik simpati rakyat, secara perlahan memberi makna pergeseran krisis pada masalah politik dengan mengangkat isu hak asasi manusia.

Pidato tahunan “State of Union” Amerika, Bill Clinton, pada tanggal 27 Januari 1998, secara kongkrit dan gamblang menjawab dugaan suatu konspirasi kepentingan negara besar dalam krisis di Indonesia. Dikatakan bahwa: “... Tidak ada bangsa manapun di dunia yang mampu bangkit dari krisis ekonominya bila tidak mengadakan reformasi...”; dan di sisi lain dikatakan. “... Kepemimpinan kita di seluruh dunia sekarang ini tak tertandingi siapa pun. Kondisi persatuan dan kesatuan kita sekarang ini benar-benar kuat dan kukuh”.

266

Selanjutnya, di Indonesia isu-isu tersebut menjadi solid dan mengkristal serta terfokus pada pimpinan nasional. Masalah moneter telah mengimbas pada masalah politik ekonomi, dan pada puncaknya dimana saat itu seluruh sistem kenegaraan berat bertumpu pada figur kepemimpinan nasional, maka seluruh gatra Ketahanan Nasional Indonesia mulai terkena dampak krisis moneter.

KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum terjadi krisis moneter, seluruh wajah perekonomian Indonesia tercermin pada sisi aset dari 239 bank nasional ditambah bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sisi aset adalah catatan neraca perbankan dimana para pelaku perekonomian Indonesia meminjam uang dari sistem perbankan.

Pendekatan politik yang sangat mengedepankan salah satu

aspek trilogi pembangunan saat itu yakni, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan dinamis, telah mendorong lahirnya sekitar 239 Bank Nasional ditambah Bank Asing beserta ribuan cabangnya di seluruh Nusantara. Hal ini masih ditambah dengan tumbuhnya ribuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang bergerak memberi pinjaman pada skala kecil kepada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Aliran dana yang deras pada sistem perekonomian Indonesia, telah mengubah wajah perekonomian kita, namun pada saat yang sama membuka suatu perangkap besar bagi suatu kerusakan nilai ketahanan ekonomi. Kemajuan perekonomian yang diperlihatkan, telah menyimpan kerentanan yang luar biasa pada aspek fundamentalnya, yakni terlalu besarnya beban usaha akibat terlalu tingginya pinjaman dibanding kemampuan pengembalian dana pinjaman.

267

Dengan sistem perbankan yang telah menjadi faktor ketergantungan sistem perekonomian Indonesia, maka fenomena krisis ekonomi nasional adalah gambaran logika berurutan dari krisis moneter menjadi krisis perbankan yang lalu diterjemahkan pada sektor riil menjadi krisis perekonomian. Pada gilirannya hal ini menyentuh hajat hidup rakyat banyak, dimana dengan diakumulasi oleh dampak politik, krisis ini bermuara pada masalah keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Tidak berjalannya aktivitas perekonomian salah satu pelaku ekonomi, memberi efek berantai pada pelaku ekonomi lain. Hal ini disebabkan karena putusannya rantai “suplai, produksi, distribusi, pemasaran dan jasa pendukung”, pada sistem perekonomian nasional. Ketidakstabilan perekonomian telah menciptakan ketidakpastian lingkungan usaha yang pada gilirannya merusak

landasan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

GAMBARAN SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL

268 Sebagai bagian dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah berupaya secepat-cepatnya mengalirkan dana ke masyarakat. Budaya “hutang” yang didukung oleh berbagai pernyataan para pemimpin bahwa meminjam uang adalah hal yang biasa dan wajar, telah membuat ratusan bank beserta ribuan cabang di seluruh Indonesia berlomba mencari nasabah. Kemudahan memperoleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah mengakselerasi proses ini.

Di satu sisi aliran dana dari perbankan segera menggerakkan roda perekonomian di seluruh tanah air namun di sisi lain, kecepatan pembentukan sumber daya manusia di Bank Sentral guna melakukan pengawasan, serta bank pelaksana guna mengoperasikan bank secara profesional, sama sekali tidak berimbang dengan kecepatan pertambahan jumlah bank yang memperoleh izin beroperasi. Lemahnya sistem pengawasan perbankan yang tidak didukung oleh infrastruktur hukum serta proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang memadai, telah membuat praktek “mark up” (meminjam dana melebihi kapasitas kegiatan usaha untuk mampu mengembalikan pinjaman), pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) bagi suatu kegiatan usaha dan berbagai upaya manipulasi lain, menjadi kegiatan yang mudah ditemui, terutama di bank swasta maupun pemerintah yang dikuasai oleh kelompok bisnis raksasa.

Dengan situasi seperti tersebut, maka gambaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak berbanding lurus dengan kuatnya fundamental ketahanan perekonomian.

Situasi kemajuan yang tampak nyata, semakin didukung oleh kemudahan memperoleh dana di pasar modal. Dengan tidak didukung oleh infrastruktur peraturan pasar modal serta hukum yang memadai, di awal pertumbuhannya, proses menjual saham perusahaan telah memicu masuknya investor asing dengan dana murah dan relatif berjangka pendek untuk berspekulasi.

Dengan semakin didukung oleh para birokrat, pengusaha semakin memiliki keberanian meminjam dari pasar modal, yang di satu sisi memberikan efek positif bagi tercapainya trilogi pembangunan saat itu, namun di sisi lain menambah beban hutang Indonesia, yang ironisnya adalah bahwa pemerintah saat itu tidak melakukan pencatatan hutang luar negeri swasta Indonesia.

269

FENOMENA KRISIS EKONOMI NASIONAL

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah menimbulkan dampak sangat mendalam bagi sistem perekonomian dan perbankan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka telaahan fenomena krisis ekonomi nasional adalah suatu analisis krisis perbankan yang dapat dirinci sebagai berikut :

Dalam Sistem Moneter

1. Kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar telah membuat catatan neraca secara nyata ikut naik. Hal ini disebabkan karena sistem pencatatan neraca perbankan adalah dalam mata uang Rupiah sehingga catatan valuta asing pada Bank Devisa terapresiasi secara otomatis. Kenaikan ini tercatat baik di sisi kiri neraca (*asset*) maupun di sisi kanan neraca (*liabilities*).

2. Pada situasi krisis, posisi pinjaman bank kepada nasabah terutama Bank Devisa naik otomatis dan tidak bisa ditarik serta merta, sementara pada posisi sumber dananya, para nasabahnya menarik dana dan memindahkan ke bank asing, akibat krisis kepercayaan.
3. Bank yang di-"rush" oleh pemilik dana tidak mempunyai likuiditas cukup, karena dananya tertanam di nasabah peminjam.
4. Akibatnya pemerintah memasok dana ke perbankan melalui program penjaminan nasabah.

Dengan demikian catatan uang beredar di Bank Indonesia akibat pasokan, menjadi naik. Jadi naiknya jumlah uang beredar bukan disebabkan oleh suatu aktivitas ekonomi, melainkan karena fluktuasi nilai tukar.

Dalam Sistem Riil

Dengan naiknya nilai mata uang Rupiah terhadap US Dollar, maka seluruh kalkulasi biaya produksi industri hulu yang berbeban investasinya berupa pinjaman mata uang US Dollar turut naik. Dengan ditambah kalkulasi komponen produk yang dibuat juga ada yang diimpor, maka harga jual produk akhirnya menjadi turut naik. Apabila industri hulu sudah terkena dampak krisis, maka beban ini akan berantai sampai kepada industri hilir, hingga produk akhirnya pun turut mengalami kenaikan harga.

Dalam kedua fenomena tersebut para pengambil kebijakan ekonomi mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan jumlah uang beredar tinggi dan harga jual produksi naik, maka secara teoritis terjadi inflasi.
2. Dengan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar terus naik dan jumlah uang beredar naik, maka secara teoritis banyaknya Rupiah beredar yang membuat orang memborong US Dollar sehingga memicu penurunan nilai Rupiah terhadap US Dollar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut tindakan otoritas moneter adalah menarik mata uang Rupiah sebanyak mungkin dari peredaran. Cara yang dilakukan oleh otoritas moneter adalah dengan menetapkan suku bunga simpanan tinggi luar biasa, sampai lebih dari 60% per tahun, sebagai upaya menyedot Rupiah dari sistem perekonomian, sehingga dengan kelangkaan Rupiah, diharapkan:

271

1. Pada sektor moneter, minat membeli US Dollar dengan Rupiah menurun.
2. Pada sektor riil, dengan Rupiah berkurang, minat beli (*demand*) terhadap produk menurun, maka harga-harga diharapkan terus menurun.

Langkah yang ditempuh oleh otoritas moneter tersebut telah mengabaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai tukar dapat dibentuk dengan transaksi tanpa penyerahan.
2. Dengan keharusan memberi bunga deposito tinggi ke nasabah, maka kewajiban bank menjadi tinggi untuk

menutupi kerugian, maka pendapatan bank harus dinaikkan dengan cara membebani nasabah peminjam (debitur) dengan suku bunga tinggi. (Lebih tinggi dari nilai bunga yang diberikan kepada deposan).

Dengan mengabaikan hal ini, maka sekalipun tindakan otoritas moneter menaikkan suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu lama (lebih dari 1 tahun), bahkan terlama di dunia untuk suatu kondisi krisis, maka kenyataan yang terjadi adalah:

272

1. Nilai tukar tetap tidak terkendali.
2. Wajah perbankan nasional yang merefleksikan perekonomian Indonesia berubah menjadi perekonomian yang berbeban bunga tinggi.

Konsekuensi yang terjadi dari situasi yang cenderung berlarut-larut adalah:

1. Ketidakmampuan perekonomian Indonesia untuk membayar beban bunga yang sedemikian tinggi, sementara pihak bank tetap harus membayar bunga deposan yang ekstra tinggi. Kemacetan aliran dana di perbankan ini memaksa Bank Indonesia memasok terus dana tersebut dengan konsep penjaminan.
2. Sektor riil yang kalkulasinya sudah sedemikian tinggi, sulit menjual hasil produksinya. Dengan ditambah beban bunga pinjaman sedemikian tinggi, maka proses kredit macet dan kebangkrutan usaha tinggal menunggu daya tahan usaha. Dalam rangkaian kejadian di atas, maka

krisis ekonomi bergulir kepada wilayah hajat hidup rakyat Indonesia.

DAMPAK KRISIS EKONOMI PADA MASALAH KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN

Melalui sistem perbankan yang telah merasuk ke dalam tatanan perekonomian Indonesia, maka posisi keberadaan sistem perbankan di Indonesia yang telah merata ke segenap pelosok wilayah, justru mengakselerasi dampak kerusakan krisis moneter, terutama setelah diterapkannya pembebanan suku bunga ekstra tinggi kepada perekonomian Indonesia.

273

Dari sisi kesejahteraan, maka macetnya suatu aktivitas perekonomian akan dimulai dari suatu pengurangan aktivitas kegiatan usaha/ produksi. Proses ini segera akan diikuti oleh proses pengurangan buruh dan pegawai yang pada umumnya berkorelasi langsung pada proses pengurangan daya beli masyarakat.

Untuk wilayah sentra industri yang terutama berpusat di Pulau Jawa, maka titik kulminasi situasi adalah berhentinya kegiatan produksi yang diikuti oleh pemberhentian buruh secara massal. Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat yakni ketersediaan lapangan pekerjaan mulai tersentuh krisis ekonomi. Sejalan dengan turunnya aktivitas perekonomian, maka sektor lapangan kerja turut mengalami pengurangan yang drastis. Meski di awal kejadian proses pemutusan hubungan kerja ini didukung oleh ketentuan ketenagakerjaan, namun jumlah pesangon yang diterima sungguh tidak memadai untuk memberi daya dukung kehidupan yang memadai bagi kalangan menengah ke bawah, untuk kurun waktu yang dapat melewati krisis ini. Krisis yang berkepanjangan dan tidak ditangani pada esensi masalahnya,

telah menimbulkan masalah baru yakni pengangguran.

274 Dari catatan Bank Dunia disebutkan bahwa krisis ini sangat eskalatif dampaknya dan diperkirakan jumlah pengangguran telah mencapai 20 juta pada akhir Juni 1998 dan diperkirakan sekitar 50 juta orang telah menjadi miskin. Di sisi lain krisis ekonomi mulai menyentuh tingkah laku publik pada saat pemerintah melakukan penutupan 16 bank. Keinginan menyelamatkan uang yang ditiptkan di sistem perbankan telah menyebabkan serbuan pemilik dana kepada bank-bank yang dinilai tidak stabil guna menarik dana “*Cash*” untuk disimpan sendiri.

Diawali oleh sasaran ketidakpercayaan kepada mata uangnya, maka selanjutnya krisis bertransformasi kepada bentuk ketidakpercayaan publik kepada tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah. Didorong oleh implikasi tekanan politik, maka pada tatanan masyarakat terbentuk rasa ketidakpastian akan masa depan.

Dari sisi keamanan, pendekatan keamanan preventif menjadi tidak berguna, manakala masalah kesejahteraan tidak tersentuh, sementara pendekatan keamanan represif terbentur pada suasana hak asasi manusia dari kecenderungan global saat itu. Keterbatasan dukungan operasional menjadi hambatan bagi kemampuan untuk menangani masalah keamanan, manakala erupsi (letupan) situasi terjadi secara serentak di seluruh wilayah nasional. Gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh kesulitan memenuhi kebutuhan hidup rakyat semakin tinggi kualitasnya. Tindakan kriminal terjadi secara sporadis, baik di ibukota maupun di kota-kota lainnya.

EFEK LANJUTAN KERUSAKAN SISTEM EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN

Krisis ekonomi telah memengaruhi kinerja sektor ekonomi riil. Keadaan ini bermula dari beratnya beban usaha akibat tingginya kalkulasi harga produksi ditambah beban bunga bank yang sedemikian luar biasa tingginya, maka berbagai sektor terkena imbas krisis. Dari sistem perekonomian Indonesia, terdapat dua sektor utama yang mengalami perbedaan dalam cara menerima dampak krisis pada era awal krisis, yaitu:

275

1. Sektor konstruksi, perdagangan, keuangan dan industri pengolahan mengalami penurunan “output” yang tinggi. Penurunan output yang tinggi juga diiringi oleh tingginya kalkulasi biaya produksi, sehingga di samping hasil produk menurun, harga jual juga melambung tinggi.
2. Sektor pertanian masih dapat tumbuh, walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Musim tanam dan panen yang gagal akibat El-Nino tahun 1997 turut memengaruhi produksi pangan, sehingga harga kebutuhan pokok pun melonjak.

Dampak yang berbeda namun dengan hasil akhir yang sama, yaitu naiknya hampir semua harga kebutuhan hidup, telah memengaruhi daya beli masyarakat, terutama daya beli kelompok masyarakat yang berpenghasilan minimal. Indikator dampak lanjutan krisis ekonomi antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan tajam, dari sekitar 4,91% pada tahun 1997 menjadi negatif 13,68% pada tahun 1998, sementara tingkat

inflasi yang selama era Orde Baru selalu dipertahankan di bawah 2 digit, telah meningkat tajam menjadi sekitar 77,63% pada tahun 1998.

2. Pada awal krisis, depresiasi mata uang seharusnya memacu nilai ekspor, mengingat jatuhnya nilai mata uang, seharusnya akan meningkatkan pendapatan eksportir. Kenyataannya justru terbalik, kecepatan kerusakan pada sistem produksi secara deret ukur ditambah meratanya krisis secara regional di Asia telah menyebabkan melemahnya kemampuan ekspor Indonesia. Ekspor barang pada tahun 1998 tumbuh dengan angka negatif 8,7%, namun pada saat yang sama mahalnya kalkulasi barang impor telah menyebabkan impor barang menurun pada tingkat 34,2% pada tahun 1998, sehingga defisit neraca berjalan secara total menurun untuk tahun fiskal 1997/1998.
3. Akibat serius terjadi di sektor perbankan. Akibat daya tahan perekonomian Indonesia yang sebagian besar berbeban hutang, tidak mampu membayar bunga yang sedemikian tinggi, maka tidak kurang dari Rp 600 triliun aset perekonomian Indonesia di perbankan dinyatakan sebagai kredit bermasalah, dengan lebih dari Rp 200 triliun dinyatakan sebagai kredit macet. Seluruh aset tersebut dikeluarkan dari sistem perbankan dan dikelola oleh suatu Badan di bawah Departemen Keuangan, yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank yang masih beroperasi kehilangan penghasilan dari aset yang produktif, sekaligus kehilangan kemampuan mengucurkan dana kepada masyarakat melalui sektor produksi, distribusi dan jasa.

Dengan situasi tersebut di atas, maka pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi untuk mengatasi keterpurukan kegiatan usaha. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah angka pengangguran. Sekalipun catatan Bank Dunia memperkirakan angka yang lebih besar, namun BPS (Badan Pusat Statistik) memperkirakan jumlah pengangguran sekitar 13,8 juta orang, sedang Depnaker memperkirakan jumlah pengangguran sampai dengan tahun 1998 adalah 13,4 juta orang.

Dengan situasi seperti di atas, maka daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan menjadi merosot. Dampak lanjutan ini bermuara pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat tajam, menjadi sekitar 80 juta lebih, atau sekitar 40% dari jumlah penduduk, bahkan ada yang memperkirakan jumlahnya mencapai 113 juta orang. Kondisi kemiskinan yang merebak merupakan lahan yang subur bagi suatu gejolak sosial. Isu politik nasional yang terfokus pada pimpinan nasional pada tahun 1998 memperoleh penguatan yang luar biasa akibat lemahnya kemampuan sebagian rakyat Indonesia menanggung beban hidupnya.

277

Berawal dari berbagai kerusuhan sejak tahun 1996 sampai tahun 1998 yang ditandai pergantian pimpinan nasional telah mengakibatkan ketidakpastian situasi. Dinamika gelombang reformasi bergerak tanpa arah yang jelas dan menyentuh sendi-sendi keamanan yang eksekutif dan distorsinya mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh tanah air. Kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan telah memberikan efek negatif terhadap keamanan yang merupakan persyaratan berputarnya roda perekonomian masyarakat.

Dalam skala besar, masalah keamanan dengan lahan subur kemiskinan yang dikombinasikan dengan isu lokal yang bernuansa SARA, menjadi masalah nasional yang pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari alur masalah yakni problem kemiskinan dari akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat. Isu kesenjangan perlakuan era Orde Baru, baik antara kroni dengan non kroni pemerintah, maupun antara yang kaya dan miskin, memperoleh berbagai kemudahan untuk disebarluaskan oleh media yang memperoleh bentuk kebebasan baru yang cenderung tanpa batas. Ditambah dengan berbagai isu tentang hak asasi manusia, maka gejolak sosial menjadi nuansa rutin kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Upaya tindakan atas dampak kerawanan keamanan menjadi semakin sulit akibat luasnya eskalasi permasalahan di satu sisi, sementara di sisi lain tekanan publik telah mendemotivasi pendekatan keamanan, dan di pihak lain, aparat keamanan merasakan kelemahan kepastian hukum untuk bertindak, karena dibayangi trauma terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berakibat aparat tersebut berhadapan dengan tuntutan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, alternatif titik berat solusi kesejahteraan masyarakat harus dijadikan elemen utama pendekatan upaya mencapai keamanan nasional yang implementasinya dilaksanakan secara seimbang.

INTERAKSI KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN YANG DIHARAPKAN

Arus globalisasi pada dekade terakhir abad ke 20 telah menciptakan gejala baru, dimana keterkaitan antar negara dalam bentuk interdependensi atau saling ketergantungan menjadi semakin menguat. Dengan prinsip perdagangan bebas, maka

batas ekonomi negara menjadi kabur. Arus barang, modal, jasa dan teknologi menjadi sedemikian leluasa. Dengan terjadinya perubahan yang dinamis di dunia, maka mobilitas modal dapat menjadi penyebab ketidakpastian keadaan suatu negara. Bentuk ancaman fisik langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kehilangan makna hakikinya. Persetujuan negara untuk mengizinkan suatu bentuk keterbukaan secara nyata telah mengundang kemungkinan timbulnya bentuk baru ancaman. Kerelaan membuka diri bangsa Indonesia telah mentransformasikan sifat “ancaman” menjadi “tantangan”. Dengan sifat tantangan non fisik inilah, maka akan lahir dampak keamanan nasional yang timbul justru dari “musuh” yang tidak langsung yaitu kesenjangan sosial.

279

Dalam menjalankan konsepsi ketahanan nasional, maka upaya mengembangkan kekuatan nasionalnya dicapai melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945. Dengan demikian keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan keamanan menjadi acuan dari konsepsi ketahanan nasional Indonesia.

Dalam kaitan dengan era globalisasi, maka bentuk kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Hal-hal yang di masa lalu dikategorikan sebagai ancaman fisik dan penanganannya secara represif, saat ini lebih dipandang sebagai tantangan yang upaya penanganannya dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan. Dan tantangan nyata ini terus-menerus berinteraksi dalam kehidupan masyarakat di era krisis. Kemudahan dan kebebasan informasi sebagai unsur pembentuk opini publik ditambah arus kegiatan ekonomi yang

tidak terkendali telah semakin memperkuat kesan, bahwa aspek keamanan dan kesejahteraan menjadi komponen yang utama paska perang dingin, dalam perannya memperkuat ketahanan nasional suatu bangsa.

280 Krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi tahun 1997 telah membuktikan bahwa suatu telaah atas peran keamanan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang memerlukan telaah khusus, demikian pula peran kesejahteraan masyarakat dalam kontribusi pada keamanan nasional menjadi faktor kunci bagi keluarnya bangsa Indonesia dari krisis, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam dalam kaitan memperkuat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

ANALISIS PERAN KEAMANAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam skala bangsa, peran keamanan nasional tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi yang telah dan sedang berlangsung membuktikan bahwa faktor daya tahan nasional dibidang perekonomian menjadi pemicu suatu korelasi peran keamanan pada masalah kesejahteraan. Dengan demikian, menganalisis suatu peran keamanan nasional tidaklah mungkin dilakukan tanpa melalui pemahaman aspek ketahanan nasional.

Ada 8 aspek kehidupan bangsa dalam konsepsi Ketahanan Nasional yang disebut Astagatra. Kedelapan aspek tersebut meliputi 3 gatra alamiah yang bersifat relatif tetap dan statis yang disebut Trigatra, yakni : geografi, kekayaan alam dan kependudukan (demografi), dan 5 gatra sosial yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, dalam ikatan aturan dan norma yang disepakati yang disebut Pancagatra, yakni : gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan . . Kelima gatra tersebut mengandung unsur-unsur yang dinamis.

Dampak krisis ekonomi telah menyentuh hampir seluruh gatra, terutama yang menyangkut aspek dinamis. Tidak berjalannya penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari perlunya tingkat keamanan tertentu untuk menjaganya. Untuk memahami peran keamanan dalam kaitan tersebut, maka harus diketahui fungsi dasar keamanan nasional, yang antara lain :

281

1. Kemampuan pengamatan wilayah.
2. Kemampuan penertiban masyarakat.
3. Kemampuan penegakan hukum.
4. Kemampuan penindakan gangguan keamanan.
5. Kemampuan penyelamatan masyarakat.
6. Kemampuan pembinaan wilayah.

Tinjauan kasus pada kondisi dinamis krisis memperlihatkan peran keamanan pada masing-masing gatra, sebagai berikut:

1. Gatra Geografi

Kondisi topografi Indonesia relatif statis, dengan bentuk kepulauan yang terdiri dari 17.508 buah pulau dan luas seluruh wilayah kedaulatan lebih kurang 7,3 juta km² ,

serta mempunyai perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sebesar 1 : 4. Posisi astronomis yang terletak pada 95 derajat dan 141 derajat Bujur Timur serta antara 6 derajat Lintang Utara dan 11 derajat Lintang Selatan, telah menempatkan posisi Indonesia pada lintasan orbit geostasioner satelit yang sangat strategis. Posisi di antara dua benua, Asia dan Australia serta area samudera, Hindia dan Pasifik, lebih menempatkan posisi strategis geografis Indonesia.

282

Situasi krisis nasional yang berkelanjutan telah turut berkontribusi pada masalah keamanan nasional yang berwujud dalam berkurangnya teritori nasional Indonesia, yaitu wilayah Timor Timur. Situasi ini berpengaruh langsung pada kesejahteraan penduduk Indonesia di Timor Barat akibat timbulnya masalah pengungsi dari Timor Timur

2. Gatra Sumber Kekayaan Alam

Seluruh sumber kekayaan alam Indonesia meliputi potensi alam di permukaan dan di dalam bumi serta yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber kekayaan alam ini mengikuti kaidah hukum serta peraturan yang berlaku. Karenanya sifat gatra ini cenderung statis. Namun kecenderungan ancaman terjadi justru dari luar. Menurunnya dukungan keamanan di laut akibat krisis berkepanjangan, turut membuat pengambilan hasil laut secara tidak sah mengalami peningkatan, yang pada beberapa daerah tertentu di mana para nelayan yang tingkat kesejahteraannya sangat tergantung pada hasil tangkapan tradisional, menjadi sangat terganggu perolehannya. Dalam

kasus ini keamanan dalam hal kemampuan pengamatan wilayah dan penegakan hukum mendapat tantangan besar.

3. Gatra Demografi

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu dalam waktu tertentu. Hal yang berkaitan dengan kependudukan adalah mengenai jumlah susunan, faktor sebaran, pertumbuhan, ciri-ciri kualitas dan kesejahteraan penduduk serta kondisi lingkungan. Dengan sifat yang deskriptif dari gatra ini, maka krisis ekonomi lebih bertitik berat bukan pada unsur peran keamanan terhadap kesejahteraan, namun terjadi sebaliknya, dimana faktor kesejahteraan berdampak pada masalah keamanan.

283

4. Gatra Ideologi

Sistem nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi, dimana terkandung di dalamnya konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar yang turut memicu krisis telah mendorong timbulnya pandangan meluas yang ekstrim dari kelompok yang mengatasnamakan kelompok masyarakat miskin, di mana terdapat kecenderungan kuat adanya pertentangan yang mendasar dengan ideologi Pancasila yaitu Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pertentangan ini menjadi kondisi yang dinamis yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

5. Gatra Politik

Dinamika reformasi politik menunjukkan sistem politik nasional mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Demokrasi Pancasila yang diwujudkan oleh sistem 3 partai dan golongan yang bermuara pada kepemimpinan nasional yang cenderung absolut dan sentralistik, berubah menjadi multipartai bercirikan demokrasi dengan nuansa kebebasan yang cenderung tanpa batas diikuti oleh pengenalan tentang hak asasi manusia yang lebih berupa segala bentuk perlawanan terhadap kemapanan daripada suatu tindakan kebebasan normatif manusia yang berlandaskan hukum.

284

Diakomodasinya bentuk pluraristik sistem perpolitikan Indonesia yang diwakili oleh hadirnya berpuluh partai, yang berdiri di atas infrastruktur kemajemukan bangsa ditambah kebebasan berpendapat cenderung tanpa batas, telah menimbulkan indikasi ancaman disintegrasi bangsa, akibat kecenderungan didahulukannya kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.

Konsensus nasional untuk menerima dan cenderung membiarkan hal tersebut, lebih mencerminkan “Pendulum effect” dari sistem perpolitikan masa lalu. Karena konsensus tersebut, maka peran keamanan menjadi cenderung hanya memadamkan letupan, daripada suatu tindakan penanganan preventif. Tanpa upaya ini kesejahteraan masyarakat, terutama menyangkut kehidupan sehari-hari menjadi sangat terganggu.

6. Gatra Ekonomi

Fenomena menarik dari krisis ekonomi adalah, diawalinya suatu krisis moneter, kemudian krisis ekonomi dan politik yang memicu dampak negatif sekaligus kepada kesejahteraan masyarakat dan keamanan. Namun dalam perjalanan krisis, faktor ketidakpastian keamanan selalu dijadikan alasan penyebab ketidakpastian nilai tukar dan belum hidupnya perekonomian Indonesia kembali. Padahal kestabilan nilai tukar menjadi dasar transaksi ekonomi sehari-hari yang berperan langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Melemahnya nilai tukar berhubungan erat dengan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada turunnya tingkat kesejahteraan.

285

7. Gatra Sosial Budaya

Bentuk dasar sosial budaya yang berisi berbagai suku, ras agama dan golongan, dengan adanya paradigma paska Orde Baru yang masih terus dihantui oleh krisis ekonomi, malah diberikan muara pluralistik. Tidak padunya visi berbangsa dan bernegara diiringi oleh tekanan kesenjangan ekonomi baik nasional maupun setempat, telah memberi dampak sosial budaya berupa terjadinya friksi lokal. Kekacauan keamanan antara lain seperti konflik etnis di Maluku, konflik di Sambas, dan beberapa konflik di daerah lain berdampak langsung pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Akar masalah berupa diterimanya muara serta keinginan pendapat yang pluralistik sebagai konsensus nasional tanpa dasar yang kuat pada visi kebangsaan, telah membuat peran keamanan selalu bersifat pemadaman (cenderung represif).

8. Gatra Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan · Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan secara terintegrasi dan terkoordinasi di mana TNI dan Polri menjadi inti dari penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

286

Meningkatnya ancaman keamanan yang dapat berakibat pada kesejahteraan masyarakat di semua aspek gatra dalam konsepsi ketahanan nasional seharusnya justru mendorong pemberdayaan seluruh potensi keamanan, termasuk kemampuan penertiban masyarakat, penindakan gangguan keamanan serta kemampuan pembinaan wilayah. Di tengah erosi padunya visi kebangsaan, secara normatif TNI dan Polri adalah organisasi yang paling padu dalam mempersatukan unsur ketahanan nasional secara terintegrasi.

Kenyataannya paradoks, TNI sebagai inti pertahanan dan keamanan didegradasikan fungsinya dan cenderung dikembalikan ke barak, sementara kecepatan penambahan personel dan peningkatan keuangan Polri untuk mengatasi kesenjangan sistem pengamanan nasional, tidak dapat mengimbangi akselerasi datangnya titik rawan keamanan nasional yang puncaknya adalah ancaman disintegrasi nasional.

Keamanan menjadi salah satu pilihan utama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi krisis, namun pelaksana dan fungsi serta kemampuan pengamanannya dihilangkan dari arena krisis. Hal ini merupakan ironi,

yang hanya bisa dipahami apabila menggunakan konteks pengertian efek bandul dan eforia paska Orde Baru.

ANALISIS PERAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KONTRIBUSI PADA KEAMANAN NASIONAL

Kesejahteraan masyarakat dalam tugas pokok pemerintah diformulasikan sebagai tercapainya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta dengan sasaran utama pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan tersedianya lapangan kerja.

287

Dasar dari tugas pokok tersebut adalah amanat GBHN 1999, yang lahir sebagai jawaban atas krisis ekonomi nasional, dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap masalah sosial dan bencana alam, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
2. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
3. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir

miskin dan anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial.

5. Memberantas secara sistematis, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.
6. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya melalui gerakan pemberantas dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna menciptakan pespektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan .

288

Arahan GBHN 1999, pada dasarnya bertumpu pada indikator kesejahteraan masyarakat yang berhubungan langsung dengan gejolak sosial akibat krisis dan memengaruhi keamanan nasional. Seperti diketahui bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan unsur penduduk dalam konsep Astagatra, pasti memiliki unsur kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian menampilkan peran kesejahteraan masyarakat dalam berkontribusi pada keamanan nasional merupakan suatu telaahan atas indikator yang memiliki tingkat kerawanan yang berdampak besar terhadap suatu gejolak sosial.

Gejala akibat krisis tersebut ditunjukkan antara lain oleh kesejahteraan masyarakat yang berkait langsung pada masalah keamanan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk miskin meningkat sangat cepat. Jumlah penduduk miskin menurut survei BPS dilaporkan berjumlah 22,5 juta orang pada tahun 1996, meningkat tajam menjadi 49,5 juta, orang atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun pada tahun 1999 dilaporkan menurun menjadi 37,5 juta orang atau 18,7% dari jumlah penduduk, namun dampaknya masih terlihat dari menurunnya kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, upacara seremonial adat, sumbangan dari keluarga mampu kepada keluarga yang kurang mampu. Dan yang lebih nyata adalah masalah anak terlantar, tuna sosial, naiknya kriminalitas yang berakibat kepada gangguan keamanan.
2. Masalah tuna sosial, yang terdiri dari gelandangan pengemis dan wanita tuna susila, di perkotaan menunjukkan peningkatan, akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki menggiring mereka memasuki sektor informal bahkan kepada kegiatan yang tidak dapat diterima secara sosial, yang pada posisi paling sulit membentuk situasi kerawanan keamanan.
3. Masalah anak jalanan sebagai akibat langsung dari krisis tercatat di kota-kota besar. Hasil sensus dari 12 kota besar terungkap bahwa populasi anak jalanan adalah sekitar 20 ribu anak, namun data 1998 mengungkapkan bahwa dari sekitar 40 ribu anak jalanan 48% adalah anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Dari hasil survei terungkap bahwa setelah terjadi krisis, 35% anak jalanan bertujuan menambah pendapatan keluarga, sedang 27% untuk menambah biaya sekolah. Dengan demikian ekonomi keluarga atau kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendorong semakin banyaknya anak di jalanan. Situasi ini

memberi kontribusi pada keamanan nasional, mengingat anak tersebut adalah potensi untuk terbentuknya kerawanan baik karena tekanan kebutuhan maupun oleh pemanfaatan dari pihak ketiga. Apalagi beberapa kota besar menjadi barometer keamanan nasional.

Dengan demikian baik dari pendekatan Astagatra maupun pendekatan empirik, faktor kesejahteraan masyarakat dan faktor keamanan mempunyai keterkaitan erat.

SASARAN PENCAPAIAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN

Proses timbal balik aspek keamanan nasional dan aspek kesejahteraan masyarakat yang dijelaskan baik melalui pendekatan Astagatra maupun empirik, yang menggunakan metoda induktif (evident base), telah memberikan wajah baru interkoneksi kedua aspek tersebut. Hal ini disebabkan karena peran tersebut diletakkan dalam suatu kondisi yang sangat dinamis yang belum pernah dialami bangsa ini sepanjang sejarah perjalanan dan sejak kemerdekaannya. Pengaruh lingkungan strategis yang begitu kuat dan datang justru dari luar batas negara, telah membawa suatu nilai-nilai baru yang mengubah perilaku bangsa dalam banyak hal. Nilai-nilai moral dalam ideologi Pancasila mendapatkan penekanan unsur-unsur universal yang diperkenalkan pada era krisis. Dengan demikian nilai-nilai hak asasi manusia serta demokrasi, harus menjadi kandungan sasaran pencapaian keamanan dan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian sebab akibat dalam dimensi krisis ekonomi, maka di samping kandungan nilai-nilai global, suatu sasaran pencapaian keamanan dan kesejahteraan harus mencapai 2 aspek utama, yakni :

1. Aspek Tindakan. Yakni segala tindakan yang ditujukan bagi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dimana yang terbaik adalah upaya penangkalan atau meminimalkan sebab, daripada upaya memadamkan akibat yang terjadi.
2. Aspek Subjek Tindakan. Yakni aspek pemeran utama dari proses pencapaian keamanan dan kesejahteraan, dalam hal ini unsur sumber daya manusia yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses.

291

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang diharapkan untuk menyeimbangkan pencapaian keamanan dan kesejahteraan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menangani masalah penurunan kualitas hidup akibat krisis ekonomi, dengan sasaran meminimalkan kemungkinan timbulnya problem baru, melalui penelusuran akar permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan kesejahteraan.
2. Menurunkan tingkat gejolak permasalahan sosial, melalui pemberdayaan aspek sumber daya manusia yang dalam hal ini antara lain akan meningkatkan mutu pelayanan sosial dan fasilitas umum serta mendukung proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dimana diharapkan akan secara tepat menanggulangi masalah kesejahteraan yang timbal balik dengan masalah keamanan.

Semua sasaran ini mau tidak mau harus dalam kerangka aspek Ketahanan Nasional yang utuh dengan visi kebangsaan yang kuat,

serta mengandung unsur menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, di samping juga memiliki kandungan unsur kesiapan masyarakat yang tinggi melalui mekanisme penanganan masalah keamanan dan kesejahteraan yang mantap, perlu dirumuskan dalam suatu strategi yang seimbang antara aspek keamanan dan kesejahteraan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, tanpa melupakan landasan idiil bangsa, yakni Pancasila dan UUD 1945.

IMPLEMENTASI UPAYA KESEIMBANGAN MENGATASI KRISIS EKONOMI

292

Dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penyelenggaraan Ketahanan Nasional haruslah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Arus globalisasi yang turut mendorong terjadinya krisis ekonomi, telah turut pula memberikan kontribusi pada terbentuknya krisis multidimensional bangsa Indonesia.

Dampak persoalan multidimensi pada masalah keamanan sangat jelas tampak pada fenomena kerusuhan, pertikaian antar etnis, agama, bahkan kecenderungan disintegrasi bangsa. Keamanan yang mewujudkan Ketahanan Nasional haruslah mencerminkan kemampuan bangsa untuk melindungi eksistensi serta nilai-nilai nasionalnya terhadap berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Penelusuran suatu titik kelemahan pada masalah keamanan dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan fenomena yang mengikutinya, akan membawa kepada pendekatan pemecahan masalah. Secara strategis dalam bidang keamanan yang akan mempunyai korelasi baik langsung maupun tidak langsung pada masalah kesejahteraan.

Akibat lain krisis multidimensi ini adalah pada masalah kesejahteraan. Berbagai masalah kemasyarakatan yang sebelumnya sudah ada menjadi mengemuka, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, termasuk bentuk yang konvensional, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Kesejahteraan yang hendak dicapai haruslah mencerminkan kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyeimbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang sebesar-besarnya secara adil dan merata, baik rohani maupun jasmani.

293

Dengan dasar inilah maka suatu strategi menyejahterakan masyarakat haruslah melalui suatu pendekatan terpadu dengan memperhatikan potensi nasional yang dimiliki bangsa Indonesia, yang diharapkan akan merumuskan kebijakan nasional tentang kesejahteraan masyarakat di seluruh Nusantara, yang akan berdampak positif bagi keamanan nasional.

Kedua upaya pendekatan ini, baik dari segi keamanan maupun dari segi kesejahteraan, merupakan dua hal yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini titik berat penanganan masalah diletakkan secara simultan pada kedua hal tersebut.

STRATEGI PENANGKALAN PREVENTIF MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI DINI DALAM KEAMANAN NASIONAL

Pertama, Sistem Deteksi Dini Dalam Keamanan Nasional

Pengaruh lingkungan strategis, baik global maupun regional beserta seluruh fenomena kejadian yang mendahului krisis

ekonomi di Indonesia, telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa ada aspek baru yang harus dipertimbangkan dalam masalah keamanan nasional, yakni:

1. Sistem komunikasi global memiliki kemampuan dapat mentransmisikan informasi baik berupa berita, visual dan yang terakhir adalah nilai mata uang, secara elektronik dan dapat diterima secara serentak, massal serta berkelanjutan di berbagai belahan dunia.
- 294 2. Kesiapan menerima arus globalisasi membawa suatu konsekuensi sikap keterbukaan dan transparansi di segala bidang. Manakala infrastruktur hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak cukup melindungi dan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang warga negara akibat cepatnya perubahan, maka dampak dari tingkah laku publik yang timbul akibat proses pembentukan opini dan persepsi menjadi sulit diperkirakan. Publik sebagai makhluk ekonomi akan bertindak mengikuti logika ekonomi yang dipersepsikan secara terbuka dan transparan oleh sistem informasi global.
3. Suatu mekanisme sistem mata uang transnasional di dalam suatu infrastruktur sistem informasi global ditambah peran persepsi publik telah berkontribusi dalam memberikan suatu pesan politik dari suatu negara terhadap suatu negara yang lain, sehingga ekonomi masa depan adalah politik ekonomi, dimana kegiatan politik dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Akibat negatif pesan politik ekonomi ini berwujud dalam suatu potensi ancaman keamanan yang disebabkan oleh tingkah laku publik yang kontra produktif dalam aktivitas ekonominya.

Hasil penelusuran pada rangkaian kejadian krisis ekonomi tersebut di atas, telah membuat kita sampai pada suatu kesimpulan, bahwa masalah keamanan nasional bukan saja tampak pada saat krisis telah menjadi masalah multidimensi, namun ancaman telah timbul di saat paling awal dari datangnya krisis tersebut berupa antara lain fluktuasi nilai tukar yang tidak dapat diperkirakan.

Melalui berbagai liputan media yang demikian terbuka dan transparan, seluruh situasi di dunia dapat diketahui, baik tentang politik, ekonomi maupun keuangan. Masalah yang timbul adalah bagaimana arus deras informasi ini dikumpulkan, diorganisasikan, dianalisa, disimpulkan dan didistribusikan, selanjutnya dievaluasi hasilnya secara terus menerus dan berkelanjutan dari aspek keamanan nasional. Hasil pengolahan informasi yang diperoleh akan merupakan suatu sintesa yang disiapkan sebagai pengetahuan dasar tentang konsekuensi politik yang mungkin terjadi ataupun implikasi suatu kebijakan politik ekonomi negara lain.

295

Tindakan ini memberikan gambaran tentang upaya penangkalan melalui suatu sistem deteksi dini, namun berbeda dengan tindakan spionase ataupun berbagai modus lain tentang kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh intelijen dalam rangka keamanan nasional. Kemampuan membaca, mendeteksi, memetakan masalah, dan membuat rekomendasi langkah antisipasi merupakan peran dari suatu intelijen ekonomi.

Suatu strategi penangkalan melalui sistem deteksi dini dalam Keamanan Nasional, dengan cara membentuk suatu gugus tugas intelijen ekonomi, yang menempatkan pengamat lintas disiplin dalam suatu badan yang dikoordinasikan di bawah suatu institusi Keamanan Nasional yang bertanggung jawab kepada

kepala pemerintahan, akan secara cepat dan terus menerus memberi masukan kepada para pengambil keputusan di tingkat pemerintah tentang suatu konsekuensi politik ekonomi, maupun implikasi kebijakan politik negara besar terhadap perekonomian, yang langsung dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara.

Kedua, pembentukan intelijen ekonomi

296 Menyadari bahwa mengatasi akar masalah ancaman keamanan adalah melakukan deteksi dini terhadap suatu kompleksitas informasi yang begitu terbuka dan terus menerus memasuki ruang kehidupan masyarakat, maka tugas utama dari intelijen ekonomi adalah:

1. Mengamati, seluruh fenomena politik ekonomi global, mengumpulkan informasi dari segenap sumber informasi, termasuk dari sumber Badan-badan Intelijen Nasional.
2. Menyeleksi informasi berdasarkan suatu logika paradigma baru ancaman keamanan nasional yang diakibatkan oleh suatu aktivitas di bidang perekonomian, sehingga informasi yang dimanfaatkan benar-benar relevan untuk digunakan sebagai basis pengolahan data.
3. Mengorganisasikan serta mengintegrasikan seluruh data dan informasi yang diseleksi untuk dianalisa, disimpulkan, sehingga menghasilkan suatu sintesa masalah yang akan menghasilkan berbagai rekomendasi baik teknis, maupun non teknis ekonomis, namun fokus utamanya adalah masalah Keamanan Nasional.

4. Melakukan evaluasi seluruh siklus tersebut di atas dari waktu ke waktu dan berkelanjutan untuk memperoleh ketajaman, serta keakuratan hasil akhir, mengingat dimensi “perubahan” adalah salah satu elemen pokok dari era globalisasi, sehingga perubahan informasi yang cepat dan signifikan akan selalu memberi dampak ancaman yang berbeda, yang berarti solusi dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan pun dapat berubah sesuai dengan dinamika proses ekonomi global maupun regional.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka intelijen ekonomi harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dasar lintas disiplin, baik politik, ekonomi, perbankan, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, terbentuknya suatu intelijen ekonomi haruslah mempunyai persyaratan sebagai berikut :

297

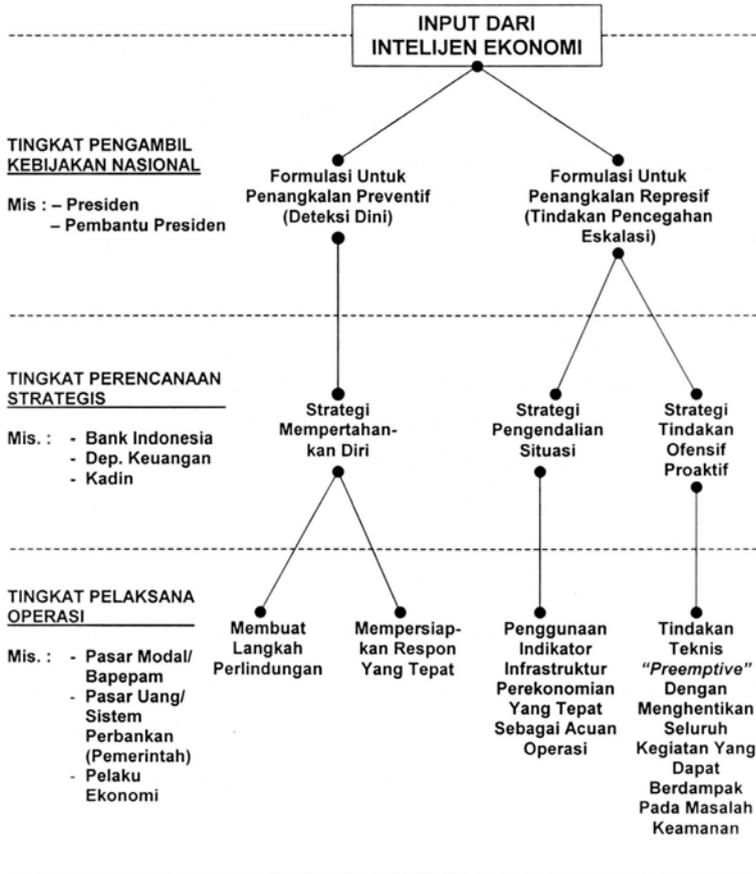
1. Adanya pembentukan suatu infrastruktur, acuan yang berisi indikator perekonomian yang memberi batas bagi suatu sinyal bahaya yang dapat menimbulkan ancaman pada masalah keamanan nasional. Acuan yang dijadikan rujukan tingkat ancaman ini dapat berubah dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tingkah laku pelaku politik ekonomi dunia. Dengan demikian unsur fleksibilitas menjadi faktor penting mekanisme intelijen ekonomi.
2. Dengan keharusan untuk mampu membaca dan menganalisa masalah yang multidimensi, maka keterlibatan lintas disiplin akan lebih efektif bila melibatkan para pelaku fungsional itu sendiri, baik pelaku politik maupun pelaku ekonomi (termasuk pelaku pasar uang) dan pelaku keamanan. Dengan demikian, maka hasil akhirnya merupakan suatu sintesa forum multidisiplin yang diorganisasikan dan diintegrasikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka intelijen ekonomi tidaklah dapat disubordinasikan pada badan-badan intelijen yang cenderung terorganisasi secara kaku dan struktural. Dengan demikian, sesuai sifat intelijen yang dapat diartikan kegiatan rahasia, maka intelijen ekonomi mempunyai inti (core) organisasi yang tertutup, dan suatu jaringan komunitas intelijen yang sifatnya terbuka dan terdiri dari para ahli ekonomi, profesional dan praktisi. Unsur organisasi inti yang kuat, yang mengutamakan landasan kepentingan keamanan bangsa menjadi kerangka berdirinya intelijen ekonomi.

- 298 3. Spektrum kegiatan intelijen ekonomi tidak dibatasi oleh waktu dan pada suatu kondisi kemungkinan timbulnya ancaman. Namun sesuai dengan tugasnya, maka sasaran yang dituju tetap mempunyai fokus yang spesifik, yakni seluruh aktivitas ekonomi baik di luar maupun di dalam negeri yang dapat memberi suatu resultan ancaman keamanan yang berskala lokal dan nasional.

Melihat sasaran yang demikian mendasar menyentuh kegiatan dan hajat hidup masyarakat, maka unsur dukungan perundang-undangan atau ketentuan pemerintah yang kuat harus menjadi persyaratan kepastian hukum bagi operasionalisasi kegiatan ini. Apabila seluruh tugas dan persyaratan dasar pembentukan intelijen ekonomi terpenuhi, maka kegiatan operasional intelijen ekonomi akan memberi masukan kepada suatu hirarkhi pengambil keputusan sebagai berikut :

BAGAN HIRARKHI PENGAMBIL KEPUTUSAN



Dengan susunan hirarkhi yang terdiskripsi secara jelas, maka dalam suatu keadaan perekonomian yang paling buruk sekalipun, mulai dari pengambil keputusan di tingkat tertinggi sampai kepada para pelaku ekonomi, akan mempunyai persepsi yang sama terhadap suatu ancaman. Tingkah laku publik terdistorsi oleh gempuran informasi akan memperoleh respons yang setimpal, baik dari regulasi khusus yang diberlakukan oleh pemerintah di masa krisis maupun dari pelaku ekonomi yang memahami secara

jelas duduk masalah melalui suatu proses pembentukan sikap dan sosialisasi informasi terus menerus yang bersumber dari suatu kegiatan intelijen ekonomi.

300 Dalam kondisi yang demikian, maka visi yang homogen dan solid dari seluruh jajaran pemerintah dan pelaku ekonomi nasional akan mampu menangkal aktivitas ekonomi yang dapat mengancam keamanan nasional dan kontribusi yang terus menerus dari keadaan ini, di satu pihak menghilangkan tekanan pendekatan keamanan, namun di lain pihak dengan ekonomi yang berjalan sehat, jelas akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah tercermin kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya.

STRATEGI PENDEKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI UPAYA MEMBUDAYAKAN SIKAP EKONOMI MANDIRI

Dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat dipetik pelajaran sebagai berikut :

Di Bidang Ekonomi

Efek lanjutan kerusakan pada sistem ekonomi telah bermuara pada masalah kesejahteraan. Tingginya jumlah kredit bermasalah sebesar lebih dari Rp 600 triliun, telah menyebabkan dikeluarkannya sebagian besar pelaku perekonomian Indonesia tersebut dari sistem perbankan yang memompa dan menyirkulasikan perputaran dana, untuk dipindahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Di satu pihak upaya ini langsung menyetatkan bank yang dikeluarkan kredit bermasalahnya, namun di lain pihak langkah ini menyimpan “gunung es” permasalahan nasional. Putusnya hubungan antara pelaku ekonomi dengan sistem perbankan telah menghentikan sirkulasi aliran dana antara perbankan, pelaku ekonomi dan konsumen, yang artinya elemen utama siklus perekonomian riil terputus mata rantainya.

Deteriorasi sektor riil dimana sebagian besar para pelaku utamanya mengalami stagnasi hubungan dengan perbankan secara perlahan dan pasti menimbulkan masalah kesejahteraan yang meluas akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran dan kemiskinan yang meluas, sementara angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja semakin bertambah dari tahun ke tahun yang justru menambah beban jumlah pengangguran dan keterlantaran.

301

Langkah untuk menopang masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup melalui jaring pengaman sosial (JPS), hanya bersifat sesaat, karena esensi permasalahan yakni berputarnya roda perekonomian tidak tertangani dengan baik.

Lebih dari separuh pelaku ekonomi Indonesia praktis tidak “bankable” kelebihan dana di sektor perbankan yang sudah disetatkan dicoba disalurkan pada sektor ekonomi baru, yakni ekonomi kerakyatan.

Dengan menafikan para pelaku ekonomi lama yang telah membangun infrastruktur perekonomian nasional lebih dari satu generasi, upaya membentuk pelaku ekonomi baru untuk dijadikan dasar perekonomian Indonesia baru sungguh

merupakan suatu percobaan yang menimbulkan biaya sosial sangat tinggi. Di satu sisi, pihak bank ragu memberikan pinjaman baru kepada pelaku ekonomi yang belum memiliki “*track record*”, di sisi lain kesiapan “pelaku ekonomi baru”, baru mencapai tahap awal berbisnis, sehingga tidak cukup mampu menyerap permasalahan kesejahteraan yang terjadi akibat krisis. Gambaran situasi tersebut masih ditambah dengan kenyataan bahwa lebih dari separuh uang yang beredar di Indonesia, disirkulasikan di Jakarta.

302

Suatu fenomena positif terlihat di sisi ekspor Indonesia, yang dengan depresiasi Rupiah telah memacu pengusaha eksportir. Namun situasi yang serba tidak pasti dan kebebasan untuk tidak menjual valuta asing hasil ekspornya ke Bank Sentral, telah membuat angka ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik sama sekali tidak relevan dengan cadangan devisa yang terkumpul di Bank Sentral. Sungguh suatu ironi, bahwa pemerintah di satu pihak berusaha menggalakkan ekspor guna memperkuat cadangan devisanya, namun di lain pihak seolah tidak menyadari bahwa devisa hasil ekspor pengusaha tidak masuk kedalam cadangan devisa nasional, akibat kebebasan menempatkan serta menggunakan dana devisa hasil ekspor oleh pengusaha. Berdasarkan pelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Perekonomian riil dengan muatan yang terdiri dari siklus aktivitas pelaku ekonomi, sistem perbankan dan konsumen harus dihidupkan kembali.
2. Sistem keuangan masih tersentralisasi, sehingga menimbulkan pemusatan aktivitas perekonomian di Jakarta dan kota-kota besar utama di Jawa.

3. Orientasi pemerintah pada pasar ekspor telah melupakannya potensi lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai suatu potensi pasar raksasa.

Di Bidang Sosial Politik

Dari seluruh persoalan multidimensi yang timbul akibat krisis yang berkepanjangan, dapat diidentifikasi bahwa titik simpul dari berbagai kerawanan sosial dan politik adalah dari kaum elite. Dengan lain perkataan, golongan terdidik serta intelektual mempunyai peran besar dalam situasi yang kontra produktif terhadap timbulnya berbagai indikasi kerawanan.

303

Pemahaman situasi secara jelas dapat terlihat bahwa secara nasional terjadi suatu euforia untuk meninggalkan seluruh paradigma Orde Baru, beserta segenap atribut yang melekat. Konsekuensi yang segera nampak adalah:

1. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan merupakan “Centre of Excellence”, secara tidak sadar telah mengubah alur konsepsi tujuan hasil pendidikan. Dalam era Orde Baru salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk mendukung konsep pembangunan berkesinambungan. Dengan adanya krisis yang mendeakselerasi pembangunan, bahkan menghilangkan begitu banyak kesempatan kerja, telah membuat potensi intelektual daerah setempat tersalur ke dalam wilayah politik dengan euforia yang cenderung kebablasan. Masalahnya menjadi semakin jelas kontra produktif dan berada dalam arah yang berlawanan dengan era

yang lalu, akibat tidak adanya suatu konsepsi nasional tentang bagaimana memberdayakan potensi intelektual setempat dengan esensi peningkatan kesejahteraan yang tumbuh berkelanjutan.

2. Dengan euforia politik yang mewarnai ungkapan kebebasan berpendapat, maka langkah pertama dari provinsi / daerah di Indonesia menuntut haknya dari kekuasaan pemerintah pusat yang dianggap sentralistik, telah menghasilkan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Situasi ini telah mengubah wajah kekuasaan negara menjadi lebih terdesentralisasi.

304

Masalahnya adalah bahwa *platform* kekuasaan dan kewenangan daerah tidak segera diikuti oleh suatu konsepsi nasional yang memadai tentang peningkatan kesejahteraan yang berdiri di atas infrastruktur kewenangan yang sudah didesentralisasi tadi. Sifat penanganan masalah cenderung kepada upaya untuk menopang akibat krisis, namun tidak membawa kepada solusi komprehensif masalah kesejahteraan.

Perekonomian riil adalah dasar kehidupan masyarakat dalam menyandarkan hasrat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan sasaran yang telah dipaparkan dalam pen-

jelasan terdahulu dan pelajaran yang dapat dipetik terhadap masalah kesejahteraan, suatu strategi pendekatan kesejahteraan melalui upaya membudayakan sikap ekonomi mandiri dapat disusun dengan esensi : “Desentralisasi perekonomian nasional di atas *platform* desentralisasi kekuasaan dalam rangka otonomi daerah, dengan memberdayakan seluruh potensi pelaku ekonomi yang dibutuhkan melalui kemandirian lokal dengan menghidupkan roda perekonomian nasional melalui pola interdependensi daerah satu dengan daerah lain dalam suatu proses nilai tambah pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan terbentuk distribusi kesejahteraan di seluruh wilayah Nusantara”.

305

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dengan pen-
tahapan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan potensi para pelaku ekonomi yang terlibat dalam sistem perekonomian.
2. Dekonsentrasi sentra-sentra keuangan ke daerah otonom.
3. Kemitraan melalui program “Bapak Angkat” yang melibatkan proses distribusi kekuatan perekonomian ke daerah.
4. Sosialisasi asas interdependensi antar satu daerah dengan daerah lain.
5. Sosialisasi orientasi baru pasar dalam negeri sebagai potensi pasar raksasa.

6. Kesatuan kendali koordinasi dan visi dari tingkat pusat sampai ke daerah.
7. Sosialisasi ide dan implementasi dengan asas partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun pelaksanaan tahap-tahap dalam strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan

306

Pada dasarnya, sejumlah lebih dari Rp 400 triliun aset (di luar lebih dari Rp 200 triliun yang macet total) yang berada di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), adalah aset yang kegiatan usahanya masih berjalan, namun tidak memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman bank, yang praktis sudah digantikan/ditukar oleh dan pemerintah melalui program obligasi yang diberikan ke perbankan nasional.

Restrukturisasi hutang baru menyentuh kurang lebih 2,5% seluruh aset yang dikuasai pemerintah tersebut, dimana dilemanya adalah apabila belum direstrukturisasi, maka pelaku ekonomi tersebut tidak diperkenankan memperoleh kucuran dana (tidak bankable). Terobosan politik untuk mempercepat proses restrukturisasi harus dilakukan, antara lain dengan model PMP sementara (Penempatan Modal Pemerintah Sementara), yang berarti untuk sementara pemerintah akan mempunyai kepemilikan di kegiatan usaha. Esensi upaya ini adalah tanpa menambah biaya yang dikeluarkan, yakni dengan mengkonversi hutang menjadi modal sementara, perusahaan dapat dinyatakan sehat dan

masuk dalam siklus perekonomian.

Dengan persyaratan yang terukur dan transparansi yang diterapkan diharapkan bahwa:

- a. Perekonomian riil yang diwakili lebih dari 50% pelaku ekonomi segera hidup kembali dan perbankan nasional dapat menyalurkan lebih dananya, tanpa harus bersusah payah melakukan “assesment” guna memberi pinjaman pada para pelaku ekonomi baru.
- b. Sesuai dengan manajemen krisis dimana unsur pengendalian sangat penting, maka melalui mayoritas kepemilikan sementara, pemerintah dapat mengendalikan kekuatan ekonomi nasional ke arah suatu visi baru perekonomian nasional.

307

2. Dekonsentrasi Sektor Keuangan

Suatu kenyataan bahwa sirkulasi keuangan nasional memusat di ibukota negara. Dengan kewenangan serta fasilitas pendukung yang dimilikinya, pemerintah melalui otoritas moneter mendorong pembentukan sentra keuangan daerah dengan cara menggeser kantor-kantor pusat perbankan ke daerah/ibukota provinsi. Dengan cara tersebut maka diharapkan bahwa :

- a. Proses pengambilan keputusan bagi suatu dukungan pembiayaan perekonomian di daerah menjadi sangat cepat dan efektif, bahkan sistem pengawasan perbankan pada pelaku ekonomi menjadi semakin melekat.

- b. Terjadinya proses distribusi nasional sumber daya manusia secara alamiah, dimana tenaga kerja profesional keuangan bergerak ke sentra keuangan baru di daerah.
- c. Terjadinya akselerasi pembangunan pada daerah setempat, mengingat bertambahnya daya dukung finansial setempat.

3. Kemitraan Melalui Program Baru “Bapak Angkat”

308

Dengan hidupnya kembali sektor riil dan terdekonsentrasinya dukungan finansial, maka melalui “kekuatan kepemilikannya”, pemerintah memperkenalkan program baru “Bapak Angkat”.

Dalam konsep program lama “Bapak Angkat”, perusahaan sebagai “Bapak Angkat” diberi berbagai kewajiban untuk mendukung lingkungan setempat, ataupun memberikan upaya agar masyarakat lingkungan setempat dapat berkontribusi pada perusahaan, sehingga proses timbal balik akan menghasilkan kesejahteraan.

Kenyataan yang timbul dari program lama adalah kurangnya ketersediaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih, bahkan perusahaan dibebani pengeluaran non operasional produksi yang sering dianggap mengganggu “*cash flow*” kegiatan usaha. Jalan pintas yang sering ditempuh adalah menunjuk usaha anak angkat yang berpengalaman untuk mendukung kegiatan usaha. Sebagai gambaran sebuah perusahaan di Papua dapat menunjuk usaha “Anak Angkat” di Jakarta untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari yang sederhana.

Program baru “Bapak Angkat” akan memitirakan sektor riil sebagai inti dengan sektor keuangan (perbankan) yang didorong untuk membiayai program tersebut. Selanjutnya, kawasan lingkungan setempat berfungsi menyediakan sumber daya manusia, yang dimitirakan dengan dukungan teknologi dan manajemen dari universitas, lembaga tinggi atau lembaga penelitian setempat. Untuk memfasilitasi proses, maka peran lembaga swadaya masyarakat setempat diikutsertakan namun tetap dalam kendali format serta visi yang disepakati. Hasil yang diharapkan adalah:

309

- a. Sentra industri dan perekonomian wilayah beserta seluruh kawasan pendukungnya akan terpacu kegiatan perekonomiannya akibat proses timbal balik aktivitas usaha.
- b. Tekanan pada masalah kesejahteraan dalam tahap ini akan berkurang secara signifikan, dan merata di seluruh Indonesia.

4. Sosialisasi Asas Interdependensi Antar Wilayah

Suatu kenyataan di masa lalu membuktikan bahwa apabila pasar membutuhkan suatu komoditi tertentu, maka hampir secara serentak seluruh masyarakat melakukan upaya pemenuhan. “*Over supply*” dalam masalah cengkeh, ke lapa sawit adalah salah satu contoh tidak adanya koordinasi perekonomian nasional yang seharusnya menghasilkan proses saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dengan penerapan konsep Otonomi Daerah, maka kemandirian lokal akan memperoleh tempat yang lebih baik, namun harus dalam kerangka dan visi berbangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kewenangan dalam sistem usaha yang dikendalikanannya, pemerintah dapat memprakarsai usaha yang dilakukan di satu daerah, dibutuhkan hasilnya oleh daerah lain dengan cara identifikasi produk spesifik dan generik yang mungkin bisa dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam tahap ini maka diharapkan:

310

- a. Aktivitas kemandirian usaha suatu daerah akan berkoneksitas dengan aktivitas perekonomian daerah lain, bahkan pulau lainnya.
- b. Kehidupan berbangsa dan bernegara memperoleh makna dari tingginya frekuensi aktivitas perekonomian antar daerah/pulau.

5. Sosialisasi Reorientasi Pasar

Dorongan pemerintah untuk selalu meningkatkan ekspor, yang telah secara tidak langsung mengabaikan besarnya potensi raksasa pasar dalam negeri, sementara telah diketahui bahwa kontribusi hasil ekspor tidak signifikan masuk dalam cadangan devisa nasional. Pada tahap ini, ekonomi yang sudah tumbuh dan terdekonsentrasi pada seluruh wilayah di tanah air, lebih didorong untuk memanfaatkan pasar domestik bagi hasil industrinya, sehingga diharapkan terjadinya “*multiplier effect*” dari proses sosialisasi orientasi pasar domestik yang dicanangkan pemerintah pada aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6. Kesatuan Kendali Koordinasi dan Visi

Kenyataan dalam krisis membuktikan bahwa gejala akibat turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat kerap

ditangani secara tidak profesional. “Sense of Crisis” di tingkat pengendali yang seharusnya sangat kuat, tidak pula diikuti oleh pemahaman di tingkat subordinasi akibat ketiadaan visi nasional yang tangguh yang terus disosialisasikan dalam menghadapi krisis.

Suatu tahap penyelesaian strategis masalah nasional haruslah mempunyai aspek kesatuan pengendalian koordinasi dan visi, manakala hasil yang diharapkan adalah hal yang sama sekali baru, yakni redefinisi dan reposisi semua paradigma lama.

311

Dengan implementasi terus menerus kendali koordinasi sampai terbentuknya operasional perekonomian wilayah yang mapan, maka infrastruktur otonomi daerah akan memperoleh makna kesejahteraan yang harmonis dalam interaksinya dengan daerah otonomi yang lain.

7. Sosialisasi Ide dan Implementasi

Suatu proses raksasa menghidupkan perekonomian Indonesia mau tidak mau harus secara terus menerus diliputi oleh suatu mekanisme sistem informasi nasional yang terpadu, agar tercapai suatu visi kehendak dan langkah perbuatan yang sama.

Cara penerapannya adalah dengan secara terus menerus menyosialisasikan tahap-tahap strategi penyelesaian krisis nasional, sehingga secara lambat dan pasti, seluruh lapisan masyarakat akan berpartisipasi memberi dukungan.

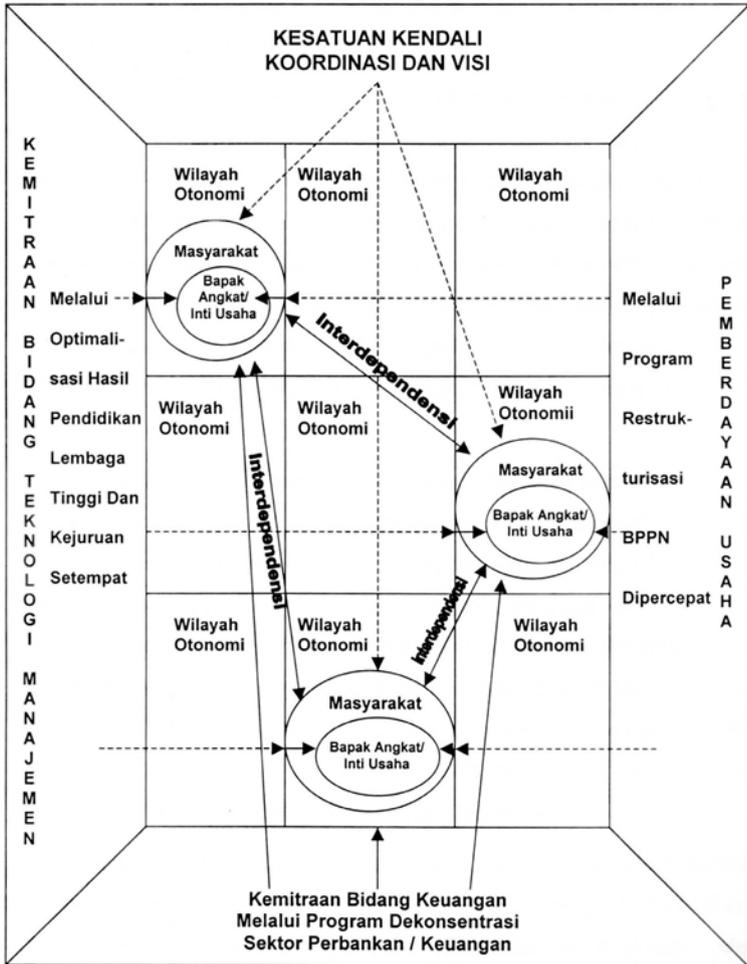
Proses ini bukan saja mengawali tindakan perbaikan

kesejahteraan masyarakat, namun juga mengisi seluruh rangkaian tahap-tahap strategis penyelesaian krisis.

Dengan rangkaian tahap strategi yang sangat sarat dengan pemberdayaan perekonomian setempat yang mandiri, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan secara perlahan meningkat secara pasti yang pada gilirannya akan mendemotivasi dorongan politik yang berlebihan dari kaum intelektual, dan mengarahkannya ke wilayah ekonomi yang berkesejahteraan, dimana hasil akhirnya dapat dipastikan yakni menurunnya gangguan keamanan dan naiknya tingkat kestabilan politik.

312

Gambaran lengkap tahapan strategi yang diimplementasikan dapat diterjemahkan melalui matriks berikut :



UPAYA PENDEKATAN SIMULTAN KEAMANAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Suatu upaya penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat memerlukan tingkat keamanan tertentu, namun sebaliknya penyelenggaraan keamanan terbukti tidak efektif apabila

mengabaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi krisis nasional, suatu kesadaran tentang lemahnya daya tangkal di bidang ekonomi dan moneter telah melahirkan perlunya suatu strategi nasional sistem deteksi dini. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak adanya upaya keamanan tersebut telah menyebabkan krisis menjadi berkelanjutan dan berubah wajah menjadi masalah multidimensi.

314 Fenomena ancaman keamanan yang muncul di awal krisis dan tidak terbaca secara jelas oleh para pengambil keputusan, ternyata terbukti menjadi fenomena ancaman yang berkelanjutan. Ancaman tidak ter kendalinya kurs nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar, tetap menjadi faktor distorsi terhadap kestabilan politik dan ekonomi nasional, meskipun krisis telah berjalan lebih dari 2 tahun. Faktor keamanan selalu disalahkan sebagai penyebab padahal kenyataan menunjukkan bahwa dengan sifat multidimensi saat ini, tidaklah mudah bagi kita untuk serta merta menunjuk faktor keamanan sebagai penyebab.

Lahirnya suatu kondisi prasejahtera yang meluas akibat berkelanjutannya krisis yang timbal balik dengan sektor keamanan, melalui suatu strategi pendekatan ekonomi mandiri diupayakan untuk diatasi. Mengintegrasikan seluruh potensi bangsa yang ada serta menformulasikan dan mengimplementasikan ke dalam suatu infrastruktur yang tepat, akan secara cepat menyerap dan mengakomodasi distorsi kesejahteraan.

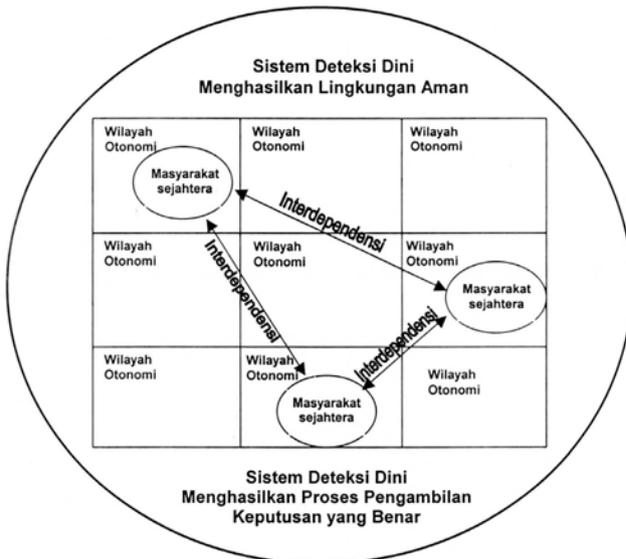
Dengan fakta bahwa sampai saat ini ancaman keamanan yang timbul dalam sektor perekonomian tetap berlangsung, sementara bentuk penanganan krisis yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat adalah menyejahterakan masyarakat melalui menghidupkan sektor perekonomian, maka skala prioritas

implementasi strategi mengatasi krisis ekonomi haruslah ditempatkan secara bersamaan dan simultan, sehingga hasil yang dicapai adalah keseimbangan antara pencapaian aspek keamanan dan kesejahteraan.

Melalui pendekatan ini, maka kesatuan visi yang akan memperkuat visi kebangsaan, serta distribusi kesejahteraan yang merupakan wujud sila kelima Pancasila, sekaligus memberi tempat kepada hak-hak individu untuk memperoleh kehidupan serta penghidupan yang layak, akan melahirkan suatu masyarakat yang berdemokrasi dan saling menghormati hak-hak asasi manusia.

315

Suatu masyarakat yang berdemokrasi secara benar, haruslah tumbuh dari suatu infrastuktur masyarakat sejahtera. Citra yang akan diwujudkan tersebut dapat digambarkan melalui matriks sebagai berikut :



Dengan implementasi simultan secara seimbang yang berkelanjutan kedua strategi di atas, maka dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, gambaran kesejahteraan dan keamanan nasional akan mencerminkan gambaran Ketahanan Nasional, dimana “core values” bangsa Indonesia dapat bermanifestasi secara nyata dan utuh dalam semangat kebangsaan sebagai esensi Wawasan Nusantara.

KESIMPULAN

316 Berdasarkan seluruh hasil penulisan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber permasalahan krisis ekonomi Indonesia adalah:
 1. Krisis moneter dalam negeri yang ditandai dengan kelangkaan likuiditas yang berakibat pada rusaknya sistem perbankan nasional, dimana seluruh sistem perekonomian Indonesia mempercayakan proses peredaran dananya. Ketidakmampuan instrumen birokrasi Indonesia dalam membaca, menganalisa dan memecahkan masalah secara komprehensif telah menyebabkan antisipasi krisis moneter tidak dilakukan secara proporsional.
 2. Pengaruh lingkungan strategis berupa interaksi kepentingan nasional dan global negara super power ekonomi dunia yang ditandai dengan penggunaan komoditi mata uang dunia dalam transaksi perdagangan valuta asing transnasional dalam suatu infrastruktur sistem informasi tanpa tapal batas.

- b. Krisis ekonomi Indonesia adalah krisis multidimensi, dimana implikasi yang timbul terjadi pada tatanan politik, ekonomi dan ketatanegaraan Indonesia yang pada gilirannya menyentuh hajat hidup rakyat banyak ; dengan diakumulasi oleh dampak tersebut, krisis ini bermuara pada masalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Dampak yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung berakibat pada masalah kesejahteraan dan keamanan, yang ditandai dengan berbagai indikator kerawanan kesejahteraan, seperti naiknya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan serta maraknya berbagai konflik di tingkat lokal maupun nasional.
- d. Dengan pendekatan Astagatra dan holistik-komprehensif dengan menggunakan data empirik, dilakukan telaah interaksi peran keamanan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan secara timbal balik, sehingga suatu sasaran yang melibatkan aspek tindakan dan subyek tindakan dirumuskan sebagai upaya menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan upaya menurunkan tingkat gejala permasalahan sosial yang berinteraksi dengan masalah keamanan.
- e. Hasil analisis melahirkan suatu strategi penangkalan preventif melalui sistem deteksi dini dengan pembentukan intelijen ekonomi yang berfungsi mendukung sistem birokrasi dalam memberi sinyal awal datangnya suatu ancaman keamanan akibat suatu tindakan ekonomi, dan terbentuknya suatu tindakan pendekatan kesejahteraan melalui upaya membudayakan sikap ekonomi mandiri dengan mengimplementasikan asas desentralisasi perekonomian

nasional di atas platform desentralisasi kekuasaan dalam rangka otonomi daerah.

- 318
- f. Dengan dilandasi oleh suatu visi yang sama tentang kebangsaan dalam kerangka Wawasan Nusantara, maka hasil upaya simultan pendekatan keamanan dan kesejahteraan akan membentuk kembali kondisi masyarakat yang dinamis yang memiliki Ketahanan Nasional, sehingga dengan infrastruktur yang demikian, nilai-nilai universal yakni demokrasi serta penghargaan kepada hak-hak asasi manusia dapat tumbuh serta mendapat tempat yang tepat dan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ber-Wawasan Nusantara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulisan ini, diajukan saran sebagai berikut:

- a. Mempersatukan visi nasional sehingga diperoleh persepsi yang sama dalam mencari jalan keluar yang menyeluruh dari masalah-masalah yang timbul akibat krisis ekonomi ini.
- b. Mengendalikan simpul utama permasalahan pada akar permasalahan, dengan membentuk intelijen ekonomi yang melibatkan unsur lintas disiplin guna menyamakan visi dan persepsi pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan, serta memberdayakan kembali para pelaku perekonomian Indonesia dengan mempercepat proses restrukturisasi, antara lain melalui penyertaan modal

pemerintah sementara, sehingga segera menghidupkan kembali sektor perekonomian riil di satu sisi, dan di sisi lain memberikan kewenangan kendali koordinasi kepada pemerintah guna menata kembali perekonomian Indonesia.

- c. Menghidupkan kembali infrastruktur sistem informasi nasional yang sekaligus dengan muatan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, namun mempunyai tugas mengamankan visi dan persepsi kebangsaan melalui proses sosialisasi konsep distribusi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dalam format reformasi yang disepakati. Dengan demikian reformasi sistem informasi nasional yang dalam era lalu sarat dengan pesan politik pemerintah akan mempunyai wajah baru sebagai media yang menyampaikan pesan keamanan dan kesejahteraan dengan visi Wawasan Nusantara yang kuat.
- d. Mendinamisasikan perekonomian wilayah dalam rangka otonomi daerah dengan cara:
 - 1. Mendorong pembentukan kantor pusat perbankan ke daerah/ibukota provinsi.
 - 2. Memitracan potensi sektor ekonomi riil yang telah diberdayakan dengan perbankan, lembaga tinggi/penelitian setempat serta masyarakat sekitarnya sebagai potensi ekonomi yang ingin disejahterakan.
- e. Mendorong lebih hidupnya pasar raksasa domestik sebagai orientasi baru kekuatan ekonomi nasional, sehingga kegiatan ekonomi praktis yang interdependensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan secara nyata berkontribusi

pada persatuan dan kesatuan bangsa, karena asas saling membutuhkan dan menguntungkan antar sesama masyarakat Indonesia di berbagai tempat yang terpecah secara geografis akan dipersatukan oleh bahasa kehidupan sehari-harinya, yakni penggunaan bahasa ekonomi transnusa yang menggunakan alat tukar yang sama yaitu Rupiah, dimana hal ini akan mengakselerasi proses distribusi kesejahteraan di seluruh persada tanah air.





INDEKS

322

A

Airbus Military
53, 190, 200
aktor-non-negara
112
alutsista
3, 4, 5, 8, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
83, 88, 90, 94, 104, 150, 156,
185, 186, 187, 189, 190, 192,
193, 197, 198, 199, 200, 205,
206, 208, 240
Amerika Serikat
129, 215, 216, 251
ancaman
4, 11, 28, 40, 83, 92, 93, 97, 98,
108, 109, 110, 111, 113, 117,
118, 119, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 148, 149,
150, 151, 153, 154, 155, 168,
174, 177, 211, 215, 219, 228,
229, 230, 231, 232, 236, 251,
256, 279, 282, 284, 286, 292,
294, 295, 296, 297, 298, 299,
314, 317
ancaman cyber
219
ancaman serius
113
Angkatan Perang
90, 186
asas perang
166
asimetris
37, 59, 67, 74, 110, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 122,
123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 149, 151, 193, 217
aspek medan
166
asymmetric enemy
122, 127, 131

B

Balkanisasi
226
bela negara
93, 96, 98, 99, 104, 156, 179,
237
berjuang

2, 13, 25
Bhinneka Tunggal Ika
13
Buku Putih Pertahanan
103

C

C-212
190, 200
civil society
80, 81, 235
CN 235
91, 190, 200
CN 295
91, 190, 200
cyber war
37, 219

D

dahsyat
51, 75, 90, 92, 103, 186, 206
daya pukul
51, 90, 92, 151, 186, 206, 207
daya tangkal
104, 151, 152, 155, 156, 157,
179, 207, 314
defence capability building
7
Defence intellectual
management
174
degradasi lingkungan
113, 230
demokrasi
17, 24, 26, 27, 37, 43, 44, 59, 61,
62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 104,
135, 156, 175, 210, 211, 212,
213, 222, 224, 225, 235, 237,
239, 241, 242, 249, 264, 284,
290, 292, 318, 319
Dewan Keamanan Nasional
235, 236, 238
dinamis
9, 13, 58, 66, 80, 118, 128, 267,
279, 281, 283, 290, 318
DKN
236
Doktrin
13, 83, 103, 169
Doktrin Pertahanan

103

E

efektivitas pertahanan
88, 90, 93
era keterbukaan
20, 215

F

Founding Fathers
161
fungsi militer
58, 66

G

garda nasional
11
Gelar kekuatan TNI
154, 155
geopolitik
37, 244
gerakan separatis
149, 232
globalisasi
82, 97, 109, 110, 111, 112,
114, 123, 124, 125, 135, 177,
217, 236, 244, 278, 279, 292,
294, 297
gotong royong
45
grand strategy
187

H

Hackers
219
hak asasi manusia
113, 224, 226, 249, 260, 264,
266, 274, 278, 284, 290, 292,
315, 318, 319
Hasnan Habib
229, 230
helicopter angkut
53
heli Cougar 725
190, 200
helikopter serbu
49, 91, 190, 200
helikopter serbu Apache
49
Hercules C-130

49
HOS Tjokroaminoto
161

I

idealisme
6, 69
Indonesia
ii, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 25,
26, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58,
65, 66, 72, 73, 75, 81, 83, 89, 91,
93, 102, 104, 105, 110, 117, 123,
124, 125, 129, 134, 135, 136,
137, 138, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 151,
152, 154, 155, 156, 157, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 169, 171, 172, 176, 184,
187, 188, 190, 191, 193, 194,
198, 200, 201, 211, 216, 217,
219, 223, 224, 225, 230, 231,
233, 235, 236, 244, 245, 246,
247, 252, 256, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 272, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286,
289, 292, 293, 294, 300, 301,
302, 303, 304, 306, 309, 311,
316, 317, 318, 319, 320
industri pertahanan
45, 52, 53, 54, 60, 68, 88, 89, 90,
91, 93, 94, 138, 142, 143, 145,
150, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194,
197, 198, 199, 200, 201, 206,
207, 208
industri strategis
7
inovatif
16, 21, 118, 129, 179
Instrumen ekonomi
104, 156
instrumen militer
104, 156
instrumen penangkalan
103, 104, 105, 156, 157
Instrumen politik
104, 156

Instrumen psikologis
104, 156
Instrumen teknologi
104, 156
insurjensi
56, 58, 59, 60, 67, 68, 129
integritas
13, 26, 31, 72, 75, 83, 135, 136,
171, 210, 213, 229, 231
integritas wilayah nasional
229, 231
intelijen
122, 131, 142, 162, 167, 230,
245, 295, 296, 297, 298, 300,
317, 318

J

Jenderal Soedirman
155, 162, 163, 175
jenis ancaman
232
Jerman
53, 191, 199
jiwa korsa
2, 13, 75
jiwa raga
170

K

kapabel
58, 66, 68
kapal fregat
49
kapal patroli cepat
49, 92, 190, 200
kapal rudal cepat
49
kapal selam
49, 53, 91, 92, 189, 190, 200,
201
Karakteristik ancaman
110, 123
karakter perang
123
keadaan perang
58, 66, 155
keamanan dalam negeri
8, 124, 232
keamanan ekonomi
113, 149, 231

keamanan energi
113, 149, 231
Keamanan Insani
232
Keamanan Ketertiban
Masyarakat
232
keamanan komprehensif
230, 231
keamanan lingkungan
113, 231
keamanan manusia
113, 149, 229
keamanan nasional
61, 62, 70, 110, 113, 123, 130,
149, 224, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 278,
279, 280, 281, 282, 286, 288,
290, 293, 294, 295, 296, 297,
300, 316, 317
Keamanan Negara
227, 229, 232
keamanan pangan
113, 149, 231
Kecil Efektif Efisien
3
kedaulatan
4, 5, 7, 8, 24, 25, 26, 42, 43,
45, 59, 60, 67, 68, 72, 75, 91,
97, 112, 117, 126, 136, 148,
150, 151, 153, 188, 198, 207,
222, 225, 227, 229, 236, 237,
238, 281
kekuatan diplomasi
102, 104, 105, 156, 157
kekuatan militer
8, 37, 38, 44, 50, 54, 56, 59, 60,
67, 75, 90, 92, 102, 104, 105,
112, 113, 115, 122, 131, 151,
156, 157, 186, 206, 207, 226,
229, 232
kekuatan pertahanan negara
12, 153
kekuatan pokok minimum
51
kekuatan TNI
3, 5, 7, 8, 12, 27, 45, 49, 51, 78,
82, 154, 155, 208

- kelangkaan bahan pangan
113
- kelangkaan sumber daya alam
113
- kelaparan
113, 125, 150, 230
- kelompok separatis
115
- kemampuan pertahanan
5, 7, 8, 92, 93, 94, 117, 153, 177, 184
- Kemampuan Teritorial
164
- Kementerian Pertahanan
51, 53, 137, 138, 142, 168, 187, 194, 197, 198, 205, 208
- kemerosotan etika
98
- kemiskinan
110, 113, 125, 150, 223, 230, 232, 277, 278, 291, 293, 301, 317
- kemitraan strategis
141, 142, 144, 147
- kendaraan taktis
53, 189, 199
- kendaraan tempur
91, 188, 189, 199, 207, 208
- kendaraan tempur roda rantai
189, 199
- kepemimpinan
31, 39, 57, 65, 72, 73, 120, 169, 171, 174, 177, 178, 266, 284
- kerjasama keamanan
230
- kerja sama pertahanan
137, 138, 142, 145, 147, 172
- keselamatan bangsa
7, 24, 26, 43, 59, 62, 67, 70, 74, 89, 97, 151, 185, 186, 197, 207
- kesenjangan sosial
232, 279
- keunggulan informasi
166
- keutuhan teritorial
43, 236
- keutuhan wilayah
5, 7, 8, 42, 45, 59, 67, 91, 97, 117, 136, 148, 150, 151, 153, 188, 198, 207, 238
- KKIP
187, 198
- Komando Wilayah
130
- komando teritorial
82
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan
187, 198
- komitmen
13, 25, 26, 27, 52, 57, 65, 73, 98, 143, 193, 213, 245
- kompetensi
6, 9, 12, 131, 179, 235, 236, 240, 241
- komponen pendukung
88, 92, 93, 193
- Komunikasi Sosial
164
- Konferensi Asia-Afrika
141
- konflik komunal
125, 150
- konsep keamanan
110, 123, 227, 228, 231
- konsolidasi
2, 12, 13, 169, 239
- kreatif
16, 21, 111, 124, 179
- kredibel
58, 60, 66, 68, 104, 156
- L**
- Landing Ship Tank
190, 200
- Lapor Cepat
164
- latihan bersama
144, 146
- Latihan bersama
137
- latihan tempur
166
- ledakan jumlah penduduk
113
- Leopard
49, 53, 191, 199
- lingkungan hidup
110, 123, 224, 230
- lingkungan strategis
166, 224, 245, 290, 292, 293, 316
- logistik musuh
161
- logistik terpusat
116, 127
- LPD (Landing Platform Dock)
53
- M**
- main battle tank
49
- manajemen krisis
39, 40, 214, 217, 218, 219, 220, 307
- Manajemen Teritorial
164
- manajemen TNI
58, 66, 68, 73
- mandiri
49, 88, 89, 90, 94, 116, 127, 138, 185, 186, 188, 189, 190, 197, 198, 253, 258, 305, 312, 314, 317
- masa damai
10, 58, 62, 66, 70, 103, 153, 155, 163
- matra darat
49, 104, 156, 206
- matra laut
146
- matra udara
49
- MBT Leopard
191, 199
- memenangkan hati
163, 175
- memodernisasi
49, 52, 60, 68, 205, 208
- Menteri Pertahanan
43, 44, 130, 137, 143, 144, 147, 153
- militansi
2, 10, 13, 14, 16, 21, 25, 104, 156, 192
- militerisme
81
- militer profesional
58, 66, 74
- Minimum Essential Force
3, 7, 13
- mobilitas
5, 6, 51, 90, 92, 114, 120, 125, 151, 186, 206, 207, 279
- model peperangan
112, 149
- modern
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 32, 33, 69, 89, 97, 129, 138, 168, 178, 185, 186, 218, 229, 255
- modernisasi peralatan militer
92, 208
- modus operandi
59, 67
- moral
31, 32, 45, 73, 75, 113, 126, 169, 171, 290
- mortir
91, 188, 189, 199
- N**
- NATO
40, 215, 219
- negara kepulauan
83, 252
- nilai-nilai 45
170
- NKRI
3, 4, 5, 13, 24, 26, 114, 117, 148, 151, 152, 153, 223, 226,

233, 238
nonkonvensional
112
Non State Actors
215, 217

O

Oerip Sumohardjo
66
operasi kemanusiaan
51, 60, 68, 78, 82, 129, 190, 200
operasi militer
28, 45, 75, 154, 167, 169
Operasi Militer Perang
(OMP)
5, 27
Operasi Militer Selain
Perang (OMSP)
5, 27
otoritarian
17, 20, 44, 65, 70, 72, 79, 80,
222, 225, 237

P

Pancasila
13, 17, 45, 57, 62, 65, 70, 98,
117, 279, 283, 284, 290, 292,
315
Panser
53, 91, 188, 189, 322
Panser Anoa
91, 188, 189
Paradigma Baru TNI
79
pasar bebas
224, 247, 249, 254, 264
patriotik
2, 13
patriotisme
104, 156
pejuang
26, 31, 34, 45, 73, 162
pemberdayaan wilayah
pertahanan
130
pemberontakan bersenjata
232
Pembinaan Perlawanan
Rakyat
164
pembinaan teritorial
20, 40, 58, 60, 66, 68, 82, 130,
163, 164
pencurian ikan
113
Pentagon
215
penyelundupan manusia
113
peralatan tempur
89, 185

perang asimetris
37, 74, 110, 112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 122, 123, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 149,
151, 217
Perang Dingin
231
perang gerilya
162
perang konvensional
112, 118, 129
perbatasan
4
perdagangan manusia
113
perdagangan narkotika
113
pergaulan internasional
223, 224, 244
Perkapalan Kodja Bahari
190, 200
perkiraan ancaman
149
persenjataan
6, 12, 37, 49, 161, 178, 205, 206,
207, 240
pertahanan
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17,
20, 24, 25, 26, 27, 40, 42, 43,
44, 45, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 66, 68, 69, 72, 78, 79, 81,
82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 98, 102, 103, 104, 105, 110,
113, 117, 118, 122, 123, 129,
130, 131, 134, 136, 137, 138,
140, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 163, 168,
172, 174, 176, 177, 178, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 204, 205,
206, 207, 208, 215, 219, 229,
232, 233, 234, 239, 240, 281,
286, 297
pertahanan militer
83, 92, 94, 104, 148, 153, 154,
156
pertahanan nirmiliter
83, 92, 93, 94, 104, 148, 153,
155, 156
perubahan demografik
113
perwira
9, 10, 14, 44, 61, 75, 80, 118,
144
pesawat angkut
49, 53, 91, 92, 188, 189, 190,
200, 207
pesawat angkut ringan
91, 190, 200

pistol
52, 91, 188, 189, 199
postur
4, 48, 50, 51, 91, 94, 150, 153,
168, 204, 206, 207
Postur Pertahanan
103
Postur pertahanan negara
153
power
34, 37, 74, 113, 146, 230, 244,
252, 316
Presiden Hu Jintao
141
Presiden Joko Widodo
141, 147
Presiden Soekarno
161
Presiden Xi Jin Ping
141, 147
profesi
9, 12, 25, 38, 45, 69, 72, 81, 140,
144, 174, 177
profesional
2, 4, 6, 14, 24, 25, 26, 31, 39,
43, 45, 58, 66, 69, 73, 74, 90,
94, 114, 130, 137, 138, 171, 174,
177, 178, 186, 191, 208, 212,
230, 240, 268, 298, 308, 311
Prosedur Pimpinan Pasukan
166
PT Dirgantara Indonesia
91, 188, 200
PT. PAL
53, 91, 145, 189, 190
PT Pindad
52, 91, 199
Purnomo Yusgiantoro
143

Q

Quick Respond
215

R

reformasi
17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 44,
57, 58, 66, 72, 73, 74, 79, 80,
81, 161, 207, 222, 237, 240, 244,
265, 266, 277, 284, 319
Reformasi
18, 19, 72, 79, 80, 231, 253
rekayasa produksi alutsista
104, 156
rela berkorban
162, 169, 170
rencana strategis
51, 200
Renstra
60, 69
Revitalisasi

2, 14, 186
 revolusi
 79, 255
 rudal multilaras
 49

S

Sang Pecundang
 112, 125
 Sang Pemenang
 112, 125
 Sapta Marga
 9, 13, 21, 27, 31, 45, 57, 62, 64,
 65, 70, 73
 Satuan Bantuan Tempur
 208
 Satuan Tempur
 208
 senjata laras panjang
 52
 separatis bersenjata
 232
 serangan cyber
 219
 serangan militer
 149
 Singapura
 134, 135, 136, 137, 138, 216,
 217, 253, 265
 sistem persenjataan
 49, 178, 205
 Sistem Pertahanan dan
 Keamanan Rakyat Semesta
 58, 117, 152
 sistem pertahanan negara
 24, 26, 45, 89, 91, 98, 103, 104,
 150, 152, 157, 185, 193, 204,
 205, 207
 Sistem Pertahanan Semesta
 148, 152, 153
 sistem politik nasional
 17, 58, 284
 si vis pacem para bellum
 91, 150, 207
 skuadron F-16
 49
 skuadron Sukhoi
 49
 Soekarno
 70, 161
 State Actors
 215, 217
 strategi
 4, 10, 37, 39, 40, 50, 59, 67, 97,
 103, 112, 117, 119, 128, 129,
 154, 155, 160, 161, 162, 163,
 164, 165, 167, 168, 170, 171,
 172, 194, 197, 198, 219, 245,
 292, 293, 295, 305, 306, 311,
 312, 314, 315, 316, 317
 strategi adaptasi

59, 67
 Strategi Gerilya
 163
 strategi militer
 154, 155, 161, 167, 168
 strategi pertahanan
 4, 40, 103, 154, 155, 168, 219
 Strategi Pertahanan
 103
 sumber daya nasional
 44, 92, 98, 148, 152, 155
 Sumpah Prajurit
 9, 13, 21, 27, 31, 45, 57, 62, 64,
 65, 70
 Sun Tzu
 147, 160, 161, 162, 163, 164,
 165, 166, 167, 168, 169, 170,
 171, 172
 Sun Tzu's Art of War
 147
 survive
 170
 Susilo Bambang Yudhoyono
 51, 141

T

taktik
 56, 59, 67, 108, 112, 118, 119,
 120, 129, 130, 168, 169, 171
 taktik pertempuran
 120, 169
 tank amfibi
 49
 tank AMX-13
 199
 tank berat
 92, 191, 199
 tank ringan
 189, 190, 199, 200
 teknologi informasi
 10, 37, 38, 40, 111, 114, 176,
 244, 260
 Teknologi informasi
 114, 115
 teknologi menengah
 94, 189, 199
 Temu Cepat
 164
 teror
 37, 38, 40, 59, 67
 teroris
 40, 114, 115, 125, 149, 218
 terpadu
 4, 148, 152, 153, 224, 227,
 293, 311
 TNI AD
 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
 14, 91, 118, 120, 188, 199
 total
 79, 111, 124, 148, 152, 169, 257,
 276, 306

transfer teknologi
 199
 TUMMPAS
 166
 turbulensi ekonomi
 59
 Twin Towers
 215

U

Undang-Undang Kamnas
 236
 Undang-Undang Pertahanan
 80, 103
 Undang-Undang TNI
 80
 UUD 1945
 3, 13, 26, 43, 45, 57, 62, 65, 69,
 70, 72, 96, 98, 117, 151, 152,
 175, 207, 225, 233, 279, 292
 UU Peradilan Militer
 80

Y

Yuwono Sudarsono
 142, 143

DAFTAR PUSTAKA

327

- Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, *Menyeimbangkan Pencapaian Keamanan dan Kesejahteraan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi*, Lemhannas, Tahun 2000
- Harian *Kompas*, “Kerja Sama Sipil dan Militer”. Edisi 23 November 2015, halaman 7.
- Koran *SINDO*, “Berani membangun Indonesia kuat”. Edisi Jum’at, 8 November 2013, Halaman 4.
- Harian *Kompas*, “Era Kebangkitan Industri Pertahanan”, edisi Jumat, 23 November 2012
- Majalah Seskoad *Karya Vira Jati*, “Membangun TNI AD yang Kuat dan Modern Dalam Kerangka MEF Guna Menjamin Kedaulatan NKRI”, Edisi Nomor 116/2013.
- Majalah Akademi Militer *Lembah Tidar*, “Modernisasi Alutsista Saat Ini atau Tidak Akan Pernah”, Edisi Tahun 2012.
- Majalah Seskoad *Karya Vira Jati*, “UU Kamnas Milik Bangsa Indonesia”, Edisi Nomor: 114/2011.
- Majalah Seskoad *Karya Vira Jati*, “Militansi dan Intelektualisasi TNI”, Edisi 114/2011
- Kompas Tekno, “Eksistensi dan Konsistensi TNI”, Rabu, 5 Oktober 2011.
- Majalah *Gema Infanteri*, “Globalisasi dan Perang Asimetris: Dampaknya Terhadap Pembinaan Infanteri”, Edisi 81 tahun 2011.

- Bahan simposium Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dalam *"The 9th International Symposium on Sun Tzu's Art of War, Perspektif Tentang Implementasi Seni Perang Sun Tzu di Bidang Militer, Bisnis dan Politik"*, Tsingtao, Provinsi Shandong, Tiongkok, 25 Agustus 2014.
- Ceramah Wakil Menteri Pertahanan RI pada *Kuliah Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya, Jakarta, 26 Maret 2013*.
- Ceramah Wakil Menteri Pertahanan RI, *"Peran Muhammadiyah dalam Bela Negara"*, ceramah pada Pelatihan Kader Kepemimpinan Pencegahan Bahaya Terorisme Bagi Pemuda Muhammadiyah, 2013.
- 328 Pembekalan Wamenhan RI pada Bimbingan Teknis Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Mahasiswa serta Pramuka di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 19 September 2014.
- Ceramah Wakil Menteri Pertahanan RI tentang *"Perkembangan Strategis Industri Pertahanan dalam Sistem Pertahanan Negara"*, Balikpapan 27 Desember 2012.
- Abdurrachman, A, Drs. Ek, 1982, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Asian Business Vol. 33 No. 7, 1997, Dropping The Road To Recovery, Asian Business.*
- Asian Business Vol. 33 No. 9, 1997, Scandal Hurts Big Bang Reform, Asian Business.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2000, *Seminar Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)*, Banjarmasin, 29 April 2000.
- Christianto Wibisono, 1998, *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daniel Bell and Irving Kristol (Disarikan oleh Udan Biantoro), 1996/1997, *Resume The Crisis In Economic Theory*, Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga.

- Edward Waltz, 1998, *Information Warfare Principles and Operation*, Norwood, USA: Artech House, Inc.
- Edward, J. Filiberti, *US Army War College Quarterly*, 1995, National Strategic Guidance.
- Eir News Service, 1994, *The Plot Washington D.C.*
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah* Tahun 2000.
- Lemhannas, 1997, *Teori Dasar dan Perkembangan Strategi*, Jakarta: Pokja Strategi Lemhannas.
- Lemhannas, 1999, *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta R.M. Sunardi, Lemhannas.
- Lemhannas, 2000, *Ketahanan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kelompok Kerja Tannas Lemhannas.
- Lemhannas, 2000, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Cetakan Keduapuluh, Jakarta : Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Menko Kesra dan Taskin, 2000, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Ceramah pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) VIII Lemhannas Tanggal 4 Mei 2000.
- Paul Krugman, 1998, *Saving Asia, It's Time To Get Radical*, Fortune No. 17 1998.
- Sasmojo, 1998, *Ceramah Kepada Siswa Intelijen BIA Tanggal 29 Mei 1998*, Jakarta.
- Sitanggang, H., Drs., 1999, *Perencanaan Pembangunan Suatu Teori dan Praktek*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sri Mulyani Indrawati, 1988, *Teori Moneter*, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tarmidzi Rangkuti, H., M.Sc., Ec., In Foreign Trade, 1998, *Krisis Nilai Tukar Rupiah Adalah Awal Dari Krisis Nasional*, Jakarta : Diskusi dan Pembahasan, 13 Juli 1998.

The United State Government on National Security/21st Century, 1999, New World Coming : American Security in The 21st Century, Major Themes and The Emerging Global Security Enviroment For The First Quarter of The 21st Century.

The White House Report, December 1999, A National Security Strategy For a New Century, USA : The White House.

330 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

SUMBER ONLINE :

<http://nasional.sindonews.com/read/803181/18/berani-membangun-indonesia-kuat-1383872677/2>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/04124699/militansi.dan.intelektualisasi.tni>.

<http://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/04124699/militansi.dan.intelektualisasi.tni>.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/23/17382762/Era.Kebangkitan.Industri.Pertahanan>

<http://tekno.kompas.com/read/2011/10/05/04194944/Eksistensi.dan.Konsistensi.TNI>

<https://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/07/1699/manajemen-intelektual-pertahanan>

<https://www.kemhan.go.id/2009/11/18/fungsi-teritorial-tni-mendampingi-satu-dekade-reformasi.html>

<https://www.kemhan.go.id/2009/11/18/fungsi-teritorial-tni-mendampingi-satu-dekade-reformasi.html>

<http://dmc.kemhan.go.id/post-teori-sun-tzu-tidak-hanya-diterapkan-di-bidang-militer-tetapi-juga-di-bisnis-dan-politik.html>

<http://opinikompa.blogspot.co.id/2013/10/tni-dan-politik-negara.html>



RIWAYAT HIDUP:

LETNAN JENDERAL TNI (PURN) SJAFRIE SJAMSOEDDIN



332

Dilahirkan di Makassar tanggal 30 Oktober 1952. Menyelesaikan Akabri Bagian Darat tahun 1974 dengan kecabangan Infanteri. Menikah dan dikaruniai satu orang putra dan satu orang putri.

KARIR MILITER

Karir militernya diawali di Komando Pasukan Khusus sebagai Komandan Peleton pada tahun 1975, Komandan Kompi, Komandan Batalyon, Wakil Asisten Operasi Komando Pasukan Khusus. Komandan Group-A Paspampres, Komandan Korem 061/SK Bogor, Kepala Staf Garnizun-1 Jakarta, Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Asisten Teritorial Kasum ABRI, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI, Sekjen Dephan, dan Wakil Menteri Pertahanan pada tahun 2010 – 2014. Menyandang pangkat aktif militer sebagai Letnan Jenderal sampai tahun 2011.

Bertugas sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam kegiatan Kerjasama Internasional di bidang pertahanan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 dan saat ini selaku Wakil Ketua Dewan Pembina pada Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN).

PENDIDIKAN

333

Mengikuti berbagai pendidikan pengembangan umum, seperti Infantry Officer Advance Course, Seskoad dan Lemhannas, serta telah menyelesaikan berbagai kursus spesialisasi militer: Para Komando, Intelijen, Jump Master, Airborne & Path Finder, Free Fall, Terrorism in Low Intensity Conflict. Telah menyelesaikan pendidikan Master di bidang Bisnis, Business School in National University of Singapore pada 2015, NATO Crisis Management Course, NATO Defence Leadership in Building Integrity Course, dan Resource Management Education Programme (RMEP) Course di NATO SCHOOL Oberammergau, Jerman pada 2015, National Development Course, National Defence University, Taiwan, 2016.

BINTANG JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Dianugerahi, 22 Bintang Jasa dan Tanda Kehormatan, termasuk Bintang Dharma dan Bintang Mahaputera Utama. Pada tahun 2014, sebagai Pejabat Tinggi Indonesia Pertama yang menerima anugerah Medali Penghargaan dari The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC).

